

**PENELITIAN TERAPAN PENGEMBANGAN  
NASIONAL**

**KIAI POLITIK  
(Studi Terhadap Peran Ganda Kiai Di Jawa Tengah)**



**Oleh:**

**Drs. NASIHUN AMIN, M.Ag.  
NIP:196807011993031003  
ID Peneliti: 200107680103753**

**Drs. NIDHOMUN NIAM, MA  
NIP. 195808091995031001  
ID Peneliti: 20090819580108000**

**MENDAPAT BANTUAN DANA BOPTN  
UIN WALISONGO SEMARANG  
TAHUN 2019**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berusaha mengungkap tentang aktivitas kiai yang bergerak di dunia politik di Jawa Tengah. Hal ini penting diungkap mengingat ada sebuah kondisi kontradiktif. Di satu sisi, status dan peran kiai yang sedemikian sentral untuk melakukan pendidikan moral pada masyarakat. Di sisi lain, tidak jarang peran politik dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan nilai etika itu sendiri.

Permasalahan yang ingin dilihat adalah Bagaimana sebenarnya ragam orientasi kepolitikan kiai? Apa implikasi dari keterlibatan mereka dalam berpolitik?

Untuk menjawab itu, data lapangan dikumpulkan dengan mendasarkan pada satuan penelitian yaitu kiai yang sedang dan pernah ikut berkiprah di dunia politik melalui lembaga-lembaga resmi baik eksekutif, legislative, maupun parpol. Data yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif menggunakan Teori Fungsionalisme Struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya para kiai memahami bahwa politik merupakan bagian tak terpisahkan dari agama. Politik menjadi media yang efektif untuk melakukan perubahan. Namun demikian, pada tataran orientasinya mereka berbeda antara satu dengan lainnya. Varian politikus dalam menyikapi peran ganda ini terkategori ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, kiai yang lebih menitikberatkan peran di ranah politik, akan tetapi tidak melepaskan peran keagamaan. Kedua, kiai yang tetap memilih peran keagamaan lebih utama kendati mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk ikut mengambil posisi baik di legislative maupun eksekutif. Mereka mengontrol jalannya kepolitikan melalui partai dimana mereka berada. Ketiga, kiai yang lebih menitikberatkan kepada peran politik dan meninggalkan jalur kepesantrenan. Muatan-muatan moral

keagamaan ia laksanakan melalui peran-peran resmi dalam dunia politik.

Berkiprahnya kiai di dunia politik, mengakibatkan adanya berbagai implikasi baik positif maupun negatif. Implikasi positif terlihat dari pembangunan pesantren yang semula suatu wilayah belum mempunyai lembaga pendidikan agama pada akhirnya menjadi mempunyai; peningkatan sarana prasarana dan lahirnya perda-perda yang bernuansa keagamaan dan sebagainya. Sedangkan implikasi negatifnya adalah berkurangnya intensitas peran untuk mendidik santri dan masyarakat. Menyadari kondisi yang demikian, kiai yang bergerak di dunia politik telah berusaha mengantisipasi dan membuat solusi yang relatif baik.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesanggupan, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan tugas penelitian ini.

Bagi masyarakat dengan kultur keagamaan yang kuat, keberadaan kiai menempati posisi sentral. Fungsi utama mereka adalah memberikan pendidikan moral. Pada kenyataannya, banyak di antara kiai yang juga ikut berkiprah di dunia politik yang sering dipersepsi sebagai institusi yang kotor. Inilah yang mendorong peneliti untuk melihat secara lebih komprehensif bagaimana mereka melakukan peran ganda tersebut.

Hasil penelitian tentang **Kiai Politik (Studi terhadap Peran Ganda Kiai di Jawa Tengah)** ini pasti bukan dari karya peneliti seorang diri melainkan, terutama, dari rahmat dan taufik-Nya dan kerja kolektif dari banyak pihak. Karenanya, peneliti harus berterima kasih kepada

1. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang yang telah memberi kesempatan dan memberi dana untuk pelaksanaan penelitian ini.
2. Para kiai politisi di tengah kesibukannya yang padat tetap bersedia meluangkan waktunya untuk sekedar *ngobrol* mengenai kepolitikan para kiai yang ada di Jawa Tengah

3. Semua pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian baik langsung maupun tak langsung yang tak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Mahaesa memberikan balasan kemuliaan kepada semuanya dan hasil penelitian ini mempunyai manfaat.

Semarang, Oktober 2019  
Peneliti,

## DAFTAR ISI

Halaman Judul  
Surat Keterangan  
Kata Pengantar  
Abstrak  
Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

BAB II KIAI: ANTARA AGAMA DAN POLITIK

A. Kekuasaan dan Kewenangan: ..... 26

B. Kiai sebagai Elit Politik..... 31

C. Kiai Politik: Memadukan Otoritas..... 41

BAB III. EKSISTENSI KIAI DALAM DINAMIKA  
POLITIK DI JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Jawa Tengah..... 51

B. Dinamika Politik di Jawa Tengah .... 62

C. Profil Kiai Jawa Tengah ..... 77

**BAB IV. PARADIGMA POLITIK KIAI DI JAWA TENGAH**

- A. Orientasi Politik.....113
- B. Implikasi Keterlibatan..... 144

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 162
- B. Saran-saran..... 164

Daftar Pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan politik mutakhir memperlihatkan bahwa para kiai pemimpin pesantren memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Keberadaan mereka sangat diperhitungkan, bahkan menjadi rebutan. Hal ini terbukti ketika mengajukan calon pasangan presiden wakil presiden, pihak-pihak yang berkontestasi mengajukan kiai sebagai calonnya.

Keterlibatan kiai di gelanggang politik pada hakekatnya adalah jalinan mata rantai dari waktu-waktu sebelumnya. Pada masa perjuangan melawan kolonialisme, misalnya, dimana



mana saja penggerak utamanya adalah para kiai. Itu sebabnya dalam berbagai peperangan yang terjadi di seantero Indonesia yang paling banyak gugur sebagai pahlawan adalah santri dan kiai.

Salah satu peran penting kiai dalam satu peristiwa sejarah Indonesia adalah keterlibatan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 21-22 Oktober 1945 para kiai yang bernaung di bawah ormas NU menegaskan dan membuat pernyataan resolusi jihad. Muatan resolusi jihad itu menegaskan, bahwa melawan Belanda dan sekutunya yang ada di Indonesia adalah kewajiban setiap individu (*fardhu 'ain*) wajib hukum-nya bagi setiap orang Islam dan berdosa hukumnya bagi yang meninggalkan.<sup>1</sup>

Bagi sebagian besar umat Islam, interaksi kiai dengan kekuasaan sesungguhnya didasarkan atas keyakinan bahwa di dalam Islam antara agama dengan kekuasaan telah disatukan secara kuat dan tuntas. Sejarah pribadi Nabi Muhammad dan para khalifah yang menggantinya menjadi contoh konkret yang tak terbantahkan.

Melihat realitas sejarah yang demikian, maka aktivitas kiai dalam kancah politik sesungguhnya bukanlah sesuatu yang asing kendati kualitas dan kuantitasnya mengalami fluktuasi. Meskipun dalam setiap periode politik Indonesia berbeda-beda

---

<sup>1</sup> Baca Masyhur Amin. *NU dan Ijtihad Politik* Kenegaraannya. Yogyakarta: al-Amin Press, 1996.

namun proses pewarnaan politik di Indonesia sungguh tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan kiai. Kondisi demikian ini sesungguhnya sejalan dengan peta politik Indonesia yang selalu mengalami proses yang dinamis. Ia menaik pada hampir setiap permulaan babak baru sejarah akan tetapi pada umumnya setelah itu menurun dan kemudian kembali surut.

Jika kita sepakat bahwa kiai adalah generasi pewaris nabi, maka mereka sesungguhnya menempati posisi sebagai agen yang paling bertanggungjawab dan berkewajiban untuk menegakkan dan menjaga moralitas. Maka, pilihan kiai untuk masuk ke politik mempunyai nilai yang amat strategis. Dengan masuk politik, maka terbuka peluang secara lebar untuk ikut meluruskan orientasi kepolitikan para politikus. Berpolitik bukanlah mencari popularitas, apalagi duit, Berpolitik adalah pengabdian dan perjuangan,.. Dengan masuk politik, mereka juga bisa berperan serta mewarnai kebijakan-kebijakan lewat munculnya berbagai perundang-undangan.

Walaupun begitu memang bukanlah menjadi pekerjaan yang mudah untuk merealisasikan itu. Secara kultural, Indonesia telah terbentuk budaya yang kurang baik. Akibatnya sekalipun Indonesia pernah menjadi “Republik Santri”, perubahan juga tidak kunjung menjadi kenyataan. . Presidennya adalah seorang kiai dan mantan ketua PBNU, ketua MPR adalah intelektual muslim dan mantan Ketua PP Muhammadiyah, ketua DPR adalah seorang aktivis yang keislamannya tidak disangsikan lagi dan mantan ketua PB HMI. Sekarang, yang menjadi wakil presiden terpilih adalah seorang kiai besar. Ia

juga ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), sekaligus ketua Syuriah PB Nahdlatul Ulama (NU). Demikian pula, dengan beberapa kepala daerah banyak diantara mereka juada adalah kiai. Dalam majlis maupun dewan juga bertebaran anggota yang kiai yang menjadi ketua fraksi atau ketua komisi.

Kondisi demikian nampaknya juga melanda hampir semua daerah, tidak terkecuali Jawa Tengah, propinsi yang sebagian besar daerahnya memegang nilai-nilai keagamaan. Di Jawa Tengah sendiri yang menjadi wakil gubernur adalah seorang *gus* yang adalah anak dari seorang kiai besar dan berlatarbelakang pendidikan pesantren Dalam percaturan politik, pada setiap kali pemilu/pilkada di beberapa daerah di wilayah Jawa Tengah dimenangkan oleh parpol Islam dan tampilnya banyak kepala daerah yang berbasis agama..

Sekalipun begitu, ekspresi keberagaman yang muncul terkadang justru bertolakbelakang dengan nilai yang digaungkan oleh agama. Contoh kasus lama yang bisa ditunjukkan adalah peristiwa Dongos Berdarah yang terjadi pada 1999 di Kabupaten Jepara. Peristiwa ini terjadi justru pada masyarakat yang tinggi tingkat kepatuhannya kepada kiai, yaitu basis massa “partai kiai” PPP dan PKB

Jika demikian, lantas pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana peran ganda kiai dapat berlangsung dengan baik. Disatu sisi, secara idea kiai harus mengawal moral. Di sisi lain, secara praktis, harus berebut kekuasaan yang sering harus keluar dari rel moralitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagai kiai, peran utama yang harus dimainkan sesungguhnya adalah mengasuh dan membimbing umat di tempat seputar kiai itu tinggal. Sebagai pengasuh dan pembimbing, kiai membutuhkan adanya seperangkat ilmu agama yang kuat, waktu yang cukup dan integritas moral yang terjaga. Tapi di sisi lain, sebagai seorang politisi terkadang dihadapkan pada situasi dilematis dan mau tak mau harus berebut kekuasaan. Keadaan ini menuntut pengorbanan waktu, meminggirkan ilmu yang dimilikinya bahkan mengorbankan integritas moralnya sendiri.

Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut, penelitian ini berusaha memusatkan pada pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa orientasi kiai berpolitik ?
2. Apa implikasi keterlibatan kiai dalam politik bagi tugas kiai di pesantren/masyarakat?

## **C. Kerangka Konseptual**

### **1. Kiai**

Kiai, menurut Zamakhsyari Dhofier<sup>2</sup> adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama

---

<sup>2</sup>Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 55

Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Hanya saja, konsep ini belakangan mengalami banyak perubahan dan pergeseran di masyarakat. Dengan semakin banyaknya orang yang belajar ilmu agama Islam, akhirnya banyak orang yang mempunyai pengaruh kuat di masyarakat dan memiliki ilmu ke Islaman yang cukup dalam. Oleh masyarakat pada akhirnya juga diberikan gelar kiai meskipun tidak mempunyai pesantren.

Kiai adalah figure sentral di pesantren. Di beberapa pesantren, kiai bahkan dianggap sebagai raja kecil, Tidak ada seorangpun santri atau orang lain yang bisa melawan kekuasaannya dalam lingkungan pesantren, Ia hanya bisa disaingi oleh kiai lain yang lebih besar kharismanya. Dengan kata lain, kiai di pesantren merupakan penguasa utama dalam penentuan kebijakan dan keputusan. Ia memecahkan problem kemasyarakatan.

Di pedesaan, kiai betul betul menyatu dengan berbagai golongan. Mereka mampu melakukan tindakan kolektif jika seorang kiai itu diperlukan. Kiai memainkan peran sebagai poros hubungan antara umat dengan Tuhan. Bahkan masyarakat menganggap kiai sebagai pihak yang mampu menyelami dan memahami keagungan Tuhan dan rahasia alam.

Adapun yang dimaksud dengan kiai dalam penelitian ini adalah merupakan gelar untuk satu anggota masyarakat yang ahli dalam agama Islam yang ditunjukkan

melalui kepengasuhannya di pesantren, serta kemampuan yang cermat dalam membaca pikiran masyarakat sekitarnya. Disamping itu, karena berbagai kelebihan yang ada pada mereka, sehingga mereka juga berfungsi begitu dominan dan efektif dalam mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat. Atas dasar kemampuannya itu, mereka menempatkan dirinya sebagai pemimpin lokal yang kharismatis sesuai dengan tuntutan masyarakat lingkungannya.

## 2. Politik

Secara umum, ada dua konsep utama untuk menjelaskan mengenai politik yaitu kekuasaan dan kewenangan (*authority and power*).

Di satu pihak, konsep politik ada yang memusatkan titik perhatiannya kepada kekuasaan dalam hidup bersama.<sup>3</sup> Pada konteks ini, politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan adalah “*a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the former’s own ends*”<sup>4</sup> (hubungan di mana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok agar sesuai dengan tujuan dari

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto. *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) hal. :8-13.

<sup>4</sup> (Lasswell. *Power*. hal. :74..

pihak pertama). Kekuasaan ini tanpa mempersoalkan dari mana sumber kekuasaan itu berasal apakah berasal dari kedudukan resmi sebagai pemimpin, atau berasal dari kekayaan, atau juga berasal dari agama. Pada kelompok ini tercatat nama seperti Harold D. Lasswell, Charles Meriam, Abraham Kaplan

Di pihak lain, memusatkan konsep politik pada kewenangan. Pada hakekatnya kewenangan adalah kekuasaan yang terlembagakan (*institutionalized power*)<sup>5</sup>. Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan oleh Lasswell dan Kaplan<sup>6</sup> kewenangan merupakan kekuasaan formal (*formal power*). Dari penjelasan ini bisa diketahui bahwa konsep politik yang didasarkan pada kewenangan mewujudkan melalui lembaga-lembaga resmi. Sehingga, pada akhirnya konsep ini menegaskan bahwa politik memfokuskan perhatian kepada negara dan berbagai lembaga formal yang ada di dalamnya.

Dalam perspektif politik, negara merupakan sebuah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Pendekatan yang digunakan dalam konsep ini adalah pendekatan institusional. Pada kelompok ini tercatat nama-nama seperti Roger F. Soltau, J. Barents

---

<sup>5</sup>Miriam Budiarto. *Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal.:89

<sup>6</sup>Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan. *Power and Society* (New Haven: Yale University Press, 1950).

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud politik menunjuk pada persoalan kewenangan yang terdapat dalam berbagai lembaga formal. Dengan demikian kiai politik adalah kiai yang terlibat dalam lembaga-lembaga formal, baik di legislative maupun eksekutif serta partai politik yang menjadi kendaraannya.

### 3. Peran

Dalam struktur sosial dikenal dua konsep penting yaitu status (*status*) dan peran (*role*). Keduanya merupakan sebuah kesatuan tak terpisah. Melalui dua konsep penting ini peran ganda kiai dalam agama dan politik dapat dipotret secara baik.

Horton Hunt, dalam *Sociology*, menjelaskannya dengan gamblang. Menurutnya, peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status tertentu (*Role is the behaviour expected of the one who holds a certain status*).<sup>7</sup> Karena status yang menempel kepada seseorang, maka orang itu harus dapat memainkan perannya secara baik. Inilah yang melahirkan paham interaksionis karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran.

Lebih jauh Ralph Linton menjelaskan mengenai kedua konsep tersebut. Status ialah “*a collection of right and*

---

<sup>7</sup> Baca: Horton Hunt. *Sociology*. McGraw-Hill, 1972



*duties*". (Suatu kumpulan hak dan kewajiban), sedangkan peran ialah "*the dynamic aspect of status*"<sup>8</sup> Menurut Linton seseorang menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan statusnya. Kalau kita memakai kerangka Linton ini untuk membedakan antara status kiai dengan peran kiai misalnya, kita dapat mengatakan bahwa status kiai terdiri atas sekumpulan kewajiban tertentu seperti kewajiban mendidik santri dan mengajarkan ilmu kepada ummat dan sekumpulan hak seperti mendapat penghormatan dari santri dan ummat dan menerima imbalan atas jasanya. Peran seorang kiai mengacu pada bagaimana seseorang yang berstatus sebagai kiai menjalankan hak dan kewajibannya itu, antara lain bagaimana ia mengajar kepada santri dan ummat serta melakukan bimbingan kepada mereka.

Peran ganda kiai sebagai ulama dan politisi, yang seringkali bertolakbelakang, hampir bias dipastikan akan menimbulkan konflik peran (menjalankan hak dan kewajiban) sebagai ulama disatu sisi dan kewajiban lain sebagai politisi. Ini adalah kondisi dilematis. Dalam kondisi seperti ini tentu saja harus bias memutuskan secara arif. Biasanya seseorang menangani konflik peran dengan memutuskan secara sadar atau tidak peran mana yang

---

<sup>8</sup>Lewis Coser dan Bernard Rosenberg. *Sociology Theory: a Readings* (New York: The Macmillan, 1968), hal. :356..

menimbulkan konsekuensi terburuk jika diabaikan kemudian memperlakukan peran itu lebih dari yang lain.

#### D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang kiai bukanlah sebuah barang baru. Penelitian lama seperti Clifford Geertz dalam *The Religion of Java* misalnya telah memberikan sumbangan yang sangat berarti. Ia, meminjam konsep Wolf, melihat kiai di Jawa menempati posisi sebagai pialang budaya. Pada masa sesudah kemerdekaan, telah terjadi perubahan peran para kiai, dari seorang komunikator yang menghubungkan dunia Islam berpusat di Mekkah dengan para petani Jawa di pedesaan menjadi politisi yang mengageni pemerintah pusat di desa. Geertz telah berhasil menarik perhatian banyak ahli kepada posisi istimewa (*crucial*) para kiai.

Hiroko Horikoshi juga telah melakukan studi lapangan di Jawa Barat mengenai *Kiai dan Perubahan Sosial*. Posisi kiai ditempatkan sebagai posisi penghubung. Dalam posisi penghubung, para kiai yang cakap mampu memasuki permainan kekuasaan yang begitu rumit dengan sistem luar yang dominan. Hanya saja, keberhasilan seorang kiai dalam memainkan peranannya menurut Horikoshi sangat tergantung pada kualitas hraismatik mereka

Zamakhsyari Dhofier dalam disertasi yang berjudul *The Pesantren Traditional A Study of the Role of the Kiai in Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*

membahas secara rinci usaha-usaha yang dilakukan para kiai untuk memelihara apa saja yang disebutnya sebagai tradisi pesantren. Dhofier telah memberi sumbangan besar dengan mengungkapkan adanya berbagai macam jaringan (*network*) yang sengaja diciptakan oleh para kiai sebagai upaya mempertahankan tradisi pesantren. Jaringan yang dimaksud antara lain berupa jaringan transmisi ilmu, hubungan saling memasok santri diantara pesantren tertentu, jaringan kekerabatan antar kiai yang muncul melalui sistem perkawinan endogamis. Disamping itu, uraian-uraiannya yang rinci tentang nilai-nilai, pandangan hidup dan elemen-elemen dalam kehidupan pesantren, sangat menolong kita mengenal anatomi kehidupan pesantren yang sangat rumit;

Sementara itu, karya Khoiro Ummatin yang berjudul *Perilaku Politik Kiai* adalah karya yang didasarkan atas penelitian terhadap kiai-kiai di Yogyakarta .

Berbeda dengan itu Koiruddin menulis buku *Politik Kiai Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*. Dalam penelitian ini, penulis meletakkan kiai sebagai institusi social yang ikut memainkan peran dalam perubahan masyarakat. Yang terus mengundang pandangan-pandangan pro dan kontra. Penelitian ini berupaya mengurai peran politik kiai paska deklarasi PKB.

Karya lain lagi dipersembahkan oleh Ptdjarta Dirdjosanjoto. Dalam karyanya yang berjudul *Memelihara Umat Kiai Pesantren –Kiai Langgar di Jawa* memilah kiai

menjadi dua kelompok yaitu kiai yang mempunyai pesantren yang disebut Kiai Pesantren dan kiai yang hanya membina pengajian-pengajian di majlis-majlis di luar pesantren yang disebutnya Kiai Langgar. Kedua jenis kiai itu banyak yang mengambil sikap mendua yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik.

Miftah Faridl dalam sebuah artikelnya yang berjudul “Peran Sosial Politik Kiai di Indonesia”, dalam jurnal *Mimbar*, volume XIX No. 2 April - Juni 2003 memaparkan mengenai peran dan status kiai di Indonesia. Kiai merupakan suatu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Islam. Kiai menjadi salah satu elit strategis dan merupakan figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Tidak mengherankan jika kiai kemudian menjadi sumber legitimasi dari berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Pada titik inilah dapat dilihat peran-peran strategis kiai khususnya dalam aspek kehidupan sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan studi, ditemukan bahwa pertama, kiai terbukti melakukan sejumlah penafsiran ulang demi kepentingan kondisi sosial yang dihadapinya, walaupun tetap menggunakan corak pemikiran abad pertengahan. Kedua, pada umumnya kiai memusatkan perhatiannya pada dunia pendidikan, urusan sosial politik cenderung diterlantarkan, sehingga ketika arus reformasi muncul, banyak kiai yang tampak gagap menanggapi. Berkaitan dengan peran sosial

politik kiai, diindikasikan ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kiai.

Secara spesifik, perbedaan perilaku sosial politik kiai terlihat pula pada kelenturan sikap politik yang diperankannya. Kiai dengan latar sosio-religius kelompok modernis memiliki sikap cenderung tertutup, sedangkan kiai dengan latar belakang sosio-religius kelompok tradisional memiliki sikap yang cenderung lentur dan terbuka. Dengan fenomena ini maka dapat dikemukakan dua model kiai, Pertama, model yang memilih diam, ketika menghadapi berbagai perubahan sosial politik mereka biasanya lebih memperhatikan lembaga pendidikan (dakwah). Kedua, model yang cepat tanggap terhadap berbagai perubahan sosial politik, cenderung agresif dan ikut terlibat membidani kelahiran partai-partai.

Artikel yang berbeda yang ditulis oleh Miftah Faridl adalah “Perilaku Sosial Politik Kiai Di Tengah Masyarakat Transisi: Kasus Di Wilayah Cirebon dan Bandung” dalam jurnal *Mimbar*, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005. Dalam artikel ini, ia menyatakan bahwa fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama, faktor posisi sosial kiai, yang menurut studi-studi terdahulu, memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya. Hubungan kausalitas antara kedua faktor inilah yang kemudian dielaborasi secara kritis dalam tulisan ini.

Dalam masyarakat Islam, kiai merupakan salah satu elit yang mempunyai kedudukan sangat terhormat dan berpengaruh besar pada perkembangan masyarakat tersebut. Kiai menjadi salah satu elit strategis dalam masyarakat karena ketokohnya sebagai figur yang memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai ajaran Islam. Lebih dari itu, secara teologis ia juga dipandang sebagai sosok pewaris Nabi (*waratsat al-anbiya*). Secara spesifik, masalah pokok studi ini difokuskan pada deskripsi peran sosial politik kiai dalam medan sosial politik yang tumbuh dan berkembang,, khususnya pada masyarakat transisi. Dari beberapa kasus yang diamati berkenaan dengan peran sosial politik kiai di wilayah Cirebon dan Bandung diperoleh kesimpulan, ada hubungan antara persepsi teologis dengan perilaku sosial politik kiai. Perbedaan persepsi teologis para kiai memperlihatkan adanya perbedaan perilaku sosial politik yang diperankannya. Persepsi teologis serta perilaku sosial politik kiai tertentu tidak secara otomatis menghasilkan peran pengubah pada masyarakat sekitarnya.

Sementara itu Abdurrahman menulis “Fenomena Kiai Dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral Dan Politik” dalam jurnal KARSA, Vol. XV No. 1 April 2009 menyatakan bahwa keberadaan kiai dalam dunia politik, sungguh kondisi yang demikian sebenarnya sangat kontradiktif dengan keseharian para kiai---terutama kiai-kiai yang di pesantren--- dengan nuansa Islami yang sebelumnya selalu diwarnai dengan mengajar kitab-kitab keIslaman dan memberikan pengajian. Namun kebebasan berpolitik acap kali dijadikan alasan para

politisi untuk memperkuat keberadaan partai-partai politik, dengan merangkul para kiai untuk masuk dalam partainya. Bilamana seorang kiai sudah terlalu dekat dengan kekuasaan yang dikhawatirkan malah menggunakan agama untuk kepentingan politiknya. Sejatinya, politik dapat dijadikan sebagai media. Sehingga agama dapat berfungsi sebagai instrument bagi kekuasaan. Bagi seorang kiai *plus* politisi, hendaknya mampu menjalankan kedua profesinya secara ikhlas dan istiqomah. Jika tidak? pengaruh kiai menjadi tidak bermakna, ketika otoritasnya dianggap telah menyimpang dari apa yang seharusnya.

Di sisi lain Rudi Subiyakto menulis *Keterlibatan Kiai Dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)*, dalam jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, 2011. Dalam pemaparannya dampak keterlibatan Kiai dalam pilkada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2006 dapat dibagi menjadi 3 hal, dampak bagi kandidat, bagi Kiai dan dampak bagi santri: Kiai mempunyai peran ganda, sebagai elit lokal keagamaan dan elit lokal politik. Bagi kandidat, dengan merangkul kiai diharapkan akan mendapatkan dukungan suara yang signifikan dari para pengikut kiai di Banjarnegara, hal ini sangat bergantung pada “kinerja” kiai pendukung kandidat. Relatifitas ini terjadi karena terdapat kiai yang menjadi aktor dan kiai partisipan. Kiai aktor, dengan sendirinya akan mempengaruhi pilihan politik pengikutnya. Sedangkan kiai partisipan akan menyerahkan pilihan politik pengikutnya sesuai dengan

pilihannya sendiri. Kiai akan mendapatkan keuntungan berupa jaminan bantuan dana bagi pembangunan dan pengembangan pesantren yang dipimpinnya. Tetapi meskipun tak signifikan, keterlibatan Kiai dalam kancah politik lokal tersebut berpengaruh terhadap proses pembelajaran karena aktifitas Kiai tersebut menyebabkan sering meninggalkan pesantren yang dipimpinnya. Keterlibatan Kiai juga berimplikasi bagi santri. Perubahan dan penambahan berbagai fasilitas pesantren yang berasal dari bantuan para kandidat disini sangat membantu kegiatan belajar mengajar di pesantren.

Artikel yang kurang lebih sama ditulis oleh Hasanatul Jannah, *Kiai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan*, dalam jurnal FIKRAH: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, Volume 3, No.1, Juni 2015. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan kiai diorientasikan untuk menggalang perubahan sosial yang mampu memperkokoh posisi sosialnya masyarakat. Bagaimanapun juga, kiai tetap harus berada dan membela tradisi kultural dan agama, dan jika kehilangan kekuatannya akibat dari berbagai strategi-strategi politik maka otoritas kiai menjadi luntur. Kiai membangun kharisma dan kekuasaannya melalui proses yang tidak mudah diikuti oleh berbagai kalangan. Mulai dari penggalian ilmu agama, manajemen sosial dan kepemimpinan, sampai pada ketahanan memelihara statusnya. Karenanya adanya kesadaran bahwa perjuangan kiai berangkat dari otoritas kultural dan agama menjadi penting untuk dipahami bersama, untuk itu orientasi perjuangannya juga harus diorientasikan dalam rangka



transformasi sosial masyarakat dan bukan dalam pertarungan di medan politik yang seringkali menciptakan konflik dan disintegrasi sosial yang berkepanjangan.

Penelitian lain mengenai kiai dilakukan oleh Maria Ulfa yang berjudul *Peran Kiai Dalam Kehidupan Politik*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumur Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Dari penelitian diperoleh hasil bahwa peran kiai di desa Sumur sebenarnya dalam keadaan mendua yaitu sebagai tokoh politik dan sebagai tokoh agama, sebagai tokoh agama kiai memberi pengajaran pada masyarakat yaitu melalui, do'a bersama, ceramah keagamaan dan mengaji.

Dalam bidang politik, terutama dalam penyuksesan pilgub Jateng 2008 peran kiai terlihat dalam kegiatan dengan kedok keagamaan seperti do'a bersama (*Istighostah*), kegiatan rutinan Fatayat Muslimat NU seperti tahlil, manaqib, berzanji, dan yasinan. Dengan kedok kegiatan keagamaan tersebut kiai menyampaikan sosialisasi dan mengkampanyekan pasangan cagub-cawagub yang diusung oleh partai politik tertentu. Dalam pilgub Jateng 2008 kemenangan ada pada calon yang memiliki latar belakang ketokohan NU, hal tersebut menunjukkan beberapa sebab diantaranya: (1) Kiai masih memiliki peran efektif dalam dunia politik, khususnya dalam pelaksanaan pemilu atupun pilkada, (2) pilihan warga masyarakat desa Sumur terhadap cagub-cawagub berdasarkan ketokohan NU, (3) Masyarakat Desa Sumur dalam memilih pada Pilgub Jateng 2008 tidak memperhatikan calon yang diusung dari parpol mana ataupun pada program yang dimiliki,

akan tetapi lebih pada peran kiai pada masyarakat atau sejauh mana peran ketokohan calon tersebut menyentuh lapisan masyarakat. Kiai dan tokoh politik merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya memiliki hubungan yang erat satu sama lain dalam struktur politik, yaitu pada parpol berbasis Islam, dalam hal ini Partai kebangkitan Bangsa (PKB).

Hasil-hasil studi di atas tidak ada yang secara spesifik menguraikan tentang orientasi dan implikasi keterlibatan kiai dalam politik. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji objek penelitian tentang kiai berpolitik baik sebagai anggota legislative, maupun eksekutif atau pengurus partai politik di Jawa Tengah.

#### E.. Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah. Ada beberapa pertimbangan mengapa Jawa Tengah dijadikan lokasi penelitian. Pertama,, Jawa Tengah adalah sebuah daerah yang agamis. Dari sisi pendidikan, di Jawa Tengah banyak lembaga pendidikan keagamaan formal -mulai dari tingkat TK hingga perguruan Tinggi- maupun non formal –dari madin ula sampai pondok pesantren yang jumlahnya puluhan. Di sisi politik, setiap pemilu, partai2 Islam selalu mendapatkan pemilih signifikan kendati belum bisa menempati peringkat teratas.. Kondisi demikian salah satu hal yang berpengaruh adaah oleh kepengikutan terhadap kiai. Sedangkan di aspek ekonomi,

perkembangan ekonomi di sana ternyata sangat cepat. Sekalipun banyak melibatkan orang luar Jawa Tengah, bahkan luar negeri, yang menjadikannya semakin plural, akan tetapi kaum santri tetap mempunyai pran besar

Kedua, komposisi eksekutif dan legislative di Jawa Tengah cukup banyak diwarnai oleh jebolan pesantren yang masih aktif memberikan pengajian kitab kuning di pesantren sekalipun tidak mempunyai pesantren sendiri.

Kedua, Jawa Tengah pernah mempunyai sejarah hitam yaitu konflik intern agama yaitu peristiwa Dongos Berdarah pada tahun 1999 di Jepara. Konflik ini menjadi serius justru karena terjadi antara basis massa “partai kiai” yaitu PPP dan PKB.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga seluruh prosedur metodologi menggunakan teknik tersebut, baik sumber data, teknik pengumpulan maupun analisis datanya. Data-data akan dicari baik dari sumber primer yaitu mereka yang diidentifikasi sebagai kiai, maupun sumber sekunder yaitu pihak-pihak lain yang diharapkan mampu memberikan informasi tentang peran ganda kiai.

Sedangkan untuk mengumpulkan data akan digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Teknik observasi digunakan untuk melihat kondisi pesantren secara fisik dan aktivitas yang ada di dalamnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan *key person* yang tahu betul persoalan atau obyek yang sedang diteliti. Tokoh agama dan tokoh masyarakat merupakan sumber

informasi yang sangat berharga. Wawancara dikembangkan dengan teknik *snowball* sehingga diharapkan mendapatkan informasi yang banyak dan mendalam. Informasi yang diperoleh bukan merupakan opini pribadi tetapi merupakan *share information*.

Pengolahan data dan analisis data meliputi tiga kegiatan: deskripsi, formulasi dan interpretasi.<sup>9</sup> Deskripsi dimulai dari menggambarkan fenomena dan merentangnya ke dalam berbagai kategori, memilah-milah data berdasar substansi temuan dan pada saat yang sama juga dilakukan reduksi data. Data yang tidak relevan dengan permasalahan akan dibuang, sehingga data yang diambil hanya data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti saja. Setelah itu, dilakukan formulasi dengan cara melihat kecenderungan-kecenderungan, mencari hubungan asosiasional. Dari data yang telah ada kemudian dimaknai. Semua proses pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara siklis. Jika pada waktu analisis, datanya dianggap kurang, maka pengumpulan data bisa dilakukan lagi. Pola demikian akan berlangsung terus sampai dengan penelitian dianggap selesai.

Penelitian ini mula-mula akan mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam politik praktis yang dinilai oleh masyarakat pada umumnya sebagai seorang kiai. Kiai yang dimaksud di sini, adalah mereka yang mempunyai pengaruh

---

<sup>9</sup> Sunyoto Usman. Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi (Yogyakarta: Cired, 2004) hal. , 99-101..

kuat di masyarakat dan mempunyai kemendalaman ilmu agama. Biasanya, hal ini diindikasikan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai pembinaan moralitas-spiritualitas masyarakat melalui berbagai forum/jamaah pengajian, baik yang secara spesifik mengkaji tentang kitab kuning maupun jamaah yang lebih luas.

Dengan mengidentifikasi ini, maka akan ditemukan sosok yang memainkan peran ganda. Di satu sisi, bermain di aspek moralitas-spiritual. Di sisi lain, bermain di aspek politik yang pada dataran praktis terkadang bahkan sering menyimpang dari acuan moral, berdasarkan kepentingan dan kekuasaan. Dari peran ganda inilah kemudian ditelusur berbagai data yang berkaitan dengan orientasi, implikasi, persepsi masyarakat dan efektivitas peran yang dimainkan oleh para kiai politisi.

Dalam melihat realitas peran ganda tersebut dapat digunakan berbagai perspektif. Diantara perspektif tersebut yang paling dominan dan banyak dianut oleh para sosiolog dalam menjelaskan hubungan politik dengan agama adalah teori struktural fungsional. Kingsley Davis mengatakan bahwa pengujian atas peranan atau fungsi yang dijalankan oleh sebuah institusi atau perilaku tertentu dalam masyarakat dapat dilakukan melalui analisis fungsional.

Perspektif ini sering pula disebut dengan fungsionalisme struktural. Penamaan demikian karena perspektif ini memusatkan perhatian pada prasyarat fungsional atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial

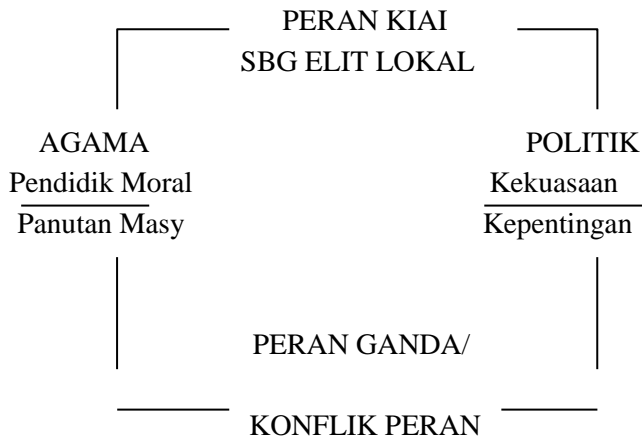
dalam mempertahankan kehidupannya dan struktur-struktur yang sesuai dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sesuai dengan pandangan ini, sistem sosial memiliki kecenderungan untuk melaksanakan fungsi tertentu yang dibutuhkan untuk kelangsungan sistem sosial.

Teori fungsionalisme struktural lebih menekankan kepada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik dalam masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifest dan keseimbangan (*equilibrium*). Fungsi dalam teori ini adalah akibat yang dapat diamati yang sesuai dalam suatu sistem, oleh karena itu lawannya adalah *disfungsi*. Sifat dari fungsi itu adalah fungsi manifest dan fungsi laten.

Melalui teori ini, kiai dianggap memiliki fungsi yaitu sebagai pengayom ummat. Fungsi kiai seperti ini dinamakan sebagai fungsi manifest, yaitu peran yang diharapkan terjadi pada seorang kiai. Jika fungsi ini tidak dijalankan oleh kiai, maka akan terjadi fungsi laten dalam masyarakat, yaitu fungsi yang tidak diharapkan yang akan mengakibatkan hilangnya keseimbangan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bila fungsi laten yang diperankan oleh kiai maka akan mengakibatkan *disorganisasi* dalam masyarakat..

Dengan demikian, berkurangnya waktu kiai mengelola pondok dan mengajar masyarakat memungkinkan rendahnya intensitas pengajaran. Sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pola, peran, serta fungsi pada kiai. Dengan peran ganda kiai, sebagai politisi dan ulama, maka semakin beratlah

tugas yang harus dilakukan setiap harinya. Untuk melengkapi kerangka berpikir di atas, penulis sajikan bagan kerangka pemikiran di bawah ini.



#### H. Sistematika

Laporan penelitian ini akan disajikan dalam lima bab yang tersusun dalam sistematika sebagai berikut:

Pada bab I, pendahuluan akan diuraikan kerangka metodologis penelitian ini. Tulisan diawali dengan pemikiran yang melatarbelakangi mengapa obyek penelitian ini perlu diangkat. Kemudian diikuti pokok persoalan, tujuan dan

kegunaan, kerangka konseptual, tinjauan pustaka, metode penelitian, alur penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II akan berisi tentang landasan teoritik dari penelitian ini. Bab ini penting mengingat aspek teoritik inilah yang akan dipergunakan untuk melihat realitas kiai politik yang akan dipaparkan pada bab III. Bab ini akan membicarakan mengenai memadukan otoritas agama dan politik. Pembahasan dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu tentang kekuasaan dan kewenangan sebagai batas-batas politik, kiai sebagai kaum elit yang menjadi faktor determinan politik, kiai sebagai pengawal moral dan keberadaan Kiai antara agama dan politik. Bab ini dimaksudkan untuk memberikan kerangka berpikir ketika hendak menganalisis orientasi dan implikasi yang muncul akibat keterlibatan kiai dalam kancah kepolitikan.

Selanjutnya, pada bab III akan dibicarakan mengenai data-data penting, terutama yang berkaitan dengan lokasi penelitian dan kiprah politik para kiai di Jawa Tengah. Pada bab ini akan dibagi ke dalam tiga sub bab yaitu gambaran umum Jawa Tengah yang terdiri dari kondisi sosial-keagamaan, social-budaya dan social-politik lokasi penelitian, sub bab dinamika politik di Jawa Tengah dan sub bab profil kiai Jawa Tengah

Kemudian bab IV akan menyajikan mengenai paradig politik para kiai di Jawa Tengah. Dalam bab ini akan dibagi ke dalam dua sub bab yaitu sub bab ragam orientasi politik dan sub bab implikasi terhadap pendidikan.umat..



Bab terakhir adalah bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **KIAI: ANTARA AGAMA DAN POLITIK**

#### **A. Kekuasaan dan Kewenangan: Unsur Utama Politik**

Merupakan sebuah keniscayaan ketika berbicara tentang kiai politik, sebelumnya berbicara terlebih dahulu tentang politik secara umum. Secara etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>10</sup> Pada zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan dalam

---

<sup>10</sup>Hidajat Imam, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), hal. 2.

hidupnya.<sup>11</sup> Sehingga dapat ditafsirkan bahwa politik adalah suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

Politik pada umumnya tidak hanya sebuah interaksi pada tatanan individu saja, akan tetapi dapat dikatakan sebagai bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan. Proses tersebut bisa saja terjadi antar individu maupun kelompok atau lebih familiar kita menyebutnya partai. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan yang telah dipilih. Agar pencapaian tujuan yang telah digariskan bisa terealisasi secara efektif, maka diperlukan adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari berbagai sumber yang ada. Untuk melaksanakan itu semua mensyaratkan secara mutlak adanya kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina hubungan kerja yang baik maupun untuk menyelesaikan berbagai ketegangan yang mungkin timbul selama proses tersebut berlangsung.

Dalam diskursus politik ada dua konsep utama yang sangat menentukan realitas kepolitikan. Dua konsep tersebut adalah kewenangan dan kekuasaan (*authority and power*),

---

<sup>11</sup> Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011), hal. 2.

sekalipun ada juga beberapa konsep yang turut menentukan seperti yang telah dikemukakan di depan. Sesungguhnya kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*)<sup>12</sup>. Dengan kata lain, sebagaimana ditegaskan oleh Lasswell dan Kaplan,<sup>13</sup> kewenangan adalah kekuasaan formal (*formal power*). Dengan demikian konsep politik yang didasarkan pada kewenangan teraktualisasikan melalui lembaga-lembaga resmi. Sehingga, pada akhirnya konsep ini menyatakan bahwa politik memusatkan perhatian kepada negara dan berbagai lembaga formal yang ada di dalamnya. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Pendekatan yang digunakan dalam konsep ini adalah pendekatan institusional. Pada kelompok ini tercatat nama-nama seperti Roger F. Soltau, J. Barents

Di pihak lain, konsep yang memusatkan titik perhatiannya kepada kekuasaan dalam hidup bersama<sup>14</sup> menyatakan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan adalah “*a relationship in which one person or group is able to determine the action of another in the direction of the*

---

<sup>12</sup> Miriam Budiardjo. *Demokrasi di Indonesia*. (Jakarta, Graamedia Pustaka Utama, 1994), hal. 89.

<sup>13</sup>Baca: Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan. *Power and Society*. (New Haven, Yale University Press, 1950)

<sup>14</sup> Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 8-13.

*former's own ends*"<sup>15</sup> ( hubungan di mana seseorang atau kelompok dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok agar sesuai dengan tujuan dari pihak pertama). Kekuasaan ini tanpa mempersoalkan dari mana sumber kekuasaan itu berasal apakah berasal dari kedudukan resmi sebagai pemimpin, atau berasal dari kekayaan, atau juga berasal dari agama. Pada kelompok ini tercatat nama seperti Harold D. Lasswell, Charles Meriam, Abraham Kaplan.

Kerangka kerja penelitian ini lebih cenderung diarahkan kepada konsep pertama, yaitu kewenangan. Pemilihan batasan ini lebih banyak disebabkan oleh ketegasan ruang lingkup yang diberikan oleh konsep kewenangan dibanding konsep kekuasaan. Berpolitik hanya boleh dan bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki wadah atau lembaga yang mempunyai kewenangan. Seluruh aktivitas yang berusaha mengarah kepada otoritas, baik itu adalah tindakan yang jelas-jelas untuk berada di dalamnya maupun hanya sekedar memberikan legitimasi kepadanya adalah sebuah tindakan politik.

Berbeda dengan itu, konsep kekuasaan kelihatan sangat elastis, bahkan tidak jelas batasnya. Dengan adanya batasan utama "sesuai dengan tujuan orang pertama" rasanya sulit dibedakan antara tindakan politik dan non-politik. Seseorang yang menginginkan adanya keteraturan sosial, akan tetapi ia semata-mata didorong oleh semangat keagamaan atau semangat sosial, dan ia berhasil untuk mewujudkan keinginannya itu,

---

<sup>15</sup> Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan. *Power*. hal. 74.

maka hal ini tentu saja dengan menggunakan kerangka yang kedua ini bisa diidentifikasi sebagai tindakan politik

## **B. Kiai sebagai Kelompok Elit Politik**

Berkaitan dengan batasan-batasan yang telah dijelaskan diatas, dalam ilmu politik ada beberapa teori yang bisa dipakai sebagai sudut pandang. Hal ini dirasa perlu untuk memperjelas dan mendukung berjalannya penelitian. Teori-teori tersebut diantaranya adalah teori elit, teori kelompok dan teori kekuasaan.

Teori elit banyak ditemukan dalam berbagai tulisan para pemikir Eropa, khususnya Vilfreda Pareto, Gaetano Mosca, Roberto Michels, dan Yose Ortega Y. Gasset. Pareto (1848-1923) sangat percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit. Oleh karena itu Pareto mengelompokkan masyarakat ke dalam dua kelas. *Pertama*, lapisan atas, yaitu kelas elit. Baik elit yang memerintah maupun yang tidak memerintah. *Kedua*, lapisan bawah yaitu kelas non-elit.<sup>16</sup> Kelas non-elit bisa dikategorikan sebagai rakyat atau

---

<sup>16</sup> S.P. Varma. *Teori Politik Modern*. terj. Yohannes Kristiarto dkk (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 200

masyarakat biasa yang tidak mempunyai otoritas atau kewenangan dalam berpolitik.

Sarjana yang terlacak sangat gigih menyokong teori elit adalah C. Wright Mills. Salah satu karyanya yang berjudul *The Power Elite*<sup>17</sup> telah berhasil menyuguhkan analisisnya terhadap kehidupan masyarakat Amerika. Ia menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Amerika sangat ditentukan oleh tiga kelompok elit yaitu elit politik, dunia usaha dan militer. Berangkat dari ketiga kelompok tersebut, secara umum, ia mengelompokkan masyarakat kedalam tiga kategori: elite yang memerintah atau bisa kita katakan elite politik, elite tidak memerintah yaitu elite yang tidak terjun ke dunia politik, seperti fokus dalam dunia usaha atau karir, dan rakyat jelata, kelas bawah yang tidak mempunyai power, baik dalam hal ekonomi ataupun kewenangan.

Berbeda dengan teori elit yang memusatkan teorinya kepada elit tertentu, teori kelompok mendasarkan teorinya kepada berbagai macam kelompok kepentingan yang saling berkompetisi untuk mendapatkan kekuasaan. Akar teori kelompok ini terletak pada doktrin pluralisme, yang dikembangkan oleh sejumlah penulis pada awal abad 20, seperti Arthur F. Bentley, John Figgis, F.W. Maitland, Daniel Truman, Robert Dahl dan G.D.H. Cole.<sup>18</sup> David Riesman misalnya, yang melakukan studi yang sama dengan Mills, yaitu menganalisis

---

<sup>17</sup> C. Wright Mills. *The Power Elite* (New York: Oxford University Press, 1959)

<sup>18</sup> S.P. Varma. *Teori.*, hal. 225-228

struktur masyarakat Amerika, menemukan hasil yang berbeda. Menurutnya, dalam karyanya *The Lonely Crowd*,<sup>19</sup> Amerika sangat ditentukan oleh bermacam ragam kelompok yang secara gigih mempertahankan kepentingan masing-masing dan menghalangi kegiatan kelompok lain yang dianggap membahayakan kepentingan mereka. Mereka semua (baca: kelompok-kelompok) keseluruhannya memainkan peran yang hampir sama, yaitu menjaga kepentingan politik masing-masing.

Jika kedua teori yang telah dibahas diatas banyak berbicara tentang aspek subyektif dan pelaku, maka teori yang ini yaitu teori kekuasaan lebih menitikberatkan pada aspek obyektif kekuasaan itu sendiri. Ada banyak teori tentang kekuasaan. George Catlin misalnya, mengembangkan sebuah teori sistematis atau kerangka konseptual bagi ilmu politik, di mana kekuasaan ditempatkan sebagai pusat teori. Dengan menggunakan definisi Max Weber tentang politik sebagai perebutan kekuasaan atau usaha saling mempengaruhi dari para pemegang kekuasaan, Catlin berkesimpulan bahwa politik adalah studi tentang pemerintahan, jika pemerintahan berarti pengawasan. Bidang politik, baginya, adalah kontrol-kontrol sosial atau lebih khusus lagi tentang hubungan kontrol sosial.

Berbeda dengan Catlin, yang tidak secara eksplisit mengungkapkan, Lasswell dan Kaplan secara tegas menyatakan

---

<sup>19</sup> David Riesman. *The Lonely Crowd*. (New York, Doubleday Anchor, 1953)



bahwa hal yang paling fundamen dari seluruh proses politik adalah pembentukan, pembagian dan penggunaan kekuasaan. Konsep kekuasaan baginya adalah partisipasi dalam membuat keputusan dimana proses tersebut merupakan sebuah proses interpersonal. Sekalipun seseorang atau kelompok tidak berada dalam struktur politik tertentu, tidak menjadi kelompok elit, tetap bisa memainkan peran-peran politik ketika dengan sangat signifikan mampu mempengaruhi berbagai keputusan yang diambil oleh sebuah struktur politik tertentu.<sup>20</sup> Hal inilah yang sedang terjadi di Indonesia, dimana para politikus memainkan peran orang-orang yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat untuk menjalankan politiknya. Sebut saja kiai, seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam masyarakat di Indonesia.

Salah satu kelompok elit di Indonesia yang turut memainkan peran politik adalah kiai. Seperti yang kita ketahui, kiai pada umumnya adalah seorang manusia yang mempunyai kemampuan ilmu agama Islam yang mumpuni sekaligus mempunyai akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Kiai juga merupakan indikator keberagaman masyarakat. Peran kiai ternyata tidak berhenti dalam urusan agama saja, kiai juga tempat berkeluh kesah dalam berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Termasuk didalamnya adalah urusan politik, sudah

---

<sup>20</sup> *I b i d.* hal. 245-50.

menjadi kebiasaan bahwa masyarakat akan mengikuti atau mengekor pergerakan politik seorang kiai.<sup>21</sup>

Dilihat dari penggunaan kata *kiai* pada mulanya, kata ini tidak hanya menunjuk kepada sebuah golongan masyarakat tertentu. Ia sebenarnya digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang dihormati, bisa berupa benda, hewan dan orang. Dalam bahasa Jawa, kata "*kiai*" sebenarnya diberikan kepada tiga jenis gelar yang berbeda<sup>22</sup>:

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat seperti senjata, kereta bahkan hewan sekalipun. Nama-nama kiai dalam jenis ini misalnya Kiai Garuda Kencana, Kiai Guntur Madu, Kiai Slamet dan sebagainya;
2. Gelar kehormatan untuk orang tua pada umumnya;
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang yang ahli dalam agama Islam atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santri

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kiai adalah pada pengertian ketiga. Namun demikian pengertian ini kemudian diperluas menjadi seorang yang mumpuni dalam ilmu agama Islam, sekalipun tidak memimpin pesantren, yang karena

---

<sup>21</sup> Hasanatul Jannah, "Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam *jurnal Fikrah*, V. 3, No. 1, 2015, hal. 158.

<sup>22</sup> Zamaksari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982), hal. 55.

pengetahuannya itu kemudian memberikan pengajaran dan pendidikan kepada masyarakat secara umum. Pengertian ini didasarkan pada adanya realitas bahwa konsep kiai tersebut telah bergeser di masyarakat, sehingga sering mereka mengidentifikasi seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam tetapi tidak mempunyai pesantren juga sebagai kiai. Dalam pengertian inilah kata kiai dipakai dalam penelitian ini.

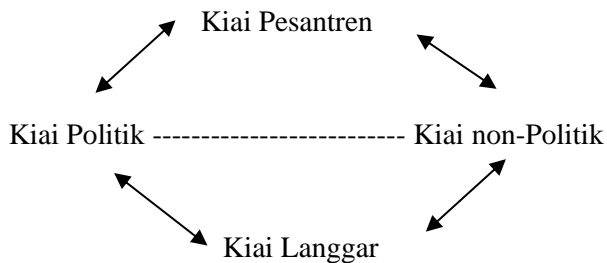
Akibat adanya pergeseran pengertian ini, maka kiai sebenarnya bisa diklasifikasi menjadi dua, yaitu:

1. Kiai pesantren yaitu kiai yang memberikan pengajaran di pesantren melalui khazanah kitab klasik yang biasanya disebut dengan kitab kuning.
2. Kiai non-pesantren adalah kiai yang memberikan pengajaran agama kepada masyarakat luas dan tidak terlibat dalam pesantren.

Dirdjosanjoto menyebut kedua jenis kiai ini sebagai kiai pesantren dan kiai langgar. Kiai pesantren mengajar santri yang menetap di suatu bangunan yang disebut pesantren. Sedangkan kiai langgar mengajar santri yang tinggal dirumah mereka masing-masing. Keduanya disebut kiai karena sama-sama menjadi guru bagi masyarakat, mereka juga dipercaya untuk menjaga generasi keturunan masyarakat agar menjadi generasi yang bermoral dan berakhlak.

Kategorisasi ini didasarkan pada segmen masyarakat yang dihadapi. Kategorisasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan standar dikotomi politik dan non politik. Dengan

demikian kedua jenis kiai yang disebutkan di awal bisa masuk sebagai kiai politik. Secara skematis bisa dibuat sebagai berikut:



Sesuai dengan Teori Elit, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian awal, bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang dikenal sebagai elit.<sup>23</sup> Dengan demikian, kiai bisa juga diidentifikasi sebagai salah satu dari kelompok elit, sesuai dengan skupnya masing-masing. Lebih-lebih dalam masyarakat yang menempatkan agama sebagai institusi yang sangat dihormati.

Hasil kajian para ilmuwan politik yang kemudian melahirkan teori elit di Amerika memang berbeda dengan kondisi di Indonesia. Mengapa mereka tidak memasukkan

---

<sup>23</sup> S.P. Varma. *Teori Politik*. hal. 200.

kalangan agamawan sebagai kelompok elit yang ikut berkiprah di dunia politik? Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh renaissance yang terjadi pada umat kristiani, sehingga berimplikasi pada bentuk Negara yang dianut oleh masyarakat Amerika, baik di Amerika maupun Eropa yang mayoritas penduduknya adalah umat kristiani yang jelas memisahkan antara agama dan negara (sekuler), sehingga peran agamawan atau gereja di kedua wilayah tersebut hanya terbatas pada tempat-tempat peribadatan.

Berbeda dengan itu, Indonesia adalah sebuah negara dimana pemuka agama atau agamawan (baca: kiai) mempunyai tempat tersendiri dalam struktur masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Dari sisi sejarah, tidak bisa dipungkiri kontribusi kiai saat memperjuangkan kemerdekaan sangatlah tinggi, dengan power yang dimiliki mereka dalam kontrol sosial, mereka mampu menggerakkan masyarakat maupun santri-santri untuk ikut turun berjuang demi kemerdekaan. Jadi, peran kiai sudah ada sejak pra kemerdekaan dan sama-sama bahu membahu untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak sosok kiai yang menjadi pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia, bahkan pada awal kemerdekaan banyak kiai yang menjadi pejabat penting negara. Peran kiai tersebut berimplikasi bahwa sosok kiai adalah sosok panutan yang dianggap berjasa bagi rakyat Indonesia. Lebih-lebih pada masyarakat tradisional dimana kepegangan terhadap kiai masih sangat dominan, sekalipun akhir-akhir ini mengalami berbagai pergeseran.

Menarik disimak apa yang diungkapkan oleh Kenneth Thompson <sup>24</sup> bahwa keberadaan kelompok elit sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dimilikinya. Ada elit local yang muncul karena kekuatan ekonomi yang dimiliki. Para pengusaha dan tuan tanah bisa diklasifikasikan ke dalam kelompok ini. Bahkan fakta dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar politikus di Indonesia adalah mereka yang mempunyai kekuatan ekonomi untuk membeli suara rakyat. Ini merupakan fenomena yang cukup mencengangkan, dimana tokoh-tokoh yang aslinya berkompeten dalam urusan politik tetapi tidak memiliki kekuatan ekonomi tersisih dengan sendirinya.

Kelompok lain dalam kaum elit adalah mereka yang memiliki sumber pada kekuasaan publik yang melekat pada dirinya. Dalam hal ini para pejabat birokrat adalah contoh yang paling konkret. Kelompok elit lain lagi adalah yang terbentuk karena adanya kharisma yang dimiliki. Kharisma ini dapat muncul karena kekuatan fisik maupun non fisik, termasuk legitimasi budaya masyarakat yang menempatkannya menjadi kelompok elit. Dalam hal ini para kiai adalah contoh yang paling ideal, artis juga bisa digolongkan dalam kelompok ini selain juga mungkin masuk dalam kelompok yang pertama juga.

Dengan menggunakan kerangka yang dibangun oleh Thompson itu, bisa ditemukan bahwa kiai tergolong pada jenis

---

<sup>24</sup> Koiruddin. *Politik Kiai Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis* (Malang: Averroes Press, 2005), hal. 24.

kaum elit yang terakhir yaitu kaum elit yang mendapatkannya karena adanya kharisma yang ada pada dirinya. Kharisma adalah sebuah model kewibawaan yang terpancar dari dalam yang tidak diakibatkan oleh adanya akibat-akibat formal. Kharisma sering didapatkan secara genetic dan tidak diusahakan. Biasanya, pengakuan dan posisi elit seseorang yang ditimbulkan oleh adanya kharisma lebih berpengaruh kuat dan dalam pada masyarakat dibanding karena adanya pengakuan formal. Kendatipun sekarang ini kiai juga mempunyai sumber yang berasal dari ekonomi maupun kekuasaan publik, akan tetapi akar kesejarahan menunjukkan bahwa sumber daya kharisma lebih menonjol ketimbang yang lain.

Keberadaan kaum elit ini mau tidak mau akan sangat berpengaruh dalam dinamika politik. Bagi pengembangan suasana demokrasi sendiri, keberadaan mereka bisa berdampak positif maupun negative, tergantung bagaimana penerapannya secara proporsional. Pengaruhnya yang kuat, menuntut pemanfaatan posisinya harus dilakukan dengan bijak. Salah menerapkan bisa-bisa justru akan menjadi kontraproduktif bagi upayanya. Adanya kenyataan tersebut, yaitu pengaruh kiai yang amat kuat dan dalam, akan mampu menggerakkan massa untuk melakukan perlawanan, bahkan yang paling ekstrem sekalipun. Fenomena inilah yang terjadi dewasa ini, dimana pengaruh tersebut digunakan untuk berpolitik, mendukung suatu partai atau menjatuhkan suatu partai tertentu dalam kontestasi politik Indonesia.

### **C. Kiai Politik: Memadukan Otoritas**

Jika dicermati secara seksama apa yang dilakukan oleh kiai, sesungguhnya merupakan sebuah ikhtiar untuk memesrakan tugas keagamaan dan politik. Di satu sisi merupakan upaya bagaimana spirit moral keagamaan bias berjalan secara lebih efektif efisien. Di sisi lain, merupakan upaya bagaimana memberikan pengawasan terhadap praktik kepolitikan agar tidak keluar dari etika dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal mendasar yang turut menggerakkan spirit yang demikian adalah keyakinannya bahwa antara agama dan politik adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah fondasinya, sedangkan politik adalah penjaganya.

Pemahaman demikian juga tidak bisa dilepaskan dari factor kesejarahan. Diskursus mengenai hubungan agama (Islam) dan politik dalam sejarah memang merupakan tema yang sampai sekarang masih tetap menarik. Hal ini terlihat dari betapa dalam praktik politik negara-negara berpenduduk muslim terjadi saling tarik menarik. Tarik menarik tersebut tidak hanya antara kelompok (baca: partai politik) yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara secara formal dan kelompok yang merasa cukup hanya dengan mengambil nilai yang terkandung di dalamnya tanpa bentuk formalnya, bahkan juga yang menginginkan negara betul-betul lepas dari Islam.<sup>25</sup> Model-model seperti Arab Saudi, Indonesia dan Turki

---

<sup>25</sup> Lebih lanjut baca: Munawir Syadzali. *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta.: UI Press, 1955), hal. 1-2.



merupakan representasi perbedaan yang telah dan akan terus berkembang di dunia muslim.

Berbagai rumusan hubungan Islam dan politik tersebut sesungguhnya merupakan hasil sistematisasi ajaran-ajaran Islam dan tradisi kaum muslim di bidang politik. Artinya, baik aspek normative maupun historis sama-sama memberikan kontribusi dalam membangun pola hubungan itu. Pola-pola itu muncul sejalan dengan kepesatan ekspansi Islam sehingga menimbulkan masalah-masalah baru, khususnya tentang cara pengaturan negara, disamping konsekuensi logis munculnya kelompok-kelompok kepentingan (*political interest*). Kelompok-kelompok ini, baik yang berbasis sosial budaya atau sosial keagamaan tertentu merasa ikut memberi kontribusi dalam proses pengembangan Islam. Data historis menunjukkan bahwa banyak sekali fenomena persaingan kelompok pemikiran keagamaan, agama maupun fiqh, dalam merebut pengaruh dan patronase dengan penguasa.<sup>26</sup>

Interaksi antara agama dan politik dalam sejarah Islam bisa dilacak sejak awal masa Nabi Muhammad. Pada kenyatannya, Nabi Muhammad berhasil mempraktekkan pemerintahan dan ketatanegaraan dengan membangun komunitas politik, baik periode Makkah maupun Madinah. Bahkan, ada bukti sejarah yang tidak bisa dibantah, dalam kaitannya dengan praktek ketatanegaraan Nabi Muhammad.

---

<sup>26</sup> A. Syafii Maarif. *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3ES, 1996), hal. 18.

Ketika beliau berhasil membuat komunitas politik di Madinah sebagai model ideal dari pola hubungan agama dan negara dalam Islam. Muhammad Arkoun menyebutnya sebagai "eksperimen Madinah"<sup>27</sup>

Pembentukan komunitas politik tersebut kemudian menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil. Seperti diketahui bahwa pada periode Makkah pengikut Nabi Muihammad masih relatif kecil dan belum menjadi komunitas politik yang mempunyai kekuatan dan tidak berdaulat (*powerless community*). Mereka merupakan golongan minoritas yang terpinggirkan dan tertindas. Perubahan besar yang dialami oleh Nabi Muhammad terjadi ketika memperoleh dukungan secara politik dan moral dari beberapa suku di Madinah yang menyatakan diri masuk Islam dan siap membela Nabi. Dukungan orang Madinah kepada Nabi Muhammad ini dituangkan dalam sebuah pernyataan kesetiaan pada Nabi yang dalam sejarah dikenal dengan baiat Aqabah.<sup>28</sup> Peristiwa ini terjadi dua kali yaitu tahun 621 M dan 622 M yang kemudian dikenal dengan istilah *Baiat Aqabah* I dan II. Sejak itulah

---

<sup>27</sup>Budhy Munawar-Rachman. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: PArmadina, 1995), hal. 589-590

<sup>28</sup>Nama 'Aqabah diambilkan dari nama tempat di mana peristiwa perjanjian/baiat itu terjadi. Baiat I diikuti oleh 13 orang, 12 laki-laki dan 1 perempuan yang bernama Afra binti Abid bin Tsa'labah. Oleh karena itu baiat Aqabah I ini sering disebut perjanjian wanita. Sedangkan baiat II diikuti oleh 73 orang Madinah.

masyarakat Islam menjadi masyarakat yang mempunyai kekuatan yang sangat diperhitungkan (*powerful society*).

Fazlur Rahman melihat bahwa fakta politik seperti itu lebih banyak didorong oleh prestise moral dan kecakapan politik Nabi Muhammad yang menawan hati orang-orang Madinah. Kondisi mereka yang selalu diliputi oleh cengkeraman dendam permusuhan yang telah lama terjadi, menyebabkan adanya kerinduan untuk mendapatkan sosok pemimpin yang mampu membebaskan dari permusuhan dan kemudian mempersatukan mereka.<sup>29</sup>

Dukungan politik yang diberikan masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad tidak disia-siakan begitu saja. Beliau sendiri berusaha untuk tampil di tengah masyarakat Madinah dengan mengambil peran penting dalam rangka mempersatukan mereka yang terlibat konflik. Sebagai seorang penengah, melalui Piagam Madinah,<sup>30</sup> Nabi Muhammad mampu membuktikannya dengan menyelesaikan semua konflik secara arif dan semuanya mendapatkan kepuasan. Deklarasi ini

---

<sup>29</sup> Fazlur Rahman. *I s l a m* (Bandung: Pustaka, 1984) , hal. 13.

<sup>30</sup> Secara garis besar, menurut Munawir Sadzali, isi pokok dari Piagam Madinah adalah Pertama, semua komuniats Islam meskipun terdiri dari banyak suku, tapi mertupakan satu kesatuan komunitas. Kedua, hubungan antar-komuniatas Islam dan komunitas lainnya berdasarkan pada prinsip bertetangga secara baik, saling membantu dalam menghadapi musuh, membela yang teraniaya dan menghormati kebebasan beragama. Lihat: Munawir Sadzali. *Tata Negara*. . hal. 16.

merupakan sebuah komitmen untuk hidup saling berdampingan (*coexistence*) antara satu dengan yang lainnya.

Dokumen Piagam Madinah ini secara politik merupakan sebuah prestasi yang cemerlang. Bukan saja ia menjadi konstitusi tertulis pertama di dunia tetapi juga, yang lebih penting adalah, keberhasilannya untuk semakin membuat pengakuan atas kekuasaan Nabi Muhammad sehingga semua komponen politik menjadi tunduk dan patuh kepadanya. Dokumen ini merupakan dasar bagi komunitas politik Madinah dengan segala perbedaan yang ada dengan menghormati kebebasan yang ada untuk melaksanakan agama masing-masing. Dengan demikian, Nabi Muhammad berhasil menyatukan kapasitasnya sebagai pimpinan spiritual dan sebagai seorang pemimpin politik. Karena adanya kombinasi otoritas keagamaan dan politik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, menjadikan kepemimpinannya menjadi sangat efisien dan efektif.

Begitu Nabi Muhammad wafat, persoalan politik menjadi runyam, karena belum ada presiden historis, maka umat Islam pada waktu itu kembali bersikukuh dengan pendapat-pendapatnya sendiri. Bahkan mulai muncul pandangan-pandangan tentang agama yang digunakan untuk melegitimasi pandangan-pandangan politiknya itu. Dengan kata lain, sebenarnya diskursus agama awalnya banyak dipicu oleh persoalan-persoalan politik. Sangat wajar jika Harun Nasution merasa agak aneh jika dalam Islam, sebagai agama, justru persoalan yang pertama kali muncul adalah persoalan politik,

bukan persoalan agama.<sup>31</sup> Namun itulah kenyataannya. Secara historis ada hubungan yang signifikan antara persoalan-persoalan politik yang berkembang dan konsep-konsep agama yang disusun pada waktu itu. Bukan saja persoalan-persoalan politik tersebut turut memberikan kontribusi dalam pemformulasian konsep agama tetapi lebih jauh dari itu banyak juga konsep agama yang dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi bagi atau menyerang kepada kekuasaan politik yang sedang berjalan. Hubungan ini terlihat pada faktor-faktor yang turut mempengaruhi bagi muncul dan berkembangnya pemikiran agama. Sebagaimana ditengarai oleh Nourouzzaman Shiddiqi<sup>32</sup> bahwa ada dua sebab utama yang melahirkan pemikiran agama. *Pertama*, sebab internal yang berupa konflik politik. *Kedua*, sebab eksternal yaitu adanya berbagai gempuran dari banyak pihak tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sistem keyakinan.

Konflik politik sebetulnya telah terjadi sejak awal sekali. Seperti diketahui bahwa pasca wafat Nabi Muhammad, muncul perdebatan sangat serius, siapakah yang menjadi pemimpin pengganti begitu Nabi wafat?<sup>33</sup> Semasa hidup, Nabi

---

<sup>31</sup> Harun Nasution. *Agama Islam Aliran-aliran, Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 1

<sup>32</sup>Nourouzzaman Shiddiqi. *Jeram-jeram Peradaban Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 114-115

<sup>33</sup> Mengenai masalah mengapa para sahabat lebih memprioritaskan suksesi kepemimpinan ketimbang pemakaman jenazah Nabi, menarik disimak penjelasan dalam MA Shaban *Islamic History, A.D (600-750)* terj. Machnun Husein (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), hal. 23-24. Baca juga Affan Gaffar. "Islam dan Demokrasi:

tidak pernah menunjuk siapa penggantinya, kecuali meminta Abu Bakar menjadi imam shalat ketika kesehatan Nabi terganggu. Demikian pula tidak ditemui ayat al-Qur`an atau teks hadits yang menjelaskan kualifikasi personal secara detil dan mekanisme memilih seorang pemimpin.

Dalam situasi seperti ini, secara spontan muncul ide untuk mengadakan muktamar politik di Saqifah Bani Saidah. Keberadaan muktamar ini menjadi penting mengingat masyarakat yang semula terpecah-pecah berdasarkan fanatisme klan dan telah bisa disatukan sehingga biasa hidup aman dan teratur di bawah seorang pemimpin, tiba-tiba kehilangan pemimpin. Dalam pertemuan tersebut muncul usulan-usulan nama untuk menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin. Masing-masing bersikukuh pada pendiriannya, sehingga akhirnya muncullah pernyataan *minna amir wa minkum amir*, satu pernyataan yang sangat membahayakan bagi proses integrasi yang selama ini dibangun dan diperjuangkan. Walaupun demikian, melalui proses perdebatan panjang dan melelahkan, pada akhirnya mereka bisa sepakat untuk memilih Abu Bakar sebagai pemimpin pengganti Nabi.

Dalam kasus ini memang belum memuncak menjadi sebuah wacana agama yang serius, tetapi setidaknya telah ada indikasi yang mengarah ke sana dengan munculnya berbagai perbedaan pendapat. Perbedaan ini semakin mendapat

---

Pengalaman Empiric yang Terbatas'' dalam 70 tahun Munawir Syadzali, *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. ( Jakarta : Paramadina, 1995), hal. 354-355,

bentuknya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Semula muatan agamanya tidak begitu kental, untuk tidak mengatakan semata-mata persoalan politik, mulai mendapat muatan agama yang semakin jelas. Apakah pembunuh Utsman telah menjadi kafir ataukah masih dalam keadaan mukmin? Ditambah lagi dengan peristiwa *tahkim* antara Ali dan Muawiyah yang memunculkan persoalan hakekat keimanan. Keadaan demikian terus berkembang sehingga akhirnya melahirkan paham-paham politik sekaligus paham agama karena masing-masing kelompok memerlukan dukungan agama untuk melegitimasi sikap-sikap politik mereka. Kedua paham pada domain yang berbeda ini pada kenyataannya sulit dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Paham politik yang ada pada waktu itu belum tersistematisasikan dalam kerangka pemikiran politik, melainkan menyatu dalam pemikiran agama. Itulah sebabnya, dalam penilaian Abdul Azis Thaba,<sup>34</sup> pemikiran politik masa klasik dan pertengahan bercorak agama. Artinya, pemikiran politik yang dibangun tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari bangunan konsep-konsep agama yang lebih dahulu dirumuskan.

Realitas sejarah ini menunjukkan bahwa dalam Islam antara agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan. Hanya saja bagaimana bentuk hubungan itu memang menjadi perdebatan. Setidaknya ada tiga paradigma yang berkembang

---

<sup>34</sup>Abdul Azis Thaba. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 111

mengenai hubungan Islam dan politik. *Pertama*, Islam adalah agama yang menyeluruh sehingga politik adalah bagian integral daripadanya. Islam menyajikan suatu tatanan politik yang khas Islam yang diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), bukan adopsi dari pihak lain. Para pemikir muslim yang masuk dalam kelompok ini adalah Abul Ala al-Maududi, Hasan al-Banna. *Kedua*, Islam, sebagaimana agama-agama pada umumnya, sebatas mengatur hubungan vertikal-personal-privat dengan Tuhan. Berdasarkan ini, maka persoalan politik adalah persoalan sekuler, bukan wilayah agama. Ali Abdur Raziq dan Thaha Husein merupakan dua diantara pemikir muslim yang berpandangan demikian. *Ketiga*, Islam memang tidak menyajikan seperangkat sistem tersendiri mengenai negara, akan tetapi ia menyajikan seperangkat nilai yang bisa diterapkan dalam berbagai sistem kenegaraan. Husein Haikal adalah salah satu diantara sekian banyak pemikir muslim yang berkeyakinan seperti ini.

Dalam kaitan dengan ini, apa yang dilakukan oleh para kiai dengan keterlibatannya dalam politik adalah sebuah upaya dalam rangka ikut berkontribusi dalam memadukan otoritas agama dan politik sebagai manifestasi hubungan antara keduanya. Mereka berharap bisa melakukan pengawasan moral terhadap kepolitikan yang sedang berjalan, sekaligus membuat kerja-kerjakeagamaannya bisa lebih efisien dan efektif.

Dengan demikian kiai mengemban tanggung jawab kekuatan kultural untuk selalu mengingatkan para pemimpin dan masyarakat, sekaligus menegaskan perannya untuk secara



etis profetik mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi seperti ini, maka peran para kiai akan tetap membumi di masyarakat. Moralitas kiai tidak hanya menjadi bahasa langit beaka, tetapi bisa menjadi bahasa dan perjuangan politik yang membumi demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat.

**BAB III**  
**EKSISTENSI KIAI**  
**DALAM DINAMIKA POLITIK**  
**DI JAWA TENGAH**

A. Gambarann Umum Jawa Tengah

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Jawa Tengah memiliki batas-batas: Utara – Laut Jawa; Selatan – Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia; Barat – Provinsi Jawa Barat; Timur – Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Secara astronomis, Jawa Tengah terletak antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa).<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Lihat Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018, hal. 3-4.

Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2017 berkisar antara 26,8°C sampai dengan 28,9°C. Tempat – tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relative tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 69,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Oktober yaitu sebesar 484,00 mm dan curah hujan terendah tercatat pada bulan Agustus sebesar 15 mm. Hari Hujan terendah tercatat pada bulan Agustus yaitu sebanyak 1 hari hujan dan tertinggi pada bulan Oktober sebanyak 23 hari hujan.<sup>36</sup>

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 34.257.865 jiwa yang terdiri atas 16.988.093 jiwa penduduk laki-laki dan 17.269.772 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017, penduduk Jawa Tengah tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,71 persen. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2017 mencapai 1.053 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar

---

<sup>36</sup>Ibid., hal. 4.

11.722 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 479 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>37</sup>

**Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Admistrasi pemerintahan secara keseluruhan wilayah terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa atau kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).**<sup>38</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertugas membantu penyusunan

---

<sup>37</sup>Ibid., hal. 51.

<sup>38</sup>Ibid., hal. 29.

kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang menjadi urusan daerah. SKPD ini terdiri dari berbagai badan, dinas, satuan, lembaga, unit, dan rumah sakit-rumah sakit.

## 2. Kehidupan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan terdiri dari tiga kata yaitu kehidupan, sosial dan keagamaan. Secara etimologi kata kehidupan atau perilaku yaitu reaksi seseorang yang muncul dalam gerak atau sikap baik itu gerak fisik ataupun ucapan. Kata kehidupan dalam penelitian ini mempunyai arti tindakan, cara berbuat dari seseorang yang kesehariannya tidak lepas dari aktifitas. Kata kehidupan seringkali diucapkan untuk menilai tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan istilah tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia di mana akan menghasilkan penilaian pada setiap tingkah laku manusia sebagai akibat dari perbuatannya. Kata sosial memiliki arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses sosial. Sidi Gazalba mendefinisikan kata sosial dengan kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat

mengorganisasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang membentuk kebudayaan.<sup>39</sup>

Sedangkan kata keagamaan itu sendiri berasal dari kata “gama” dan mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Allah, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan. Pengertian agama bila ditinjau dari akar kata maknanya “agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang artinya “tidak” dan kata “gama” yang berarti “kacau”. Agama berarti sebagai suatu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia. Kata keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang di dasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakininya agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud kehidupan sosial keagamaan adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Kehidupan sosial keagamaan yang toleran dan harmonis telah lama berlangsung sekian lama pada masyarakat Jawa Tengah. Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, seperti masjid, gereja

---

<sup>39</sup>Lihat Fikria Najtama, “Religiusitas dan Kehidupan Sosial Keagamaan”, dalam *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No.2, September 2017, hal. 412-422.

<sup>40</sup>Ibid., hal.422-423.

Kristen, dan Gereja Katolik. Banyaknya tempat peribadatan di Jawa Tengah pada tahun 2017, terdiri atas 47.408 Masjid, 2.493 Mushola, 2.714 Gereja Kristen, 661 Katholik, 163 Pura, 488 Vihara dan 33 Klentheng.<sup>41</sup> Dengan persentase penduduk dan agama yang dianut sebagai berikut: 96.82% Muslim, 1.64% Kristen Katolik, 1.19% Kristen Protestan, 0.17% Hindu, 0.17% Budha, dan 0.01% Konghucu.<sup>42</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Jawa Tengah mayoritas beragama Islam yang terdiri dari santri, abangan dan priyayi. Bagi masyarakat santri dapat dilihat dari berbagai lembaga penunjangnya, seperti lembaga-lembaga pendidikan agama Islam mulai dari TPQ, Madin, MI, MTs dan MA hingga Perguruan Tinggi Islam. Selain itu masih didukung oleh ribuan pondok pesantren dan majlis-majlis taklim dan kelompok-kelompok pengajian lain yang intensif. Secara rinci, di Jawa Tengah berdasarkan data statistic tahun 2015, terdapat 5.850 pondok pesantren, 49.832 kiai, dan 507.853 santri. Sementara itu masih ditambah jumlah jamaah haji tahun 2017 sebanyak 31.957 orang, yang terdiri dari 14.756 laki-laki dan 17.201 perempuan.<sup>43</sup>

### 3. Kehidupan Sosial Politik

---

<sup>41</sup>Ibid., hal. 82.

<sup>42</sup> Lihat Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*, hal. 125 -126.

<sup>43</sup> Ibid. hal. 130.

Pada hakekatnya konsep dan pengertian sistem sosial lebih menekankan pada hubungan-hubungan yang berlangsung antar manusia dan manusia, manusia dan masyarakat, masyarakat dan masyarakat, yang hampir selalu atau bahkan selalu dalam kerangka suatu satuan atau organisasi, sebagai satuan bersistem yang senantiasa berinteraksi, yakni interaksi sosial – sehingga dapat disebutkan bahwa setiap (satuan) masyarakat adalah bersistem, yang kemudian dikenal dengan sistem sosial, yaitu satuan masyarakat yang bersistem.

Sistem sosial dapat dipahami sebagai suatu sistem atau pemolaan dari hubungan-hubungan sosial yang terdapat dan berkembang dalam masyarakat tertentu, sebagai wahana fungsional dalam masyarakat tersebut. Suatu masyarakat, di mana dan kapan pun ia berada, merupakan suatu sistem sosial, yang di dalamnya dapat mengandung subsistem sosial dan dalam pola sistematis yang sangat beragam. Sebagai satuan masyarakat, sistem sosial merupakan sistem yang menjadi wadah bagi totalitas hubungan antara seorang manusia dan manusia lainnya, manusia dan kelompoknya atau kelompok lain, kelompok manusia dan kelompok manusia lainnya, untuk memenuhi hajat, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya, sesuai fungsi masing-masing.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>Lihat Nurdin H. Kistanto, “Sistem Sosial-Budaya di Indonesia”, makalah, t.t. hal. 1.



Mulai dari kelompok sosial yang terkecil, yaitu: keluarga kecil, sedang, besar, kelompok Dasa Wisma (Dawis), Arisan, kelompok anak-anak, remaja, pemuda, PKK, RT, RW, Desa, Kelurahan, kelompok tingkat kecamatan, kabupaten atau kota sampai pada kelompok tingkat propinsi. Selain itu masih terdapat komunitas tertentu, organisasi masa (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan partai politik yang tersebar dari tingkat Jawa Tengah sampai tingkat desa atau kelurahan. Sesungguhnya manusia dan kelompok-kelompok manusia tersebut masing-masing secara relatif memiliki batas dan ikatan kewilayahan dan mengembangkan (unsur-unsur) sosial-politik dan budaya, termasuk lembaga-lembaganya seperti organisasi-organisasi sosial-politik, partai-partai politik beserta peraturan-peraturannya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dinamika partai politik di Jawa Tengah akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

#### 4. Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat dan kebudayaan, yang dapat disebut kehidupan sosial-budaya, merupakan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan kategori-kategori yang dalam ilmu-ilmu sosial dan budaya seperti sosiolog, antropologi sosial dan antropologi budaya, ilmu politik dan pemerintahan, filsafat, psikologi, sejarah, ilmu susastra dan ilmu bahasa, sering dibahas. Dalam pembahasan, sistem sosial seringkali dipisahkan dari sistem budaya, padahal kedua pengertian tersebut tak dapat dengan tegas

dipisah-pisahkan. Dalam kehidupan masyarakat, gejala-gejala sosial dan gejala-gejala budaya hampir selalu, atau bahkan selalu, saling berhubungan dan berpengaruh, sehingga gejala-gejala dan kebiasaan-kebiasaan sosial tidak bisa dipisahkan dari gejala-gejala dan kebiasaan-kebiasaan budaya, demikian pun sebaliknya. Bahkan, seringkali tidak mudah orang melihat suatu gejala itu gejala sosial atau budaya, sistem-sistem sosial tidak bisa dipisahkan secara tegas dari sistem-sistem budaya, sehingga persoalan konseptual mengenai sistem sosial dan sistem budaya lebih memadai apabila dilakukan dalam satuan pembahasan sehingga lebih dikenal sebagai sistem sosial-budaya<sup>45</sup>..

Unsur-unsur kebudayaan yang tampak, nyata dan kelihatan dapat berwujud materi atau benda yang dapat disentuh dan dirasakan oleh panca-indra manusia, sesungguhnya merupakan hasil dan perwujudan dari unsur-unsur kebudayaan manusia yang tak dapat disentuh dan tak dapat dirasakan oleh panca-indra manusia. Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan seperti bangunan, mesin, peralatan, pakaian dan hasil teknologi lainnya, seperti komputer, sedangkan unsur-unsur kebudayaan manusia yang tak-tampak seperti pemikiran, gagasan, *angan-angan*, citraan, yang berada di wilayah batin, mental-spiritual dan pengolahan pemikiran, dan akal-budi manusia, yang berdampingan dengan nilai-nilai, norma-

---

<sup>45</sup> Ibid., hal. 3.

norma, dan etika, yang diwariskan dan dikembangkan oleh manusia melalui peran pendidikan, pengajaran, pembelajaran, pembiasaan, yang berkelanjutan dan saling berhubungan, berinteraksi, tarik-menarik, dengan latar-belakang dan lingkungan kehidupannya.<sup>46</sup>

Pembahasan tentang manusia dalam masyarakat dan sistem sosial tak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kebudayaannya, beserta unsur-unsur kebudayaan, baik unsur-unsur yang tampak, nyata, kelihatan atau berwujud maupun unsur-unsur yang tak-tampak, tak-nyata, tak-kelihatan atau tak-berujud. Sistem budaya merupakan sistem atau satuan yang merupakan hasil satuan kompleksitas yang dicipta-kan dan diselenggarakan oleh manusia dalam masyarakat, dalam memenuhi dan mengembang-kan hajat hidupnya dan lingkungannya, yang bersifat kebendaan dan bukankebendaan, yang dilakukan manusia melalui pewarisan, pendidikan, pengajaran, dan pembiasaan, yang berkelanjutan.

Masyarakat manusia memiliki warisan-warisan genetik yang berbeda dari jenis makhluk lainnya. Warisan-warisan genetik manusia memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan warisan-warisan budaya yang sangat beragam, yang sejak semula meliputi dimensi-dimensi sosial dan budaya, yang kemudian membangun sistem sosial-budaya, bagi kelangsungan dan

---

<sup>46</sup> Ibid., hal. 8.

pengembangan kehidupannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa, sistem sosial-budaya merupakan sistem paduan dari sistem sosial dan sistem budaya sehingga menjadi suatu sistem kemasyarakatan yang meliputi hubungan-hubungan sosial yang dengannya manusia dalam masyarakat menghasilkan unsur-unsur budaya, untuk memenuhi hajat-hajat sosial dan budaya suatu masyarakat dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan sosial-budayanya.<sup>47</sup>

Dalam hal ini terdapat berbagai macam adat, tradisi dan kesenian Jawa Tengah, dialek dan bahasa Jawa Tengah, mulai dari bahasa ngoko, kromo dan kromo inggil, termasuk di dalamnya terdapat bahasa dan budaya Keraton Surakarta. Ada juga aneka budaya di wilayah Pantai Utara, Selatan dan Pertengahan dalam gunung dan pegunungan, serta budaya Banyumasan. Demikian juga terdapat aneka kuliner dengan berbagai rasa dan pusat oleh-oleh jajan dan kuliner dari daerah masing-masing dan kerajinan tangan dan industri rumah tangga, serta industri modernt dalam masyarakat Jawa Tengah.

Di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, persentase penduduk yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/MI) sebesar 99,62 persen, kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/MTs) sebesar 95,48 persen, kelompok umur 16-18 tahun

---

<sup>47</sup> Ibid.

(kelompok usia SMA/MA) sebesar 68,48 persen, dan kelompok umur 19-24 tahun (kelompok usia PT) sebesar 22,13 persen. Sehingga secara keseluruhan pada kelompok umur 7-24 tahun persentase penduduk yang masih sekolah sebesar 69,28 persen. Data menunjukkan, bahwa masih terdapat penduduk yang tidak/belum pernah bersekolah pada kelompok usia jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs). Sebanyak 0,38 persen penduduk usia 7-12 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah dan 0,42 persen pada kelompok usia 13-15 tahun yang tidak/belum pernah bersekolah.<sup>48</sup>

## B. DINAMIKA POLITIK DI JAWA TENGAH

Indonesia sebagai negara demokrasi, secara periodik telah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat diikuti partai-partai politik yang memenuhi syarat administrasi sebagai organisasi berbadan hukum dan diverifikasi sebagai peserta untuk meraih sejumlah kursi di DPR, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain itu yang bersifat perorangan disediakan sebanyak empat kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Tuntutan demokratisasi yang menggebu di awal era reformasi telah dibuktikan melalui pemilu 1999 yang mampu merubah peta kekuatan politik dan itu terus bergerak dinamis di

---

<sup>48</sup>Lihat Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018., hal. 81-82.

tahun 2004, tahun 2009 , pemilu 2014 dan tahun 2019 termasuk di Jawa Tengah. Kondisi lima periode itu menarik untuk diamati dan dideskripsikan secara umum. *Pertama*, bahwa pemilu yang demokratis tidak selalu diikuti dengan pelembagaan nilai-nilai politik. Kasus korupsi yang sampai kini muncul silih berganti dengan aktor utama anggota DPR/DPRD menjadi bukti nyata betapa kepemimpinan, keteladanan, dan integritas moral belum sepenuhnya memandu perilaku politisi. *Kedua*, Kebijakan desentralisasi politik termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Peristiwa ini marak ketika berlaku Undang-Undang No22 Tahun 1999 dan fenomena tersebutlah yang antara lain mendorong perubahan dari pilkada berbasis wakil rakyat menjadi pilkada langsung berbasis rakyat.

*Ketiga*, tersedianya koran halaman lokal yang marak sejak era reformasi menjadi ajang pencerahan politik karena berfungsi sebagai penyampai berita, sumber informasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah namun suhu politik lokal juga mudah menghangat bahkan memanaskan karena ketika ada kasus hukum yang membelit politisi lokal cepat menyebar dan mudah diakses publik. *Keempat*, di tingkat nasional dalam lima kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan tahun 2019 terjadi perubahan peta kekuatan politik yang menggambarkan fragmentasi tajam yang tidak mengarah pada pengurangan jumlah partai politik kecuali pemilu 2014 dan 2019. Pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti 46 partai politik, tahun 2014 diikuti 10 partai politik, dan tahun 2019 diikuti oleh

16 partai politik. Tahun 1999 PDI-P menang dalam pemilu Legislatif dengan perolehan 35.689.073 suara atau 33,74% (153 kursi DPR) namun tidak mampu mengantarkan Megawati menjadi presiden.

*Kelima*, Pemilu 2009 merupakan babak baru dalam meningkatkan kualitas pemilu ditandai dengan kebijakan strategis merubah sistem daftar partai sebagian terbuka ke sistem daftar partai terbuka penuh. Kebijakan yang digulirkan akhir tahun 2008 dan berlaku pada pemilu 2009 sempat menimbulkan keresahan calon legislatif di pusat dan daerah karena nomor urut tinggi menjadi tidak bermakna bila tidak mampu memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi. Bagi sebagian lainnya merupakan berkah karena untuk mendapatkan kursi seorang calon tidak lagi terpancang pada nomor urut daftar calon namun pada perolehan jumlah suara. Selain itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen 2,5% suara untuk memenangkan kursi di parlemen. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan pertumbuhan yang subur dari jumlah partai politik. Sedangkan pemilu tahun 2019 dari 16 partai yang memenuhi ambang batas 4% hanya 9 partai dan yang tidak lolos ada 7 partai lama dan partai baru.<sup>49</sup>

Setiap partai politik mempunyai struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah, bahkan di Kabupaten/Kota masih ada struktur di bawahnya yaitu di kecamatan, desa/kelurahan.

---

<sup>49</sup>Disarikan dari Turtiantoro, "Pergeseran Kekuatan Politik di DPRD Propinsi Jawa Tengah", dalam *Jurnal Politika*, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015, hal. 112-114.

Politik sebagai konsep, dapat ditelusuri dari limapandangan. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>50</sup>

Dinamika Politik di Indonesia secara umum dapat dikatakan berhasil karena telah melewati masa transisi dari masa orde baru ke era reformasi, yang dipenuhi dinamika politik sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Hal demikian agak terganggu ketika sebagian tokoh dari partai poliitik, birokrasi, dan lembaga pemerintahan yang lain, baik dalam lingkungan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, mulai dari pusat hingga daerah-daerah propinsi dan kabupaten-kabupaten atau kota-kota di Indonesia terjerat kasus korupsi. Data akhir tahun 2014 mengungkap bahwa ada 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi.<sup>51</sup> Tentu saja data hingga tahun 2019 semakin

---

<sup>50</sup>Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992), hal. 1-2.

<sup>51</sup> Kompas, 24 Desember 2014



bertambah yang terkena operasi Tertangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Koperasi (KPK), baik yang di daerah maupun pusat.

Selain itu, ada berbagai konflik kepentingan antar elit partai politik di pusat dan daerah Jawa tengah cukup keras dan tajam namun tetap berada koridor normatif, bahkan partisipasi politik semakin naik dan berkembang dari tahun ke tahun. Pelaksanaan pemilihan umum juga relatif tertib, aman dan damai. Demikian pula dinamika politik di Jawa Tengah, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati, serta pemilihan wali kota dan wakil wali kota mampu menjaga nilai-nilai dan etika sosial serta mulai terbiasa dengan diskusi, dialog dan debat di televisi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terhadap kebijakan atau dalam bentuk tuntutan atau demonstrasi.

#### 1. Dinamika Politik Pemilihan Legislatif

Dinamika politik di Jawa Tengah selama diadakan pemilu di era reformasi berjalan relatif damai dan lancar, walaupun ada kerusuhan-kerusuhan kecil, sejak pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, 2014, dan 2019, PDI Perjuangan selalu memperoleh kemenangan, namun fenomena umum yang terjadi adalah adanya pergeseran jumlah perolehan suara yang berujung pada perubahan perolehan kursi di DPRD termasuk kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu 2014 dan 2019 yang mengalami kenaikan dibanding pemilu-pemilu sebelumnya.

Walaupun sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu tahun 2019 PDI Perjuangan mengalami dinamika, namun Jawa Tengah mampu dipertahankan sebagai lumbung perolehan suara dan menjadi andalan kontribusi suara pada tingkat nasional, sebagai provinsi dengan perolehan suara terbanyak, dan menang di sebagian besar kabupaten atau kota yang ada. Kondisi ini menjadikan PDI-Perjuangan Jawa Tengah dari perpektif nasional mendapatkan tempat istimewa karena dibalik dinamika dan pasang surut perolehan suara sejak pemilu tahun 1999 s/d 2019, selama 20 tahun dalam pemilu legislatif PDI Perjuangan secara umum tetap mampu mempertahankan posisi sebagai pemegang suara dan kursi terbanyak, baik kursi DPRRI maupun DPRD Jawa Tengah secara fluktuatif. Untuk mengetahui dinamika politk di Jawa Tengah, dapatlah dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel1: Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah dalam  
4 tahun terakhir

No	Nama Parpol	2004	2009	2014	2019
1.	PDIP	31	23	31	42
2.	Partai Golkar	17	11	10	11
3.	PKB	15	9	13	20
4.	PAN	10	10	8	6
5.	PPP	10	7	8	9
6.	Partai Demokrat	10	16	9	5
7.	PKS	7	10	10	10
8.	Partai Gerindra	-	9	11	3
9.	Partai Hanura	-	4	0	0
10.	PKNU	-	1	0	0
11.	Partai Nasdem	-	-	-	3
12.	Total	100	100	100	120

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa PDI Perjuangan telah menjadi pemenang pertama dari pemilu tahun ke tahun, pada posisi pemilu tahun 2004 meraih 31

kursi, tahun 2009 meraih 23 kursi, pada pemilu 2014 dan 2009 merupakan prestasi sendiri karena jumlah kursi naik secara signifikan. Namun sebelumnya, data tahun 2004 dan 2009 ditandai dengan fenomena melejitnya Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudoyono, walaupun demikian PDI Perjuangan tetap menang dan unggul untuk perolehan kursi DPRD di Jawa Tengah. Setelah itu, naik lagi pada perolehan tahun 2014 dengan perolehan 31 kursi dan tahun 2019 naik lagi secara signifikan, yaitu memperoleh 42 kursi.

Selanjutnya yang menempati posisi kedua di Jawa Tengah adalah Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara bergantian posisi dalam lima tahun terakhir. Dinamika kedua partai politik tersebut dapat dijelaskan dari tahun ke tahun sebagai berikut: *pertama*, Partai Golkar sebagai pemain lama mengalami pasang surut perolehan kursi DPRD di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dua periode pada tahun 2004 (17 kursi) dan tahun 2009 (11 kursi) yang dibayangi oleh PKB, tahun 2004 (15 kursi) dan tahun 2009 (9 kursi). *Kedua*, PKB sebagai pemenang kedua dan naik secara signifikan, serta menyalip partai Golkar dalam perolehan kursi DPRD pada tahun 2014 (13 kursi) dan pada tahun 2019 (20 kursi).

Sementara itu, dinamika politik pada partai-partai Islam, seperti PKS, PAN, dan PPP mengalami pasang surut dalam perolehan kursi DPRD Jawa Tengah sebagai berikut: *pertama*, perolehan kursi PKS mengalami stagnan dan

kestabilan, yaitu tahun 2004 peroleh 7 kursi, namun tiga periode berikutnya masing-masing 10 kursi (tahun 2009, 2014, dan 2019). *Kedua*, PAN dan PPP mengalami penurunan yang signifikan, yaitu: PAN mendapatkan 10 kursi (tahun 2004 dan 2009), dan berkurang menjadi 8 kursi pada tahun 2014 dan menurun lagi menjadi 6 kursi pada tahun 2019. *Kedua*, PPP juga mengalami penurunan dan kenaikan, yaitu: peroleh 10 kursi pada tahun 2004, 7 kursi pada tahun 2009, 8 kursi pada tahun 2014, dan naik sedikit 9 kursi tahun 2019.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa perkembangan terkini menunjukkan penurunan dukungan masyarakat terhadap partai-partai Islam, karena partai-partai Islam mempunyai posisi yang sulit dalam pemilu 2014 dan 2019. Hal demikian dikarenakan faktor demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam, dan faktor internal dan eksternal partai itu sendiri. Secara realitas, memang demokrasi ternyata dapat menyebabkan banyak persoalan, di antaranya adalah perpecahan di antara sesama kelompok Islam, dan memang paling sulit bagi umat Islam untuk bersatu, serta menjaga ukhuwwah Islamiyyah. Selain itu, sejarah Indonesia dan Jawa Tengah menunjukkan bahwa Islam dan umat Islam seringkali hanya dijadikan sebagai sarana dan alat politik para elite, terutama para tokoh agama, ustadz, muballigh, dan kiai.

Sementara itu, dinamika partai-partai nasionalis, juga mengalami pasang surut perolehan kursi DPRD Jawa

Tengah secara signifikan pula. *Pertama*, Partai Demokrat mengalami pasang tahun 2004 (10 kursi) dan tahun 2009 (16 kursi), tapi mengalami turun drastis menjadi 9 kursi tahun 2014 dan hanya 5 kursi tahun 2019. Demikian juga partai Gerinda, memperoleh 9 kursi pada tahun 2009, naik menjadi 11 kursi pada tahun 2014, dan hanya 3 kursi pada tahun 2019. *Kedua*, partai Hanura dan PKNU malahan tidak memperoleh satu kursipun pada tahun 2014 dan 2019, sedangkan partai Nasdem sebagai pendatang baru dapat memperoleh 3 kursi DPRD Jawa Tengah.

## 2. Dinamika Politik Pilihan Gubernur dan Wakilnya

Selama lima periode pemilu PDIP tetap mendominasi kursi DPRD di Jawa Tengah, demikian pula dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tahun 2008, tahun 2013 dan 2018 juga tetap dengan percaya diri mengusung calonnya dan terbukti mampu meraih kemenangan secara berturut turut. Hal ini bukti kemenangan koalisi PDIP, PKB, dan partai lainnya dan warga Nahdliyin yang mayoritas orang-orang nasionalis dan religious. Koalisi dan gabungan keduanya memang telah terbukti ampuh dan telah mengakar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia hingga kini sebab mayoritas umat Islam, apalagi di Jawa Tengah memang terdiri para marhenis dan nahdliyin secara mayoritas dan rakyat menengah ke bawah.

Tahun 2008, Bibit Waluyo yang berpasangan dengan Rustriningsih menang dalam pilukada, dan dalam tahun 2013 Ganjar Pranowo berpasangan dengan Heru Sudjatmoko juga menang dalam pilkada Jawa Tengah. Demikian juga pilukada tahun 2018 Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Gus Taj Yasin meraih hasil yang sama. Oleh sebab itu, Jawa Tengah sangat identik dengan julukan Kandang Banteng terutama dalam kontestasi politik. Sebutan tersebut dikaitkan dengan kekuatan politik dan massa pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang sangat mendominasi di Jawa Tengah.

Di Pilgub Jateng 2018, berdasarkan laporan hasil rekapitulasi suara dan penetapan hasil penghitungan suara pasangan Ganjar-Yasin berhasil memperoleh persentase 58,78 persen dengan perolehan 10.362.694 suara. Sedangkan lawannya, yakni pasangan Sudirman Said-Ida Fauziah memperoleh persentase 41,22 persen dengan perolehan 7.267.993 suara. Dengan kekuatan di kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah tersebut, PDIP telah dapat memaksimalkan mesin partainya untuk memenangkan calon pilpres tahun 2019 juga. Ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan sebutan Jawa Tengah sebagai kandang Banteng.

### **3. Dinamika Politik Pilhan Presiden dan Wakilnya**

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintahan. Dalam Sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil (jurdil) serta langsung, umum, bebas dan rahasia (luber). Pemilu juga menjadi sarana lima tahunan pergantian kekuasaan dan kepemimpinan nasional, dimana partai politik dapat saling berkompetisi untuk mendapatkan simpati rakyat dalam memperoleh kekuasaan politik (legislatif, eksekutif) yang legitimasinya sah secara undang-undang dan konstitusional.

Sebagaimana diketahui bahwa pilihan presiden dan wakilnya dilaksanakan secara paket. Pertarungan Pilpres 2014, PDIP yang mengusung pasangan Jokowi-Jusuf Kalla berhasil meraih kemenangan di Jateng dari lawannya Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat itu, Jokowi-JK meraih total 66,65% atau 12.959.540 total suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih total 33,35% atau 6.485.720 suara. Ini menunjukkan bahwa pasangan Jokowi-JK memperoleh lebih 2/3 suara di Jawa Tengah, yang



umumnya memang didukung oleh dua kelompok yang selama ini sangat damai dan harmonis, yaitu kelompok abangan-marhenis dan santri-nahdliyin secara total mendukung pasangan Jokowi-JK.

Demikian juga dalam pertarungan Pilpres tahun 2019, PDIP mengusung pasangan Jokowi\_Makruf Amin telah meraih kemenangan telak dari lawannya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, dengan perolehan sebagai berikut: Jokowi-Makruf Amin mendapatkan total suara mencapai 16.825.511 suara (77,29%), sedangkan Prabowo-Sandi hanya memperoleh suara 4.944.447 suara (22,71 %). Ada selisih sekitar 11,8 juta suara dari total 21.769.958 suara. Ini membuktikan bahwa PDIP dan PKB Jawa tengah dan warga nahdliyin secara setia, kompak dan penuh kebersamaan untuk memenangkan Jokowi-Makruf sehingga bisa memperoleh lebih  $\frac{3}{4}$  suara dari perolehan total.

Bukti kekuatan PDIP di Jawa Tengah tersebut juga terlihat dengan jelas dari keinginan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang hendak menggoyang suara PDIP di sana. Bahkan, jelang beberapa bulan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, kubu Prabowo-Sandi serius untuk memindahkan markas pemenangan di Jateng. Misi kubu Prabowo-Sandi itu seolah semakin menegaskan jika Jateng memang dikuasai PDIP. Dari sisi kekuatan politik di daerah, dari total 35 kabupaten/kota, PDIP memiliki 19 orang kepala daerah baik bupati maupun wali kota di Jateng. Jika

ditotal, PDIP memiliki 412 kursi DPRD kabupaten/kota dan provinsi di Jateng.

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar lima pemilu. Tetapi, pemilu ke lima tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik. Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali berhadapan dengan Prabowo Subianto, *head to head*, untuk memperebutkan kursi presiden. Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya pembelahan sosial dalam masyarakat.

Pemilu 2019 menjadi momentum politik baru bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada ajang demokrasi lima tahunan tersebut, gelaran Pemilu 2019 berbeda skema dari pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya pemilu digelar secara serentak (*concurrent election*), yakni pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilaksanakan pada waktu bersamaan pada 17 April 2019 yang lalu. Pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi dilaksanakan dengan format waktu yang berbeda, yakni pemilihan legislative mendahului pelaksanaan pemilihan presiden. Untuk Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu yang berjumlah 20 partai, yakni 16 partai politik nasional dan 4 partai politik lokal di Aceh.

Dari jumlah partai politik peserta tersebut terdapat empat wajah pendatang baru untuk Pemilu 2019, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Kemunculan partai baru dalam Pemilu 2019 bukan merupakan fenomena pertama kali sejak era reformasi.

Kemunculan partai baru dalam Pemilu 2019 bukan merupakan fenomena pertama kali sejak era reformasi. Setelah keruntuhan rezim otoriter pada 1998 salah satu upaya menyambut perubahan rezim ke arah demokratis adalah dengan pendirian partai politik. Sejak itu sejumlah partai dibentuk dan bersaing memperebutkan suara di pemilu. Pendirian partai-partai di awal reformasi disebut karena *political euphoria*, lebih sebagai sebuah luapan emosi politik yang tersumbat selama rezim Orde Baru berkuasa.

Kemunculan partai-partai berbanding lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi khususnya berkaitan dengan kesamaan hak warga negara. Demokrasi mensyaratkan adanya partai politik. Karena itu, kata Schattschneider, demokrasi modern tidak bisa dibayangkan tanpa partai politik.<sup>5</sup> Partai politik memainkan peran penting dalam sistem pemerintahan demokrasi dalam mendorong warga berpartisipasi aktif dalam politik dan juga dalam sebuah pemilihan untuk jabatan public.

### C. Profil Kiai Jawa Tengah dalam Dunia Politik

Dalam struktur masyarakat yang mempunyai basis keagamaan kuat, keberadaan kiai sebagai pimpinan informal menjadi sangat penting. Pengaruhnya terhadap tata kehidupan kemasyarakatan bisa jadi bahkan jauh lebih kuat dibanding pengaruh para pemimpin formal kondisi demikian sangat jelas terlihat betapa pemimpin formal dalam berbagai hal "terpaksa" harus bekerjasama dan minta bantuan kepada para kiai untuk menggolkan program-programnya. Sebab, dalam masyarakat yang berbasis agama kuat, lebih-lebih masyarakat yang masih tradisional dan paternalistik seperti Jawa Tengah, kiai dipandang sebagai sosok yang bisa menerjemahkan keagungan bahkan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sering kali masyarakat menjadikan kiai sebagai pusat pengaduan hampir semua persoalan kehidupan.

Dalam studinya mengenai Jepara, untuk menyebut salah satu contoh wilayah di Jawa Tengah, Jim Schiller<sup>52</sup> yang selama bertahun-tahun tinggal di Jepara, menemukan bahwa Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan kultural masyarakat Jawa Tengah. Ia memaparkan data betapa dalam sebuah kecamatan ada banyak sekali masjid, mushalla, madrasah bahkan pesantren yang dipimpin oleh para kiai. Para kiai, menurutnya, telah memainkan peranan yang cukup

---

<sup>52</sup>Jim Schiller. *Developing Kabupaten Jepara, State and Society in New Order Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute, 1996), hal. 41.

signifikan dalam membatasi kekuatan pemerintah. Terutama dalam tiga pemilihan umum. Dua kali oleh NU yaitu tahun 1971 dan 1977 dan terakhir oleh PPP pada tahun 1982. Secara keseluruhan, kedua partai tersebut kekuatannya berasal dari para kiai yang independen yang lantang menolak berbagai kesalahan pemerintah dan penyimpangan yang dilakukan oleh para pejabat. Pada saat masyarakat ada rasa ketakutan untuk mengkritisi praktek yang terjadi di pemerintahan, . karena adanya kiai maka kemudian mereka berani berteriak.

Kenyataan seperti itu dibenarkan oleh salah seorang pelaku politik H.A. Isyhar. Yang disebut terakhir ini adalah jebolan pesantren al-Islah, Lasem dan mantan anggota DPR dari unsur PPP yang sekarang ini aktif dalam berbagai pembinaan pengajian dan mengajar kitab kuning, khususnya untuk materi ilmu kalam. Menurut penuturannya K.H. Rasyid (alm), sebagai kiai sepuh dan sangat dihormati, pada masanya selalu memberikan kontrol yang sangat kuat terhadap para anggota dewan yang berada di PPP (waktu itu belum ada partai berbasis Islam yang lain). Ia tidak segan-segan untuk mengundang para anggota dewan dan memberikan pandangannya untuk menolak terhadap apa yang dilaporkan oleh pemerintah karena apa yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu dinilai banyak kesalahan.

Kondisi Jepara sebagai sebuah contoh sebagaimana dipaparkan di atas, juga berlaku untuk wilayah lain di Jawa Tengah. Artinya, dalam dunia politik, keberadaan kiai menjadi

sebuah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Ia turut serta menjadi penentu bagi dinamika politik yang terjadi,

Secara dikotomik, kiai di Jawa Tengah bisa dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar yaitu

1. Kiai pesantren yaitu kiai yang memberikan pengajaran di pesantren melalui khazanah kitab klasik yang biasanya disebut dengan kitab kuning.
2. Kiai non-pesantren adalah kiai yang nmemberikan pengajaran agama kepada masyarakat luas dan tidak terlibat dalam pesantren.

Dalam kaitannya dengan politik, baik kiai pesantren maupun kiai non-pesantren memainkan peran yang cukup signifikan. Namun demikian, tentu saja tidak semua kiai terjun ke dunia politik. Hanya sebagian kecil saja dari kiai pesantren maupun kiai non-pesantren, yang bergerak di blantika politik, baik tercatat sebagai anggota dewan atau hanya yang sekedar menjadi pengurus partai tertentu.. Beberapa diantara kiai tersebut adalah sebagaimana dalam table berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai	Keterangan
1	KH. Nuruddin Amin	DPRD Kab. Jepara	PKB	PP Hasyim Asyari

2	KH. Hayatul Makki	DPRD Prov Jateng	PPP	PP Tanbihul Ghofilin
3	KH. Mohtarom	DPRD Kab. Pekalongan	PPP	PP al-Falah
4	KH. Yusuf Khudhori	Ketua Dewan Tanfidz Jateng	PKB	Asrama Perguruan Islam
5	KH. Nasruddin	DPR Kab. Brebes dan DPRRI	Golkar	PP Modern al-Falah
6	KH. Yazid Mahfudh	Bupati Kebumen	PKB	PP al-Huda

### 1. KH. Nuruddin Amin<sup>53</sup>

KH. Nuruddin Amin, sehari-hari biasa dipanggil Gus Nung, adalah seorang kiai yang lahir di desa Bangsri, Kabupaten Jawa Tengah 52 tahun yang lalu. Ia merupakan salah seorang putra dari seorang kiai yang cukup terkenal di

---

<sup>53</sup>Disarikan dari Wawancara pada 5 Juli 2019 di Bangsri, Kab. Jepara.

Jawa Tengah dan di Jawa Tengah, yaitu KH. Amin Sholeh yang pernah menjadi Ketua Umum MUI Jawa Tengah periode tahun 1990 sd 2003. Dari pihak ayahnya juga putra dari kiai Sholeh Tayu, Kabupaten Pati. Sementara dari pihak ibunya, juga putri dari kiai Harun Bangsri Jawa Tengah. Kiai Harun sendiri pernah nyantri di pesantren kiai Sholeh Tayu, Pati. Jadi dari pihak ayah dan ibu, Gus nung memang mewarisi darah biru dan dzurriyah dari kiai Bangsri Jawa Tengah dan kiai Tayu Pati.

Pada saat masa kecil, Gus Nung belajar pada pagi hari di SDN (Sekolah Dasar Negeri Bangsri), SMP Negeri hingga SMA Negeri Bangsri, Jepara, dan pada sore harinya ia belajar agama di Madin (Madrasah Diniyah) di kampungnya, serta pada malam harinya belajar agama di pesantren ayahnya sendiri, yaitu pondok pesantren Hasyim Asyari, Bangsri. Ia belajar agama kepada ayahnya sendiri, santri senior dan para ustadz di pesantren tersebut, mulai dari baca al-Quran, tajwid, aqidah, ibadah, fiqh, akhlak, dan nahwu shorof, serta bahasa Arab, dan kitab-kitab kuning lain yang telah menjadi tradisi di semua pesantren salafiyah di Indonesia.

Setelah lulus SMA, Gus Nung mondok untuk ngaji di Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Gatlen, Yogyakarta, selama 2 tahun, sambil kuliah di program studi di Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) Fakultas Adab, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1986. Menjelang akhir kuliah, ia pindah ngaji di Pondok Pesantren Minhajul



Muslim, dekat kampus IAIN, sebelah Selatan sekitar 100 meter. Pondok Pesantren ini dipimpin oleh KH. Abu Tauhid, seorang dosen dan dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga periode tahun 1982-1986. Setelah itu, ia pindah ngaji di Pondok Pesantren al-Munawwir, Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1998 hingga 2002. Sebagaimana telah diketahui bahwa pesantren ini dipimpin oleh seorang kiai yang sangat populer secara nasional dan internasional, yaitu KH. Ali Maksum, seorang ketua Syuriah PBNU periode tahun 1986- 1990. Di sinilah, ia dipertemukan jodoh dengan cucu KH. Ali Maksum, Hindun Anisah.

Dari pernikahannya ini, Gus Nung diberi 5 anak, yang terdiri 3 putra dan 2 putri. Secara berurutan anak pertama hingga ketiga berjenis kelamin laki-laki. Putra pertama bernama Mohammad Arif Arafat, dengan alasan pemberian nama untuk ngalap berkah ketika wukuf di Arofah dan mengidolakan tokoh Palestina, yakni Yassir Arafat. Putra mbarep ini sedang kuliah Strata 1 (S1) di Marokko, ambil program studi Islam pada Ma'had Imam Nafi'. Putra yang kedua bernama Danial Fayat sedang belajar di kelas III, Madrasah Aliyah (MA) Yayasan KH. Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Ia pernah mengikuti Seleksi Tilawatul Quran (STQ) di Pontianak, Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebagai peserta paling muda. Putra ketiga bernama Ahmad Levi Samahat pernah belajar di SMP al-Hikmah, Pasuruan, Jawa Timur di kompleks Pondok Pesantren KH. Abdul Hamid, kemudian melanjutkan belajar di MA

Yayasan KH. Ali Maksum, Krapyak. Sementara anak keempat dan kelima adalah putri yang masih kecil. Keduanya masih belajar di SD Negeri Bangsri, Jepara.

Sebagaimana layaknya putra seorang kiai, Gus Nung melanjutkan warisan lembaga pendidikan yang telah dirintis oleh ayahnya, yaitu MI, MTs dan MA, serta Pondok Pesantren Hasyim Asyari Bangsri. Setelah meninggalnya KH. Amin Sholeh pada tahun 2003, MI di bawah Yayasan Hasyim Asyari tersebut memisahkan diri karena dikelola sendiri oleh kakek Gus Nung dari pihak ibu.

Sehubungan dengan itu, Gus nung sebelum terjun ke dunia dan panggung politik praktis, ia mencari pengetahuan dan pengalaman organisasi dalam organisasi masyarakat (ormas) terlebih dahulu, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai ajang untuk melatih diri mengatur masyarakat Muslim, khususnya terlibat dalam kepengurusan NU. Sebagai tokoh muda dan putra kiai, awal mulanya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ke-NU-an, kemudian mendapat kepercayaan Sekretaris PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 1997 s/d 2003, mendampingi ketua umumnya, Kiai Sofwan Helmy. Kemudian menjadi ketua Ansor DIY pada periode tahun 2000 s/d 2005.

Tatkala Gus Dur mendirikan dan mendeklarasikan partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1999 dengan argumentasi utama untuk mewadahi orang-

orang dan tokoh-tokoh NU berpolitik, Gus Nung juga ikut terlibat Tim Sembilan dan Deklarator PKB DIY. Dalam hal ini, PKB pusat menyerahkan pengurus-pengurus PWNU dan PCNU di wilayah DIY untuk mengurus dan menjadi pengurus PKB di lingkungan DIY. Pada waktu awal-awal terbentuknya kepengurusan PKB, Dewan Syuro lebih dominan dalam organisasi dan berkuasa penuh, namun belakangan berbalik arah, yakni Dewan Tanfidziyah yang lebih berkuasa dalam menjalankan organisasi partai. Bahkan, Gus Nung pernah menjadi ketua panitia lokal untuk kegiatan Musyawarah Luar Biasa (MLB) PKB DIY pada tahun 2002. Namun setelah abahnya meninggal dunia pada tahun 2002, berdasarkan musyawarah keluarga inti, maka Gus Nung disuruh pulang ke Bangsri, Jawa Tengah untuk menerima estafet kepemimpinan pondok pesantren Hasyim Asyari dan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Lembaga-lembaga pendidikan di bawah asuhannya mempunyai siswa yang cukup banyak. Jumlah siswa MTS Hasyim Asyari kurang lebih 950 anak, dan jumlah siswa MA Hasyim Asyari kurang lebih ada 850 anak. Pondok Pesantren Hasyim Asyari sendiri terdiri dari 2 lokasi, yaitu Pesantren I, yang bertempat di rumah peninggalan KH. Amin Sholeh dan berlokasi di RT 03 RW VI Bangsri serta berjumlah 200 santri putra, dan Pondok Pesantren II berlokasi di RT 02 RW VII Bangsri dan berjumlah 150 santri putri. Pada umumnya para santri ini berasal dari daerah sekitar, yaitu Bangsri, Mlonggo, Pakis Aji, Bate Alit,

Kedung, Donorojo, Kembang, Keling, Kelet, dan lainnya. Untuk melengkapi lembaga pendidikan yang telah dirintis orang tuanya, Gus Nung mendirikan PAUD Semai (Semangat Anak Indonesia)

Sebagai pengagum Gus Dur, atau bahkan tergolong kelompok Gus Durian, pada awalnya ia termasuk kiai yang idealis dengan empat kenyataan sebagai berikut, yaitu: **pertama**, ia berpandangan tidak mau terjun ke panggung politik dan lebih senang memilih untuk aktif di ormas keagamaan NU; **kedua**, ia berpendapat tabu untuk terjun ke duna politik dan lebih memilih aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta, yaitu LKIS yang dipimpin oleh Imam Azis. Namun, selanjutnya ia mengalami pergeseran orientasi dan pemikiran, yakni mengalami transformasi orientasi dari aktivis ormas menjadi actor dan aktivis politik. **Ketiga**, ia lebih suka melakukan penguatan masyarakat melalui *civil society* secara umum dan masih tetap mengambil jarak pada panggung politik, baik sebagai legislator maupun bupati dan wakil bupati. **Keempat**, menjadi ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Jawa Tengah selama dua periode, yaitu tahun 2005 s/d 2010 dan terpilih lagi pada tahun 2010 s/d 2015.

## 2. **KH. Muhtarom**<sup>54</sup>

KH. Muhtarom adalah seorang kiai yang lahir di desa Salak Brojo, Kedungwuni, Pekalongan 54 tahun yang lalu. Ia merupakan anak kelima dari sebelas bersaudara ayahnya, H. Amat Sayuti adalah seorang pedagang dan peternak kerbau, yang tergolong paling kaya di desanya. Terbukti model rumahnya yang sangat bagus dan masih terawat hingga sekarang, serta ketika kiai Mohtarom kecil dihentikan olah ayahnya, diramaikan dengan iringan musik irama melayu (baca: sekarang musik dangdut) dengan mendatangkan seorang penyanyi populer dari Jakarta, yaitu Mansur S.

Sejak kecil ia belajar agama kepada ayahnya, guru ngaji dan para kiai di desanya. Setelah menamatkan sekolah tingkat dasar dan madrasah diniyah, ia dikirim oleh orang tuanya untuk belajar agama di pondok pesantren Tebuireng, yaitu sekolah (pendidikan formal) di MTs Hasyim syari dan ngaji kitab kuning selama enam tahun (tahun 1979 s/d 1984). Kemudian melanjutkan belajar di MA dan ngaji kitab kuning di Pondok Pesantren al-Falah Ploso, Kediri selama Sembilan tahun (tahun 1984 s/d 1993). Sebagaimana diketahui bahwa kedua pesantren tersebut berafiliasi dan pendukung kuat PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada masa Orde Baru.

---

<sup>54</sup>Wawancara pada 13 Juli 2019 di Salak Brojo, Kedungwunni, Pekalongan.

Selama nyantri di Tebuireng pernah mendengarkan pidato KH. Yusuf Hasim, putra ragil KH. Hasyim Asyari, yang waktu itu menjadi anggota DPR RI. Wejangan dan gemblengan KH. Yusuf Hasyim itulah yang menjadi inspirasi KH. Mohtarom kelak menjadi politisi dan memasuki panggung politik.

Setelah pulang dari kedua pesantren tersebut pada tahun 1993, ia berusaha bekerja secara mandiri dan merintis usaha konveksi yang memang baru ngetren di desanya pada masa itu, tetapi ihtiar ini tentu mengalami pasang surut dalam perjalanan usahanya. Kemudian ia menikah dan dikaruniai tiga putra, yakni: dua putra dan satu putri. Putra pertama bernama Mohammad Aufa Miladul Haq, berumur 24 tahun dan setelah menamatkan SMA ia mondok di pesantren Ploso Kediri hingga sekarang. Putri kedua bernama Garin Faunida, berumur 17 tahun, dan sekarang masih sekolah di MA dan ngaji di pesantren tahfidh “Nahdlotul Banat”, Kudus Kulon, yang dipimpin oleh KH. Arifin. Putra ketiga bernama Nur Muhammad Musyaraf, berumur 14 tahun dan sekarang masih belajar dan ngaji di pesantren Ploso, Kediri.

KH. Mohtarom adalah sosok kiai yang sangat aktif dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik di daerah asalnya, Kedungwuni, kabupaten Pekalongan. Berkat modal ekonomi dan warisan dari kedua orang tuanya berupa tanah sawah yang sangat luas, serta pengetahuan dan pengalaman pada dua pesantren di Jawa Timur dimaksud,

maka ia bercita-cita untuk mendirikan pondok pesantren di desanya. Beriringan dengan itu, ia mulai aktif juga di dunia politik untuk menjadi anggota dan aktivis Partai Persatuan Pembangunan. Hal demikian sesuai cita-cita KH. Mohtarom sejak remaja dan sewaktu nyantri di pesantren Tebuireng, dan ia mewujudkan cita-cita tersebut untuk aktif di organisasi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kabupaten Pekalongan.

Tepatnya pada tahun 1997, ia merintis dan mendirikan pondok pesantren, yang di kemudian hari dinamakan al-Falah sesuai dengan nama pesantren tempat ia mengaji dan bersekolah di pesantren Ploso, Kediri. Secara perlahan tetapi pasti pondok pesantren al-Falah ini mulai dikenal oleh masyarakat Kedungwuni dan sekitarnya sehingga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kurikulum pesantrennya sama persis dengan pesantren-pesantren salafiyah yang ada di Indonesia, yaitu ngaji kitab-kitab kuning. Kegiatan ngajinya juga dilaksanakan setelah shalat subuh, asar dan maghrib. Sejak tahun 2015 pesantren dan lembaga pendidikan lainnya berbentuk yayasn, yaitu Yayasan Aswaja.

Dalam perjalannya, pesantren al-Falah ini dilengkapi dengan pendidikan formal, yaitu SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dalam naungan Yayasan Dar Aswaja. Hingga sekarang, SMP Aswaja memiliki jumlah siwa sekitar 300 orang dan SMK Aswaja mempunyai jumlah siswa sekitar

150 orang dengan program keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Sementara itu, terdapat 175 santri yang ngaji di pesantren sambil sekolah di SMP dan SMK, serta ada 30 santri yang ngaji kitab kuning saja. Sehubungan dengan keaktifan KH. Mohtaron dalam dunia politik, maka dalam mengurus pondok pesantren al-Falah ini, ia dibantu oleh 15 ustadz yang mumpuni untuk mengajar di madrasah diniyah dan pengajian kitab kuning. Demikian juga, ia dibantu oleh 37 orang guru yang mengajar di SMP dan SMK Aswaja.

Setelah ia aktif di dunia dan panggung politik, maka sejak tahun 1997 ia terpilih menjadi legislator, yakni menjadi anggota DPRD dari fraksi PPP selama dua periode, yaitu: periode tahun 2009 s/d 2014 dan tahun 2014 s/d 2019. Periode pertama menjadi ketua fraksi dengan beranggotakan tiga orang dari PPP dan seorang dari partai Demokrat, sedangkan periode kedua juga menjadi ketua fraksi dengan beranggotakan 4 orang dari PPP dan seorang dari PKS. Mengingat sekarang ini ia menjadi wakil ketua DPW PPP Jawa Tengah, maka sudah sewajarnya jika dalam pilihan legislatif (Pileg) langsung tahun 2019 , ia juga diusung menjadi calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) kabupaten Pekalongan, kabupaten Pemalang, dan kota Pekalongan. Akan tetapi, ia gagal untuk menjadi legislator di Senayan.



### **3. K.H. Muhammad Yusuf Chudlori<sup>55</sup>**

K.H. Muhammad Yusuf Chudlori atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Gus Yusuf, Ia adalah putra ragil dari K.H. Chudlori dari dua belas bersuadara. Ia lahir pada 9 Juli 1973 di Magelang, Jawa Tengah. K.H. Chudlori merupakan pendiri dari Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang. Sepeninggal K.H. Chudlori pondok dilanjutkan oleh putra-putra Ia, mulai dari K.H. Abdurrahman Chudlori, K.H. Ahmad Muhammad Chudlori, dan sekarang dipimpin oleh K.H. Mudrik Chudlori. K.H. Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf sendiri juga berperan menjadi bagian dari pimpinan pondok, tepatnya bagian Hubungan Masyarakat (Humas) untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak dalam mengembangkan dakwah pondok peninggalan abah Ia tersebut.

Sepeninggal ayahnya (K.H. Chudlori), Gus Yusuf diasuh oleh kakak tertua Ia K.H. Abdurrahman Chudlori. Gus Yusuf lulus dari Sekolah Dasar (SD) pada tahun 1985. Kemudian Gus Yusuf menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sembilan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, Ia selesai belajar di Lirboyo. Setelah itu Gus Yusuf melanjutkan menuntut ilmu di Pondok Pesantren Salaf

---

<sup>55</sup>Wawancara pada Kamis, 18 Juli 2019 di Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

Kedung Banteng, Purwokerto dan Pondok Pesantren Salaf Bulus Kebumen.

Sepulangnya dari menuntut ilmu, tepatnya pada era reformasi sekitar tahun 1998, Gus Yusuf bergabung dengan organisasi-organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk ikut berdemonstrasi. Sejak tahun inilah, kakak Ia K.H. Abdurrahman Chudlori mengajak Gus Yusuf untuk berjuang dalam wadah suatu partai. Awalnya, sebelum partai PKB lahir, Gus Yusuf menjadi kader dari partai PPP, akan tetapi setelah K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nahdlatul Ulama (NU) melahirkan partai PKB, tahun 1999 Ia ikut berjuang di partai PKB sampai sekarang. Sejak saat inilah Gus Yusuf mulai terjun ke dunia politik, walau tidak ikut ke dunia dewan dan pemerintahan, Ia Gus Yusuf aktif dalam kepengurusan partai. Sejak partai PKB lahir, Gus Yusuf menjabat sebagai ketua PAC di Kecamatan Tegalrejo selama satu periode, selanjutnya menjadi ketua DPC Kabupaten Magelang selama dua periode, dan menjadi DPW PKB kurang dari satu periode karena terdapat konflik saat pemerintahan K.H. Abdurrohman Wahid (Gus Dur).

Pada tahun 2004, Gus Yusuf vakum dari dunia politik akibat adanya konflik internal partai PKB. Pada saat itu Muhaimin Iskandar juga mengutus Ia menjadi ketua DPW, akan tetapi Ia menolak karena Ia patuh kepada K.H. Abdurrohman Wahid (Gus Dur) yang sudah Ia anggap sebagai guru dan orang tua. Sampai pada pemilu 2009 Ia sama sekali tidak terlibat dalam urusan politik. Setelah K.H.

Abdurrohman Wahid (Gus Dur) wafat, Ia kembali lagi ke dalam PKB, tepatnya pada tahun 2013 dan langsung menjadi ketua dewan tanfidh PKB Jawa Tengah. Pada saat itu PKB hanya memiliki 900.000 suara, masuknya Ia diharapkan mampu menyatukan kembali PKB yang sempat retak menjadi satu kesatuan lagi. Gus Yusuf bergerak dan mengajak para Gusdurian untuk kembali masuk ke dalam PKB, juga kader-kader yang berpindah ke dalam PKNU untuk kembali ke dalam PKB.

Selain aktif di politik, secara otomatis Gus Yusuf ikut membantu dalam mengasuh pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, bakat retorika dakwah Gus Yusuf dapat diterima dengan baik di Masyarakat, sehingga Gus Yusuf menjadi seorang figur kiai yang sangat dihormati dalam masyarakat, terlebih santri-santri Ia. Tugas mengajar ngaji Ia adalah yang utama dari segala urusan Ia, hal ini disampaikan Ia karena tugas mengajar ngaji ini merupakan pesan dari abah Gus Yusuf sendiri yaitu K.H. Chudlori. Pondok Pesantren Salaf Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo Magelang merupakan pondok yang Ia pimpin dengan kakak-kakak Ia. Menurut beberapa santri, walau Gus Yusuf disibukkan dengan jadwal dakwah dan urusan politik, tapi Ia tidak pernah absen untuk mengajar ngaji ke santri-santri Ia. Bahkan tahun ini Gus Yusuf mengajar kitab-kitab besar, seperti *ihya' 'ulumuddin*, *Shohih Bukhori*, dan *Mahalli*. Setiap pagi, Gus Yusuf juga mempunyai tugas untuk menjadi imam sholat Shubuh. Semua tanggung jawab Ia ini

dijalankan secara baik, tanpa mengorbankan salah satu dari berpolitik atau mengajar ngaji.

Salah satu strategi Gus Yusuf yang diadopsi dari ayah Ia adalah berjuang melalui pendekatan budaya. Pondok Pesantren API juga terkenal dengan acara tahunannya yang akrab dengan budaya, mulai dari jatilan, wayang kulit, barongsai, dan kesenian-kesenian lainnya yang hidup dimasyarakat semua ada dalam acara tahunan pondok yaitu *ahirussanahan*. Gus Yusuf juga berdakwah aktif di bidang seni dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya agenda tahunan *Suran Tegalrejo*. Selain itu Gus Yusuf juga berdakwah dengan mendirikan stasiun radio yaitu Fast FM yang membidik segmen anak muda. Gus Yusuf juga berpartisipasi dalam komunitas Lima Gunung. Komunitas Lima Gunung adalah sebuah komunitas yang berisi para penggiat seni dari berbagai elemen masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan Menoreh. Mereka yang tergabung dalam komunitas Lima Gunung ini, secara mandiri mengadakan Festival Lima Gunung setiap tahunnya.

Selain aktif menjadi seorang kiai, budayawan, dan berpolitik, Gus Yusuf juga seorang entrepreneur yang hebat. Gus Yusuf berpendapat bahwa entrepreneur adalah sunah Nabi, karena dulu Nabi Muhammad SAW adalah seorang entrepreneur handal, jadi santri juga harus menguasai entrepreneurship. Gus Yusuf sendiri memiliki beberapa usaha pribadi, seperti mempunyai stasiun radio (Fast FM),

BMT, dan Ia juga memiliki restoran yang diberi nama Brambang Salam. Selain mengembangkan bisnis, Gus Yusuf juga bergerak di bidang pendidikan formal. Gus Yusuf adalah ketua Yayasan Syubbanul Wathon yang memiliki SD, SMP, MTs, SMA, SMK, dan Sekolah Tinggi. Sedangkan usaha baru yang sedang dirintis oleh Yayasan Shubbanul Wathon sekarang adalah rumah sakit yang diberi nama RSU Syubbanul Wathon yang bekerjasama dengan Lippo Siloam. RSU Syubbanul Wathon memiliki 8 dokter umum dan 12 dokter spesialis yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan kesehatan santri yang jumlahnya mencapai 13.000-an santri. Rumah sakit tersebut juga mendorong diadakannya program terbaru dari pesantren yaitu MCU (medical check up) yang dilakukan pada setiap santri baru yang diharapkan mampu mendeteksi masalah masalah kesehatan yang terdapat pada santri baru agar segera dapat ditangani.

Dengan kemandirian pondok dan keluarga ndalem Pondok Pesantren Salaf API Tegalrejo Magelang. Pondok Pesantren Salaf API Tegalrejo tidak pernah berhubungan dengan administrasi negara. Pondok tidak pernah menerima bantuan-bantuan dalam bentuk apapun. Semua kebutuhan pondok, mulai dari bangunan, fasilitas, dan konsumsi pondok ditanggung oleh keluarga ndalem dan pondok itu sendiri. Pondok Pesantren Salaf API Tegalrejo Magelang memiliki sektor perekonomian yang menunjang pesantren, diantaranya KEPONTREN (koperasi pesantren) yang resmi

didirikan sekitar awal tahun 2000. Sampai saat ini sudah ada sekitar delapan koperasi yang berjalan. Koperasi tersebut menyediakan berbagai macam kebutuhan santri, mulai dari kebutuhan pokok seperti sabun cuci, peralatan mandi, dan berbagai sarana pra-sarana santri dalam mengaji seperti alat tulis, buku-buku dan kitab-kitab. Selain kebutuhan pokok santri, koperasi juga menyediakan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan santri bahkan masyarakat umum seperti pakaian muslim dan muslimah lengkap dan aksesoris atau perlengkapan santri lainnya. Selain di lingkungan pesantren, terdapat dua koperasi yang dikelola oleh santri yang berada di area sekitar pasar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum, bisa santri sendiri, masyarakat umum, bahkan mahasiswa pun banyak yang mencari kebutuhan seperti buku-buku dan kitab-kitab di koperasi tersebut.

#### 4. K.H. Khayatul Makki, S.H.<sup>56</sup>

K.H. Khayatul Makki, S.H. dilahirkan di Banjarnegara sekitar 51 tahun yang lalu. Tepatnya Ia lahir di Banjarnegara pada 30 Desember 1968. Ia adalah keturunan seorang kiai masyhur di Banjarnegara. Ayah Ia bernama K.H. Muhammad Hasan, Ia adalah pendiri Pondok Pesantren Tanbighul Ghofilin Mantrianom, Bawang, Banjarnegara.

---

<sup>56</sup>Wawancara pada Kamis, 11 Juli 2019 di Bawang, Kabupaten Banjarnegara

K.H. Muhammad Hasan adalah sosok kiai karismatik, Ia terkenal sosok ulama yang hati-hati, terutama sangat berhati-hati dalam masalah halal dan haramnya makanan yang masuk dalam perut. Dengan menikah dengan Nyai Hj. Marfungah binti H. Aspari, K.H. Muhammad Hasan memiliki 8 orang putra-putri. Salah satunya adalah K.H. Khayatul Maki, S.H., Ia adalah putra nomer 4 dari K.H. Muhammad Hasan.

Ayah Ia K.H. Muhammad Hasan adalah seorang santri tulen yang tidak puas menimba ilmu dari satu pesantren saja, tercatat Ia pernah belajar di beberapa pesantren seperti Pondok Pesantren Jampes Kediri, Pondok Pesantren Lasem Rembang, Pondok Pesantren *Roudhotul Tholibin* Bojonegoro, dan pondok-pondok lainnya. Sepertinya K.H. Khayatul Maki, S.H. juga mengikuti jejak ayahnya tersebut. Ia juga seorang santri yang mengaji dari pondok ke pondok untuk memperdalam ilmu agamanya. Ia pernah singgah untuk belajar ilmu agama di Pondok Pesantren *Roudhoh al-Tholibin* Bojonegoro, PonPes *al-Anwar* Sarang Rembang, PonPes Lirboyo, di Bumiayu, dan Jakarta. Jika ayah Ia murni belajar di pondok pesantren, K.H. Khayatul Maki, S.H. melanjutkan pendidikan Ia sampai ke Universitas, K.H. Khayatul Maki, S.H. pernah kuliah di LIPIA (sekitar tahun 1988), UII, dan menyelesaikan kuliahnya di UNSUD sebagai Sarjana Hukum.

Ia menikah dengan Nyai Hj. Diyana Fatmawati. Dari pernikahan tersebut, Ia mempunyai 5 orang putra-putri.

Nama-nama putra-putri Ia adalah Minachun Syania R, Aldilla Maulida al-Maki, Mazia Amali al-Maki, M. Saylan Natanegara, M. Dirvas Natanegara. Semua putra-putri Ia diarahkan untuk menjadi *khoiru ummah*, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, atau bidang apapun yang mereka minati. Akan tetapi K.H. Khayatul Maki, S.H. mendorong anaknya untuk bisa belajar diluar negeri, khususnya timur tengah. Ia berpendapat bahwa untuk menjadi *khoiru ummah* maka tidak cukup hanya tahu Indonesia saja, tetapi dunia. Satu tiket sudah dikantongi oleh putra-putri Ia, karena semua putra-putri Ia menjadi yang terbaik dalam bidangnya, seperti salah satu putra-putri Ia menjadi lulusan terbaik di Unisula Fakultas Kedokteran. Tidak hanya itu, yang belajar di al-Anwar Sarang Rembang juga menjadi yang terbaik, dan diikuti oleh putra-putri Ia yang lainnya.

Tanbihul Ghofilin adalah nama pondok peninggalan ayah K.H. Khayatul Maki, S.H.. sedangkan Ia selama kurang lebih 19 bulan ini merintis Pondok Pesantren Alif Ba yang Ia asuh dan mulai dari nol. Lokasinya tidak jauh dari Pondok Pesantren Tanbighul Ghofilin. Semula lokasi pondok Ia tersebut adalah hutan bambu yang masih belum terjamah oleh manusia. Kemudian melalui *tirakat* (olah bathin) Ia, dibawah bimbingan dua maha guru Ia, yaitu K.H. Maemoen Zubair dan Habib Luthfi ibn Yahya, Ia membuka hutan tersebut dan dijadikan oleh Ia pondok pesantren. Bersamaan dengan kesibukan Ia menjadi anggota dewan di Provinsi Jawa Tengah, Ia selalu memanfaatkan hari libur Ia yaitu hari



Sabtu dan Ahad untuk bertemu dengan santri-santri Ia di pondok pesantren. Bahkan kadang Ia izin untuk hari Jumat agar bisa berdzikir bersama santri-santri Ia di pondok dan tidak masuk ke kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Selain dua hari libur yaitu Sabtu dan Ahad, K.H. Khayatul Maki, S.H. mempunyai wakil dan ustadz-ustadz yang mengisi jadwal Ia untuk mengajar dipondok pesantren. Ada sekitar 30 ustadz yang bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan dipondok pesantren. 30 ustadz tersebut mengurus sekitar 2000an santri. Uniknya pondok yang diasuh oleh K.H. Khayatul Maki, S.H. ini bekerja sama dengan SD, MI, MTs diluar pondok untuk mengembangkan pendidikan agama, bahkan masuk ke wilayah pendidikan Muhammadiyah yang notabennya berlainan organisasi dengan Ia. K.H. Khayatul Maki, S.H. menuturkan bahwa hal tersebut perlu dilakukan, karena dipondok juga diajarkan fiqih mazhab empat, jadi santri-santri belajar untuk tidak melihat suatu persoalan dari satu sisi saja, melainkan bisa melihat mana yang benar, mana yang hanya berbeda dalam furu'iyahnya saja, dan mana yang salah. Itu semua dilakukan secara langsung, terjun ke wilayah mereka. Jadi santri juga harus menjadi *agen of peace* untuk NKRI, tidak mudah terprovokasi dan mengkafirkan saudara sesama Islam.

Selain santri-santri dari anak-anak muda yang tinggal di pondok, K.H. Khayatul Maki, S.H. juga memiliki santri-santri dari orang-orang tua. Biasanya santri tua tersebut bisa datang sesuka mereka untuk belajar ngaji

kepada Ia, atau yang memilih datang ke jamiyah pengajian setiap Ahad Kliwon yang Ia laksanakan dipondok pesantren. Ia mengajarkan sebuah thoriqoh Akmaliyah, sebuah thoriqoh yang membawa bukti-bukti logis untuk memupuk keimanan kepada Allah SWT. Melalui thoriqoh Akmaliyah ini, K.H. Khayatul Maki, S.H. belajar tentang berbagai macam ilmu. Dari hasil renungan Ia, Ia menyebutkan bahwa ada tiga macam guru, pertama adalah guru sesama manusia dimana kita belajar teori-teori. Kedua adalah belajar dengan alam, setelah teori selesai maka dipraktekkan, dicari kebenarannya. Ketiga adalah ghoib, dimana Nabi Muhammad SAW juga belajar dengan guru ghoib yaitu malikat Jibril. Ia juga menambahi jika guru yang ketiga ini kelasnya macam-macam, kalau sebagai manusia biasa tidak mungkin malaikat Jibril yang hadir, melainkan wali dan ulama yang sudah meninggal. Dari definisi guru dan tahapan-tahapan yang telah Ia jelaskan, Ia K.H. Khayatul Maki, S.H. mendapatkan banyak ilmu yang sebelumnya belum Ia ketahui, termasuk penafsiran terhadap ayat-ayat *al-Muqaththa'ah* seperti *Alif Lam Mim*, *Shad*, *Ya Sin*, *Qof*, dan sebagainya.

Berbicara lebih jauh mengenai pondok pesantrennya, K.H. Khayatul Maki, S.H. sangat membenci santri atau alumni yang menyerah karena urusan ekonomi. Di Pondok Pesantren Alif Ba, semua santri diajari tentang bisnis, entrepreneurship melalui berbagai macam pelatihan. Sehingga kedepan para santri tersebut akan menjadi generasi

yang mapan dalam bidang ekonomi. Kalau sudah mapan, maka akan mudah dalam berjuang dimanapun. Mapan menurut Ia bukanlah yang bergelimang harta, akan tetapi yang mampu hidup mandiri, tidak minta-minta dijalan, terlebih dapat ikut berjuang dalam agama Islam, membangun TPQ, Madrasah, Majelis, Masjid, dan lain-lain. Bahkan Ia mengadakan LPK Kyoto Alif Ba, LPK yang bekerja sama dengan Jepang. Alumni-alumni yang tidak bisa meneruskan pendidikannya ke Universitas dan berasal dari keluarga yang tidak mampu, akan dididik dan diberangkatkan ke Jepang dalam rangka mencari modal hidup selama kurang lebih 5 tahun. Setelah itu diharapkan alumni tersebut bisa menggunakan uang hasil bekerja tersebut untuk berjuang di jalan kebaikan. Uang hasil kerja tersebut wajib dikirim ke LPK dan penggunaannya juga dipantau oleh LPK. K.H. Khayatul Maki, S.H. berharap generasi Islam harus mapan dalam ekonomi, tidak ada alasan untuk menjadi generasi yang mandek dalam berjuang dan memalukan agama Islam.

## **5. K.H. Nasrudin Tarsyudi<sup>57</sup>**

K.H. Nasrudin. dilahirkan 61 tahun yang lalu di Brebes, tepatnya pada 24 Mei 1958. Seorang kiai karismatik yang sering disapa Kaji Nas ini terlahir dari keluarga kiai. Ayah Ia adalah seorang kiai yang sangat legendaris di

---

<sup>57</sup>Wawancara pada 25 Juli 2019 di Jatibarang, Kabupaten Brebes

Brebes, sampai-sampai mendapatkan julukan “*Damar Peradaban Brebes*” atau Bapak Pendidikan Islam Brebes, Ia adalah K.H. Ahmad Tarsyudi. K.H. Ahmad Tarsyudi adalah seorang santri tulen, Ia adalah santri dari K.H. Rukyat Kaliwungu Kendal. K.H. Nasrudin, S.H. adalah putra ke-3 dari K.H. Ahmad Tarsyudi dari 4 bersaudara. Keempat putra-putri K.H Ahmad Tarsyudi tersebut masing-masing mempunyai pondok, termasuk K.H. Nasrudin, S.H.. Pondok Ia bernama persis dengan pondok peninggalan ayahnya, yaitu al-Falah. K.H. Nasrudin, S.H. hanya menambahkan kata “modern” untuk menamai pondok pesantrennya menjadi Pondok Pesantren Modern Al-Falah.

Sejak kecil K.H. Nasrudin, S.H. dididik dalam keluarga pesantren. Semangat belajar Ia tidak terbatas didunia pesantren saja, saat belajar agama di Pondok Pesantren *Takhshish al-Taqwa* yang diasuh oleh K.H. Masykur Lamongan, Ia juga ikut belajar di PGA Lamongan. Setelah itu Ia juga lulusan Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia satu angkatan dengan mantan menteri agama Indonesia Surya Darma Ali dan bersama-sama aktif di organisasi PMII di Kampus. Pada sumber lain, Ia juga alumni Fakultas Hukum Universitas Warsito At-Thohirah Jakarta. Walaupun ikut terjun ke dunia akademis, jiwa pesantren K.H. Nasrudin, S.H. juga tetap ada, setiap bulan Ramadhan dan ada waktu untuk belajar ke pondok pesantren, Ia selalu datang ke pondok pesantren untuk memperdalam ilmu Ia. Salah satu pondok yang sering

Ia datang saat Ramadhan adalah Pondok Pesantren Tebuireng Jombang.

K.H. Nasrudin, S.H. mengawali karirnya pada tahun 1975 sebagai bagian dari gerakan pemuda ansor di Kabupaten Brebes. Ia menjadi andalan Ansor Brebes pada waktu itu, karena Ia memiliki tugas berat, yaitu menghidupkan kembali gerakan pemuda Ansor di Kabupaten Brebes. Menurut cerita Ia, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, hanya ada 1 anak cabang yang hidup. Dalam waktu sekitar 2 tahun, tepatnya tahun 1988 sampai 1990, semua ranting Ansor hidup, apalagi anak cabang, sehingga waktu itu K.H. Nasrudin, S.H. benar-benar menjadi andalan Ansor Kabupaten Brebes. Ia mampu menghimpun 3.700 pasukan Banser di Brebes selama 2 tahun kepemimpinan Ia. Hal tersebut membuat karir Ia dalam gerakan Ansor terus naik dan Ia K.H. Nasrudin, S.H. didaulat untuk memimpin gerakan pemuda Ansor wilayah Jawa Tengah. Sehingga gerakan pemuda Ansor Brebes pada waktu itu sangat diperhitungkan oleh pengurus pusat, apalagi pengurus wilayah Jawa Tengah untuk mewakili kegiatan-kegiatan berstandar wilayah ataupun Nasional.

Lahir dari keluarga kiai yang mempunyai pesantren, K.H. Nasrudin, S.H. juga memiliki pondok pasantren sendiri. Berangkat dari kegelisahan Ia kepada para santri ayahnya yang saat bulan Ramadhan bingung memilih jadwal ngaji atau sekolah, Ia berencana untuk membuat satu set sekolah dan pondok pesantren dalam satu wadah satu sistem,

sehingga tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Akhirnya melalui bantuan salah satu teman untuk mempermudah bantuan untuk Ia mendirikan pondok modern, tahun 1997 K.H. Nasrudin, S.H. bisa membeli tanah dan memulai pembangunan gedung pertama. Awalnya terjadi kendala dalam masalah pembiayaan, karena dalam kurun waktu 5 tahun Ia hanya bisa membangun satu gedung belajar saja. Untuk mengawali kegiatan belajar mengajar, pada mulanya gedung itu digunakan untuk sekolah saja, pada waktu itu belum ada pesantrennya. Seiring berjalannya waktu, K.H. Nasrudin, S.H. masuk dalam anggota dewan bahkan menjadi ketua dewan, diteruskan menjadi DPR RI sehingga bantuan gedung dan beasiswa bisa mudah didapatkan, sehingga perkembangan sekolah dan santri menjadi sangat pesat. Akhirnya, pada tahun 2010 K.H. Nasrudin, S.H. memutuskan mulai menerima santri dan membuat pondok pesantren di lingkungan sekolahnya. Dengan segala kesibukan Ia sebagai DPR RI, Ia hanya bisa mengaji di pondok sekitar 2 sampai 3 hari selama seminggu, sehingga santri yang menetap dipondok belum terlalu banyak pada waktu itu, sekitar 50 santri. Baru setelah masa jabatan Ia sebagai DPR RI purna, sekitar tahun 2015, Ia K.H. Nasrudin, S.H. fokus dirumah untuk mengembangkan pondok pesantren modern yang Ia beri nama Pondok Pesantren Modern al-Falah. Sampai sekarang santri yang menetap dipondok Ia sudah mencapai 1.200 santri.

Pondok Pesantren Modern al-Falah menaungi beberapa lembaga sekolah didalamnya. K.H. Nasrudin, S.H. menawarkan paket lengkap dalam pondoknya tersebut. Pondok Pesantren Modern al-Falah memiliki MTs, SMP, MA, SMA, dan MA. Sistem pembelajarannya sudah memakai sistem modern. Kitab-kitab yang dikaji juga menyesuaikan zaman, tidak semua kitab klasik, akan tetapi kitab-kitab modern yang dinilai bagus dalam pembelajaran juga dipakai di pondok milik K.H. Nasrudin, S.H. ini. Contohnya adalah kitab nahwu shorof al-Tamyiz yang dianggap Ia lebih cepat bisa dipahami oleh santri. Pondok Pesantren Modern al-Falah juga menawarkan sebuah sistem belajar mengajar yang terjadwal dengan baik. Ustadz-ustadz yang dipersiapkan secara khusus oleh K.H. Nasrudin, S.H., bahkan Ia K.H. Nasrudin, S.H. rela membiayai bakal ustadz di Pondok Pesantren Modern al-Falah untuk belajar bahasa di Pare, Kediri. Di Pondok Pesantren al-Falah juga diadakan dua jenis Madin. *Pertama*, Madin biasa untuk santri-santri MTs dan MA, disini akan dikembangkan kemampuan santri dalam berbahasa arab dan membaca kitab-kitab klasik. *Kedua*, Madinsus atau Madrasah Diniyah Khusus untuk santri-santri SMP, SMA, dan SMK, di sini santri-santri akan mendapat pembelajaran khusus untuk mengembangkan kemampuan Bahasa Inggris. Bahasa adalah kunci atau tiket wajib untuk go Internasional, sehingga alumni Pondok Pesantren al-Falah sudah tersebar ke universitas-universitas luar negeri, seperti Mesir, Maroko, Makkah, dan China.

K.H. Nasrudin, S.H. juga bercita-cita membuat perguruan tinggi. Hal tersebut disampaikan Ia, akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang Ia rencanakan. Setelah asrama santri dan santri sudah mencapai 3.000, maka penambahan santri akan dihentikan, akan dilakukan peningkatan sarana dan prasarana sekolah terlebih dahulu. Sehingga akan ada sebuah peningkatan mutu dan kualitas dari pondok dan sekolah terlebih dahulu. Setelah pondok dan sekolahnya berjalan dengan baik dengan mutu dan kualitas baik. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan pondok modern dan salaf (klasik) berbeda, jika pondok salaf (klasik) tidak terlalu pusing dengan mutu dan kualitas, yang penting ngaji, tapi pondok pesantren modern harus ada sebuah manajemen pendidikan yang baik, gedung-gedungnya harus diperhatikan, jumlah ustadz dan santrinya, keterpenuhan kebutuhan santri secara baik, lingkungan yang mendukung dan masing banyak lainnya.

Dari pernikahan K.H. Nasrudin, S.H. dengan Nyai Hj. Danilah, Ia dikaruniai 8 anak. Semua anak-anak Ia dididik agar menjadi *khoiru ummah*. Anak-anak Ia tersebar di berbagai Universitas di Indonesia, beberapa ada yang di UGM Yogyakarta, ada yang di UTS Surabaya, dan ada yang masih belajar di bangku SMA, tepatnya di Sekolah Insan Cendikia Madani Tangerang, sebuah sekolah hasil kerjasama antara Madinah dan Universitas Cambridge Inggris. Beberapa putra Ia juga sudah membantu di pondok pesantren. Ada juga putra Ia yang sudah mengikuti jejak ayahnya sebagai politisi



di partai politik, yaitu menjadi DPRD Kabupaten Brebes dari partai PKB.

Ia mengawali karir politiknya di partai Golkar. Ia mengawali karirnya di partai Golkar sebagai ketua bagian pemuda di partai Golkar cabang Kabupaten Brebes. Kemudian pada tahun 1997 Ia berhasil menjadi anggota dewan dan menjabat sekitar 2,5 tahun sebelum akhirnya Indonesia mengalami reformasi. Pada tahun 1999, K.H. Nasrudin, S.H. kembali lagi ke dewan, dengan status wakil ketua dewan di kabupaten Brebes pada waktu itu. Karir Ia di kursi panas terus berlanjut, pada tahun 2004 K.H. Nasrudin, S.H. kembali menjadi anggota dewan bahkan Ia menjadi ketua dewan yang membawahi partai-partai lainnya di kabupaten Brebes.

#### 6. K.H. Yazid Mahfudz<sup>58</sup>

KH. Yazid Mahfudz adalah putra dari ulama besar di Kabupaten Kebumen, Al Maghfurlah KH. Mahfudz Hasbulloh seorang Mursyid Thoriqoh Kholidiyah Naqsabandiyah dengan ribuan santri thoriqoh yang tidak hanya berasal dari kabupaten Kebumen, bahkan menjangkau sampai wilayah luar Pulau Jawa. KH. Yazid Mahfudz atau biasa dipanggil Gus Yazid lahir di Kebumen 24 Mei 1958. Ibunya adalah Nyai Hj Maemunah adalah

---

<sup>58</sup>Wawancara pada 13 September 2019 di Kabupaten Kebumen

putri dari Almarhum Al Maghfurlah Syaikh Kozin Pengasuh Pondok Pesantren Bendo, Kediri Jawa Timur.

Gus Yazid merupakan anak ragil dari 12 bersaudara, yaitu Kiai Abdul Kholiq, Kiai Juwaini, Nyai Umi Kulsum, Nyai Khasanah, Nyai Masruroh, Kiai Makhrus, Nyai Hayati, Kiai Muahaimin, Nyai Siti Ma'rifah, Nyai Siti Muhayaroh, Kiai. Wahib Machfudz, dan Kiai Yazid Mahfudz. Gus Yazid menikah dengan Nyai Hj.Aini Faizah putri dari KH Khudori Muksin Pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda Setemon, Kebonsari Madiun Jawa Timur, dan dikaruniai 2 putra dan 4 putri.

Sejak kecil Gus Yazid sudah berada di lingkungan yang taat dengan Islam, yaitu di pondok pesantren Al-Huda Jetis, Kutosari, Kebumen. Selain mendapat pendidikan dari pondok pesantren, Gus Yazid juga mendapat pendidikan dari sekolah umum. SDN 2 Kutosari Kebumen, kemudian melanjutkan di MTsN 2 Kebumen, setelah itu meneruskan di MAN 1 Kebumen. Setelah tamat dari MAN 1 Kebumen, kemudian nyantri lagi ke pondok pesantren, yaitu di pondok pesantren Al-Falah Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1980-1986 dan pondok pesantren Bendo Jawa Timur tahun 1987-1988.

Setelah selesai dari pondok pesantren Al-Falah, ia sempat kembali ke pendidikan umum, yaitu di Pendidikan Guru Agama Negeri atau yang biasa disingkat PGAN, yang saat itu di Kebumen berada di selatan alun-alun kota

Kebumen. Walaupun pada akhirnya tidak selesai pendidikan di PGAN, akan tetapi Gus Yazid masih ingat dengan beberapa gurunya. Gus Yazid juga pernah kuliah di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, namun kabarnya tidak sampai selesai.

Gus Yazid juga terjun kedalam beberapa organisasi. Selain sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Huda Jetis, ia juga menjadi ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) di kabupaten Kebumen dan provinsi Jawa Tengah. RMI adalah sebuah lembaga dari Nadhlatul Ulama (NU) yang berkaitan dengan pondok pesantren. Sempat juga pernah menjadi ketua Tanfidz PW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Tengah. Kemudian dari PKNU kembali ke PKB dengan menjadi Wakil ketua Dewan Syuro DPW Partai Kebangkitan Bangsa) PKB Jawa Tengah.

Gus Yazid mulai dikenal banyak pihak ketika pada tahun 2004 mencalonkan diri menjadi anggota DPRD tingkat provinsi di Jawa Tengah melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian pada tahun 2007 ikut mendirikan PKNU walaupun pada akhirnya di tahun 2014 kembali ke PKB. Lewat PKB juga Gus Yazid menjadi Wakil Bupati periode 2016-2021. Terhitung sejak 1 Pebruari 2019, Gus Yazid ditetapkan sebagai Bupati Kebupemn melanjutkan kepemimpinan Ir. Muhammad Yahya Fuad yang terjerat persoalan korupsi.



## **BAB IV**

### **PARADIGMA PERAN GANDA KIAI POLITIK DI JAWA TENGAH**

Dalam diskursus mengenai pemikiran sering ditemukan adanya berbagai perbedaan. Ia sering membentuk pemikiran yang unik sehingga masing-masing mempunyai karakter sendiri. Secara keseluruhannya tentu saja sangat bergantung kepada kondisi sosial-budaya masyarakat, sehingga hasil yang dicapai menjadi berbeda antara satu dengan lainnya. Ketidaksamaan pemikiran ini pada hakekatnya ditentukan oleh cara pandang yang didasarkan kepada lapisan masyarakat yang secara struktural tak terlihat. Cara pandang tersebut tunduk pada aturan yang menentukan apa yang dipandang atau dibicarakan dari kenyataan, apa yang dianggap penting dan tidak penting, hubungan apa yang diadakan antara berbagai unsur kenyataan dalam penggolongan dan analisis. Artinya setiap zaman memandang, memahami dan membicarakan kenyataan dengan caranya sendiri-sendiri karena struktur yang tak terlihat memang berlainan. Cara pandang demikian ini oleh Gadamer disebut dengan praduga. Foucault mengistilahkan cara pandang tersebut *episteme*, sedangkan Thomas Kuhn menyebutnya dengan istilah paradigma.

Dalam hal ini, Thomas Kuhn nebjelaskan bahwa paradigam merupakan latar belakang yang tak tertanyakan atau seperangkat kepercayaan yang merupakan persenyawaan sifat-

sifat personal dan historis.<sup>59</sup> Dengan nada yang sedikit berbeda, Hans Kung menegaskan bahwa paradigm sebagai “*a total constellation: the conscious unconscious total constellation of convictions, value, and pattern of behaviour*” (sebuah konstalasi total: konstelasi total baik yang di sadari maupun tak di sadari mengenai keyakinan, nilai, dan pola tingkah laku).<sup>60</sup> Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa paradigma adalah kerangka referensi yang mendasari sejumlah teori maupun praktek-praktek ilmiah dalam pereode tertentu.

Dengan kata lain paradigma dapat didefinisikan sebagai seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Secara singkat, paradigma dapat dikatakan sebagai sebuah kerangka pemikiran atau model pemahaman. Kerangka pemikiran ini dibutuhkan untuk memahami fenomena yang nampak di sekitar kita..<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Baca: Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* di bawah judul ”Introduction: A Role for History” dan “The Priority of Paradigms”. (Chicago: University of Chicago Press, 1974), hal.1-9 dan 43-51. Baca juga: Ted Honderich (ed.), *The Oxford Companion to Philosophy* (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 451.

<sup>60</sup>St. Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama” dalam Th. Sumartana, *Dialog, Kritik dan Identitas agama* (Yogyakarta: Dian/Interfidei), hal. 81.

<sup>61</sup>Heddy Shri Ahimsa-Putra, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan dalam [https://www.academia.edu/13802211/PARADIGMA\\_ILMU\\_SOSIAL-BUDAYA](https://www.academia.edu/13802211/PARADIGMA_ILMU_SOSIAL-BUDAYA)

Untuk membentuk suatu kerangka pemikiran/paradigma diperlukan sejumlah unsur. Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra, ada 9 (sembilan) unsur dalam sebuah paradigma, yaitu: (1) Anggapan-anggapan dasar (2) nilai-nilai; (3) model-model; (4) masalah yang diteliti/yang ingin dijawab; (5) konsep-konsep pokok (6) metode-metode penelitian (7) metode-metode analisis; (8) hasil analisis/teori dan (9) representasi. Dari kesembilan unsur tersebut, dalam konteks penelitian ini yang paling cocok untuk melihat fenomena kiai politik adalah anggapan dasar, nilai dan konsep-konsep pokok.

Anggapan dasar adalah pandangan-pandangan mengenai suatu hal yang tidak dipertanyakan lagi kebenarannya karena kebenaran itu sendiri sudah diterima. Banyak asal muasal yang menjadikan masyarakat mempunyai anggapan dasar. Ia bisa saja berasal dari perenungan-perenungan filosofis dan reflektif, penelitian-penelitian empiris yang canggih atau pengamatan yang seksama

Unsur lain yang penting adalah nilai yang dapat dimaknai sebagai kriteria untuk menakar sesuatu itu baik atau buruk, berguna atau tidak, benar atau salah. Dengan demikian, nilai memang selalu ada di setiap cabang ilmu, tetapi formulasi, titik tekan, dan keeksplisitannya berbeda-beda.

Sementara itu yang dimaksud konsep-konsep pokok oleh Heddy Shri-Ahimsa adalah istilah-istilah yang digunakan dengan makna tertentu untuk memberikan batasan atau definisi dalam penelitian. Konsep penting untuk diperhatikan guna

mempermudah analisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan suatu gejala sosial-budaya yang dipelajari. Sebelum merumuskan sebuah konsep, peneliti perlu melakukan kajian pustaka agar dapat, memperoleh berbagai definisi yang telah dibuat oleh para ilmuwan lain yang berkaitan dengan konsep-konsep dalam penelitiannya. Jika dari kajian pustaka diketahui konsep yang telah dikemukakan ternyata tidak sesuai atau tidak cocok, maka peneliti dapat membuat konsep sendiri yang lebih sesuai.

Melalui kerangka paradigmatis yang demikian ini, akan dijelaskan beberapa hal penting mengenai keberadaan kiai politik

#### **A. Orientasi Politik**

Struktur masyarakat yang berbasis agama kuat, seperti Jawa Tengah dan dimana-mana, biasanya mempunyai pola kepengikutan yang sangat kuat terhadap pemimpin agamanya. Budaya yang berkembang dalam masyarakat seperti itu adalah budaya paternalistik. Apa yang dilakukan oleh para pemimpinnya kemudian mempunyai imbas yang sangat kuat kepada para pengikutnya. Meminjam analisis yang dibuat B.J. Bolland (1982) dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* masyarakat seperti ini termasuk tipologi masyarakat ideologis atau karismatis. Dikatakan ideologis karena sektor-sektor kehidupan itu adalah agama itu sendiri sehingga melakukan pilihan-pilihan di dalamnya adalah juga termasuk pilihan agama. Demikian pula dikatakan karismatis karena ketaatan



kepada figure sentral yang dinilai mampu menerjemahkan kehendak Tuhan.

Dalam struktur masyarakat demikian, posisi kiai menjadi amat sangat penting. Masyarakat seringkali menjadikan kiai sebagai pusat pengaduan hampir semua persoalan kehidupan termasuk pilihan-pilihan politiknya. Dan peran demikian ini, dalam penilaian Jim Schiller telah diperankan secara baik oleh para kiai, baik yang ada dalam politik maupun yang tidak dalam politik

Kiai menurut pandangan masyarakat adalah sosok yang dijadikan panutan baik dalam perkataan maupun perilakunya. Sosok kiai sendiri tidak lepas dengan pengetahuan agama yang sangat melekat pada dirinya, sehingga masyarakat selalu mendiskusikan permasalahan keagamaan kepada kiai. Belakangan ini terjadi polarisasi pemikiran tentang sosok kiai, sehingga memunculkan tipologi kiai yang cukup variatif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa kiai seharusnya cukup berperan sebagai pengayom umat terutama dalam kehidupan beragama, sehingga akan lebih baik jika kiai menghindarkan diri dari kegiatan politik praktis, sehingga tidak terjebak pada peran ganda. Namun ada juga sebaliknya, bahwa tidak ada alasan kiai meninggalkan politik praktis sebab berpolitik merupakan bagian dari kehidupan agama itu sendiri..<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam *Fikrah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 157.

Sosok kiai bagi masyarakat merupakan indikator penting dalam kelangsungan hidup keberagaman masyarakatnya. Kiai tidak hanya sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan saja, namun juga sebagai tempat untuk mencurahkan berbagai keluh kesah dalam berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di desa biasanya kiai diminta solusi dari berbagai persoalan, seperti masalah keluarga, pendidikan, jodoh bahkan memilikikan waktu untuk memulai suatu pekerjaan. Kiai menjadi aktor utama dari segala konsepsi sosial agamanya sekaligus menjadi institusi yang menjadi penyebarannya, sehingga kiai memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan sosial, politik dan ekonomi terutama bagi masyarakat lokal. Dapat dikatakan bahwa kiai beserta pengaruh di dalamnya menjadi pembentuk sistem dalam pola kehidupan masyarakatnya, selain itu juga dapat menjadi penentu budaya.<sup>63</sup>

Saat ini kiai tidak hanya dominan dalam perkembangan sosial keagamaan masyarakat, namun juga terlibat dalam politik dan birokrasi. Peran ganda ini seringkali berpengaruh besar terhadap manajemen waktu, tenaga bahkan dalam pemikiran kiai, sehingga baik kiai maupun masyarakat yang tidak siap akan mengalami keterkejutan dalam hal pemahaman kondisi sosialnya. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah: Bagaimana pergeseran peran kiai tersebut berlangsung sehingga melandasi motivasi kiai dalam pilihan peran gandanya?, Bagaimana para kiai yang terlibat peran ganda

---

<sup>63</sup> Ibid. hal. 158-159

tersebut menjalankan fungsi sosialnya ditengah-tengah tuntutan masyarakat yang semakin kompleks? Dan Bagaimana masyarakat menempatkan sosok kiai yang menjalankan peran ganda dalam sosial kultural masyarakat yang juga mengalami perkembangan dalam berbagai sektor?<sup>64</sup>

Berdasarkan penelusuran di masyarakat, para kiai pada umumnya memahami bahwa politik tidak lebih hanyalah sarana untuk *beramar ma'ruf nahi munkar*. Walaupun demikian, mereka membangun dari argumentasi dan prinsip yang berbeda-beda. Gus Nung,<sup>65</sup> misalnya, berpandangan bahwa kiai harus bisa merebut anggaran yang tersedia agar lembaga pendidikan yang dimiliki bisa lebih baik dan bergengsi. Kehidupan pondok pesantren sekarang ini harus didukung oleh lembaga pendidikan formal, seperti SD, SMP, SMA atau MI, MTs, MA sebab para santri yang mondok dan sekolah inilah yang menjadi tulang punggung dan potensi ekonomi serta pendanaan untuk menuju pengembangan pesantren. Walaupun sebagian besar latar belakang ekonomi para orang tua dan wali santri itu dari kelas ekonomi bawah. Jika tidak ada sekolah-sekolah atau madrasah-madrasah formal maka pesantrennya akan bangkrut sebab mayoritas santri dalam rangka menuntut ilmu agama Islam dan ngaji kitab kuning itu harus belajar di sekolah atau madrasah juga sehingga mereka memiliki pemahaman dan wawasan yang

---

<sup>64</sup>Ibid. hal. 167

<sup>65</sup> Wawancara pada 5 Juli 2019 di Kabupaten Jepara

luas, dunia dan akhirat sekaligus, di samping nanti bisa melanjutkan ke perguruan tinggi.

Ada dua trend dan fenomena mutakhir tentang persepsi masyarakat sekarang yang sedang fenomenal tentang pengajian dan pondok pesantren. Pertama, berbagai pengajian yang dilakukan di pesantren maupun oleh masyarakat Islam dan organisasi otonom Nahdlatul Ulama, baik pengajian dalam skala kecil, sedang maupun yang akbar, hampir selalu para jamaah pengajian diberikan minuman, jajanan, dan makan-makan dengan alasan untuk meningkatkan jumlah pengunjung pengajian. Sebab sebagian pengunjung pengajian yang ingin ikut minum-minum dan makan-makan harus hadir dalam pengajian tersebut, kemudian baru dipaksa untuk mendengarkan pengajian. Apalagi jika muballighnya sangat populer, luas pengetahuan agamanya, kharismatik, dan bisa memberikan kisah-kisah yang menarik dan lucu, maka pengunjung pengajian semakin ramai dan semakin banyak yang tertarik.

Kedua, ada pergeseran persepsi masyarakat dewasa ini tentang animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di pondok pesantren, yaitu masyarakat akan memilih pondok pesantren yang memiliki lembaga pendidikan formal, baik dalam model pendidikan madrasah maupun sekolah, dan berbagai fasilitas yang lengkap, mulai dari gedung, kelas, masjid, halaman, sarana olah raga, kegiatan ekstra kurikuler dan lainnya. Memang fasilitas kelas saja mengalami perubahan, mulai dari penggunaan papan tulis hitam, kapur tulis, dan penghapus hingga penggunaan white board, spidol dan

penghapus yang berbeda. Pergeseran dari ruang kelas yang banyak jendela untuk sirkulasi udara menjadi ruang kelas diberi kipas angin, kemudian berubah ruang kelas yang full dengan Air Condition (AC). Demikian juga perubahan dari penggunaan OHP menjadi LCD. Jadi persepsi masyarakat secara umum menyatakan bahwa semakin baik fasilitas pendidikan, maka akan semakin baik kualitas pendidikan. Inilah salah satu yang menyebabkan animo masyarakat untuk mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren, selain tradisi pesantren salafiyah untuk ngaji kitab kuning.

Menurut Gus Nung, istilah politik itu berhubungan dengan kewenangan dan kekuasaan dalam mengatur masyarakat dan pemerintahan. Dalam hal ini, ia mengikuti dua wejangan Gus Dur, yaitu: pertama, *unpolitical politic* dalam artian berpolitik tanpa panggung politik. Kedua, setelah Gus Dur menjadi presiden mengalami pergeseran, yaitu: “ Jika tidak masuk panggung politik, maka panggung politik dimaksud akan diambil alih oleh petualang-petualang politik”. Kedua wejangan ini sangat mempengaruhi perjalanan hidup dan karir Gus Nung dalam kehidupan berikutnya, baik dalam kehidupan ormas keagamaan maupun panggung politik.

Sehubungan dengan itu, Gus nung sebelum terjun ke dunia dan panggung politik praktis, ia mencari pengetahuan dan pengalaman organisasi dalam organisasi masyarakat (ormas) terlebih dahulu, yaitu Nahdlatul Ulama sebagai ajang untuk melatih diri mengatur masyarakat Muslim, khususnya terlibat dalam kepengurusan NU. Sebagai tokoh muda dan putra kiai,

awal mulanya terlibat aktif dalam berbagai kegiatan ke-NU-an, kemudian mendapat kepercayaan Sekretaris PWNU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) periode tahun 1997 s/d 2003, mendampingi ketua umumnya, Kiai Sofwan Helmy. Kemudian menjadi ketua Ansor DIY pada periode tahun 2000 s/d 2005.

Tatkala Gus Dur mendirikan dan mendeklarasikan partai, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada tahun 1999 dengan argumentasi utama untuk mewadahi orang-orang dan tokoh-tokoh NU berpolitik, Gus Nung juga ikut terlibat Tim Sembilan dan Deklarator PKB DIY. Dalam hal ini, PKB pusat menyerahkan pengurus-pengurus PWNU dan PCNU di wilayah DIY untuk mengurus dan menjadi pengurus PKB di lingkungan DIY. Pada waktu awal-awal terbentuknya kepengurusan PKB, Dewan Syuro lebih dominan dalam organisasi dan berkuasa penuh, namun belakangan berbalik arah, yakni Dewan Tanfidziyah yang lebih berkuasa dalam menjalankan organisasi partai. Bahkan, Gus Nung pernah menjadi ketua panitia lokal untuk kegiatan Musyawarah Luar Biasa (MLB) PKB DIY pada tahun 2002. Namun setelah abahnya meninggal dunia pada tahun 2002, berdasarkan musyawarah keluarga inti, maka Gus Nung disuruh pulang ke Bangsri, Jepara untuk menerima estafet kepemimpinan pondok pesantren Hasyim Asyari dan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

Sebagai pengagum Gus Dur, atau bahkan tergolong kelompok Gus Durian, pada awalnya ia termasuk kiai yang idealis dengan empat kenyataan sebagai berikut, yaitu: pertama, ia berpandangan tidak mau terjun ke panggung politik dan lebih

senang memilih untuk aktif di ormas keagamaan NU; kedua, ia berpendapat tabu untuk terjun ke duna politik dan lebih memilih aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Yogyakarta, yaitu LKIS yang dipimpin oleh Imam Azis. Namun, selanjutnya ia mengalami pergeseran orientasi dan pemikiran, yakni mengalami transformasi orientasi dari aktivis ormas menjadi actor dan aktivis politik. Ketiga, ia lebih suka melakukan penguatan masyarakat melalui *civil society* secara umum dan masih tetap mengambil jarak pada panggung politik, baik sebagai legislator maupun bupati dan wakil bupati. Keempat, menjadi ketua Tanfidziyah PCNU kabupaten Jepara selama dua periode, yaitu tahun 2005 s/d 2010 dan terpilih lagi pada tahun 2010 s/d 2015.

Sebaliknya, beberapa tahun kemudian, mulai ada sinyal bahwa Gus Nung mulai melirik aktifitas dan panggung politik praktis. Adapun beberapa argumentasi dan realitas yang menyertai pergeseran pandangan dan pemikirannya ke dunia politik, yaitu: pertama, orang-orang NU banyak yang tidak diuntungkan dalam akses-akses politik dan pemerintahan di kabupaten Jepara, walaupun yang menjadi wakil bupati saat itu berasal dari tokoh NU, yaitu Kiai Ali Irfan, mendampingi bapak Endro Martoyo sebagai bupati Jepara. Kedua, lembaga-lembaga pendidikan di wilayah NU Jepara, seperti majlis-majlis taklim, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, dan pesantren-pesantren tidak sepenuhnya disupport oleh pemerinah daerah kabupaten Jepara.

Ketiga, ada ketimpangan yang luar biasa di lingkungan ummat Islam, baik dalam bidang agama, sosial, ekonomi, politik, budaya maupun teknologi, bahkan warga NU sendiri terpecah belah hampir dalam semua partai yang ada. Keempat, masih adanya dominasi orang-orang lama yang berkuasa dalam pemerintahan di Jawa Tengah, yakni tokoh-tokoh lama pada masa orde baru, seperti orang-orang Golkar dan para alumni serta geng dari alumni STPDN yang bertugas di jajaran eksekutif. Kelima, menjadi aktifis politik di PKB tidak diperbolehkan untuk rangkap jabatan jadi ketua PCNU. Keenam, kiai NU memasuki panggung politik bertujuan utama untuk mengawal moral masyarakat dan pejabat dengan kendaraan partai, karena kiai-kiai senior dalam dunia politik masih terpinggirkan dan belum efektif dan terukur secara jelas dan operasional.

Pergeseran pandangan dan pemikiran Gus Nung dari tipe idealis menjadi pragmatis dapat dijelaskan pada karakteristik pernyataan berikut: pertama, tidak ada rasa khawatir dan takut jika Gus Nung sendiri dan termasuk pandangan masyarakat tentang keterlibatannya dalam panggung politik praktis; kedua, akses-akses kekuasaan sangat dibutuhkan untuk pembinaan moral sehingga kiai harus bisa menjaga moralitas masyarakat dan pejabat; ketiga, dari sisi pragmatis, dengan menjadi legislator maupun eksekutif dapat memperjuangkan fasilitas dan pendanaan untuk masjid, madin, TPQ, pesantren, madrasah dan sekolah-sekolah Islam melalui APBD; keempat, dari sisi politik praktis, pada tahun 2012 Gus Nung pernah dicalonkan oleh



koalisi dua partai, yaitu PDIP dan PKB, yakni Yuli Nugroha diusulkan jadi calon bupati Jepara dari PDIP dan Gus Nung sebagai calon wakil bupati Jepara dari PKB. Akan tetapi, secara mereka berdua dikalahkan dalam pilkada langsung oleh Kiai Marzuki dan Subroto.

Apa yang dipahami oleh Gus Nung, diamini oleh KH.Muhtarom,<sup>66</sup> politikus PPP di Kabupaten Pekalongan. Baginya, politik itu berhubungan dengan rebutan kekuasaan. Artinya, kekuasaan itu harus ada dalam suatu masyarakat, bahkan negara. Siapapun boleh merebut kekuasaan asalkan dengan cara yang benar dan baik. Seseorang atau masyarakat tidak bisa berbuat sesuatu tanpa adanya kekuasaan. Agama apapun tidak bisa masuk tersebar secara luas dan merata ke suatu daerah, tanpa adanya kekuasaan. Ia memberikan contoh, tersebarnya paham Wahabi keseluruh penjuru dunia secara sistematis, terstruktur dan masiv juga melalui kekuasaan, yaitu koalisi antara Abdullah bin Abdul Wahab dan raja Ibnu Saud untuk mendirikan Negara Saudi Arabia sebagai starting point paham Wahabi dan madzhab Hanbali.

Ia juga mengikuti pemikiran KH.Yusuf Hasyim dalam berpolitik, tatkala politikus nasional itu pulang ke Pesantren Tebuireng pada tahun 1984. Salah satu wejangannya adalah “Negara itu ibarat gelas, terserah mau diisi apa saja, terserahlah.” Dari inspirasi itu, KH.Muhtarom tergugah dan bangkit untuk terjun di gelanggang politik parktis untuk menjadi

---

<sup>66</sup> Wawancara pada 13 Juli 2019 di Kabupaten Pekalongan

Legislator di Kabupaten Pekalongan. Selain itu, Ia juga berprinsip untuk Amar makruf nahi munkar dalam berpolitik praktis, apalagi setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sejak tahun 1997.

Ia juga mengikuti pandangan Al Ghozali bahwa antara agama dan politik itu bagaikan dua anak kembar, atau ibarat dua sisi mata uang, yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan agama, ilmu dan dakwah harus melibatkan diri dalam politik praktis, yakni menjadi Legislator. Politik juga bagaikan kendaraan yang efektif dan efisien untuk mempermudah dan memperlancar pendanaan, khususnya bagi ummat Islam yang mengalami ketertinggalan dan keterbelakangan dalam segala hal kehidupan di dunia. Dalam bahasa Jawa ungkapan *Idune wong kuasa luwih kuwat*. Bahkan, ia menegaskan, bahwa segenggam kekuasaan bisa menang dan mengalahkan segudang kebaikan dan kebenaran.

Selama dua periode menjadi anggota DPRD Tingkat II, Kabupaten Pekalongan, Ia memberikan pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan untuk perubahan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pendanaan masjid, musholla, pesantren, madrasah diniyyah, MI, MTs, dan MA di Kabupaten Pekalongan, bahkan SMP, SMA, dan SMK. Yang dimiliki oleh yayasan Islam, lembaga Maarif dan Muhammadiyah. Demikian juga pada Peraturan Daerah (Perda) Haji Kabupaten Pekalongan, Tahun 2014 tentang “Larangan memberi beban tambahan biaya haji bagi jama’ah calon haji di Kabupaten Pekalongan”.

Sebaliknya, masih belum berhasilnya Perda-perda yang bernuansa Islam untuk mencegah kemungkaran dan kemaksiatan, seperti merebaknya minuman keras dan narkoba, tempat-tempat hiburan malam, kompleks Pekerja Seks Komersial (PSK), di kampung Israel, Kecamatan Karanganyar. Padahal, menurut KH. Muhtarom, para anggota DPRD tingkat II di Pekalongan itu dimanjakan, seperti jabatan eselon II yang sejajar dengan Kepala-kepala Dinas, tata cara protokoler, baju seragam, gaji tetap, kunjungan kerja (Kunker), dan tunjangan-tunjangan lainnya yang masih relevan dengan tugas legislator.

Secara idealis, KH. Muhtarom berusaha dan berjuang menyampaikan aspirasi Umat Islam melalui PPP sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi secara realitas berbeda. Hal ini disebabkan bahwa masyarakat juga sudah mulai berpikir dan bertindak secara pragmatis, terutama menjelang pemilihan legislatif (Pileg) di Kabupaten Pekalongan, seperti money politik, sholawat rupiah, dan bom sek (Seket ewu/50 ribu). Padahal, menjadi legislator semata-mata untuk mencari uang adalah salah. Sebab ketatnya pengawasan dari pihak KPK, kepolisian, dan LSM-LSM yang ada, bahkan penghasilan melalui suap menyuap tidak akan memberikan rahmah dan barokah di dunia, apalagi di akhirat.

Menyadari bahwa politik adalah kendaraan efektif untuk melakukan perubahan, K.H. Muhtarom mulai masuk dunia politik pada tahun 1997, kedalam patai PPP. Sebelum terjun ke dalam dunia politik ia terlebih dahulu terjun kedalam dunia bisnis. Setelah sukses menekuni dunia bisnis, ia mulai berani

masuk kedalam dunia politik. Pada tahun 2009 ia mencalonkan diri sebagai caleg dari partai PPP. K.H. Muhtarom menjadi anggota legislatif selama dua periode. Ia memiliki orientasi politik sejak ia menimba ilmu di pesantren. Ia bercerita awal mula keinginan tersebut muncul saat ia modok di Pondok Pesantren Tebuireng yang dahulu diasuh oleh K.H. Yusuf Hasyim putra dari K.H. Hasyim Asy'ari yang pada saat itu menjabat sebagai DPR RI.

Saat K.H. Yusuf Hasyim berada di pondok, ia sering mengumpulkan para santri. K.H. Yusuf Hasyim menceritakan keadaan yang dialami oleh Negara Indonesia. Sejak saat itulah K.H. Muhtarom memiliki keinginan untuk duduk di kursi legislatif. Kata-kata yang sangat ia ingat adalah saat K.H. Yusuf Hasyim berkata “negara itu ibarat gelas, jadi baik dan buruknya negara tersebut tergantung pada isinya”. Selain motivasi tersebut ia juga memiliki pemahaman sendiri tentang pentingnya dan manfaat ia masuk ke dalam dunia politik. K.H. Yusuf Hasyim menjelaskan bahwa politik atau kekuasaan itu penting sebagai kendaraan dalam menyebarkan kebaikan, ia mencontohkan bahwa paham wahabi dapat menyebar luas di jazirah arab juga karena salah satu penganutnya menduduki salah satu posisi penting dalam pemerintahan. Dari hal tersebutlah, umat Islam harus tahu bahwa politik dan kekuasaan itu penting.

Belajar dari guru, K.H. Muhtarom sadar bahwa dengan menduduki kursi politik atau pemerintahan akan memudahkan seseorang dalam berjuang, baik berjuang atas pendapat sendiri

maupun kebijakan kelompok. Lebih jauh lagi, K.H. Muhtarom menjelaskan bahwa seorang yang memiliki jabatan juga memiliki wewenang dalam berbagai hal. Seseorang yang tadinya tidak sejalan dan tidak memiliki kekuasaan akan patuh kepada yang memiliki kekuasaan. Jika ada kebijakan yang perlu diperbaiki, karena dirasa tidak baik, atau bahkan mengancam umat, seorang legislator dapat langsung mengusulkan revisi dan mengawal bagaimana kebijakan tersebut berjalan. Poin pentingnya adalah membantu orang banyak yang terbebani atau terancam dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu politik menjadi kendaraan paling efisien dalam gerakan perubahan, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada segudang kebenaran.

Keuntungan-keuntungan lainnya ketika K.H. Muhtarom menjabat sebagai legislator adalah dapat membantu keuangan sekolah madrasah dari dana APBD, sehingga ada uang saku untuk para ustadz-ustadz madrasah. Mengusulkan dan menyusun Perda tentang tidak adanya dana tambahan bagi calon jamaah haji, awalnya jamaah selalu dibebani dana tambahan, padahal seharusnya biaya tersebut diberikan oleh Pemda. K.H. Muhtarom juga mengusulkan dan menyusun perda tentang penertiban tempat hiburan malam, sekarang masih dibicarakan dengan badan eksekutif. K.H. Muhtarom selalu mengadakan rapat koordinasi dengan Satpol PP tentang peningkatan penertiban tempat hiburan malam. Selain itu, ia juga sangat getol dalam urusan pemusnahan miras, narkoba, dan sejenisnya yang masih sangat marak beredar di kalangan masyarakat.

Menurut K.H. Muhtarom, hal tersebut selama masuk ke dalam dunia politik adalah masalah ekonomi atau keuangan ketika akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal tersebut dikarenakan biaya yang digunakan menjelang pemilu sangatlah banyak. Selain itu, setelah ia duduk di kursi legislatif pun banyak hal berat yang harus ia hadapi, misalnya mengingat kapasitas ia sebagai seorang kiai atau ulama yang masuk ke dalam rumitnya dunia politik. Misalnya, ketika ada hal yang kurang tepat, ia mengaku kesulitan dalam mengingatkan, biasanya ia mengingatkan lewat obrolan atau candaan ringan. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi gejolak atau gesekan yang akan membuat hubungan politik menjadi retak antara politisi-politisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Caleg dan anggota legislatif yang baik, akan menjadikan dunia politik Indonesia menjadi lebih baik. Akan tetapi, ia menyayangkan dalam hal pemilihan kader sekarang ini berbeda dengan pemilihan caleg dahulu. Sekarang pemilihan kader caleg dipilih oleh masyarakat dan bukan lagi partai, hal tersebut sangat disayangkan karena masyarakat sekarang ini didominasi oleh masyarakat yang senang dengan money politik. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat memilih calon dengan berdasarkan uang, bukan kemampuan. Hal tersebut mempengaruhi partai dalam memilih kader calegnya, caleg yang memiliki uang lebih diperhitungkan karena memiliki kemungkinan besar menjadi legislator karena dipilih oleh masyarakat. Dengan demikian, partai pun akan lebih banyak memperoleh kursi. Padahal seharusnya jika menurut idealisme

calon kader harus memiliki banyak keunggulan, seperti akhlak yang baik, memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, dan dekat dengan masyarakat.

Kiai lain yang terjun ke politik adalah K.H. Yusuf Chudlori (Gus Yusuf). Tetapi berbeda dua politikus sebelumnya yang memilih menjadi legislator, Gus Yusuf menolak untuk menikmati jabatan baik di legislative maupun eksekutif. Ia lebih memilih hanya bergiat di partai dan mengontrol kader yang ada di legislative maupun eksekutif. Pilihannya untuk masuk ke dunia politik juga didorong oleh khazanah intelektual klasik, terutama oleh al-Ghazali dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* yang menerangkan bahwa agama dan politik adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan sebagai penjaga. Oleh sebab itu ia ingin turut andil dalam menjaga Islam terutama *ahlusunnah wal jamaah* disamping peran ia sebagai seorang kiai yaitu pendidik agama Islam.

Meskipun persepsi masyarakat tentang politik buruk dan banyak yang menilai politik hanya dijadikan kendaraan mencari uang, akan tetapi Gus Yusuf ingin membuktikan bahwa dalam dunia politik masih ada yang memperjuangkan agama dan moral. Bahkan setelah 20 tahun ia berkecimpung dalam dunia politik ia sama sekali belum pernah menjadi caleg dan ia hanya ikhlas memperjuangkan agama Islam. Ia juga yakin bahwa di daerah perkampungan masih banyak kiai yang ikhlas memperjuangkan agama lewat politik tanpa pamrih. Gus Yusuf menuturkan bahwa ia hanya satu contoh dipermukaan saja akan

tetapi di belakang ia masih ada ribuan kiai yang ikhlas memperjuangkan agama lewat politik tanpa pamrih. Akan tetapi pernyataan dari segelintir orang yang anti politik inilah yang merusak citra politik dimata publik, terutama *framing* yang diciptakan oleh orde baru yang bertujuan agar masyarakat tidak memahami politik dan hak-haknya dalam politik hanya dikedar kewajiban saja. Maka dari itu kewajiban ia adalah menggugah kesadaran akan politik agar masyarakat melek politik terutama warga besar NU, agar NU tidak hanya menjadi penonton saja dalam percaturan politik di Indonesia.

Dengan jabatan ia saat ini sebagai ketua partai, akan membuka akses para kiai dan ulama menyampaikan pendapat kepada menteri atau presiden melewati ia. Tanpa ia harus masuk atau duduk dalam kursi kekuasaan dengan adanya kader-kader yang duduk di kursi kekuasaan maka peran pengawalan terhadap pemerintahan tetap bisa berjalan dengan efektif dan efisien, hal tersebut dikarenakan ia juga memiliki hak kekuasaan pengawalan sebagai ketua partai. Pengawalan Gus Yusuf terhadap para kiai yang masuk ke dalam dunia politik sangatlah ketat. Terutama para kiai yang menjadi pengasuh tunggal dalam sebuah pesantren dan pesantren tersebut sedang berkembang, maka ia akan melarang untuk menjadi caleg. Nah disinilah peran ia sebagai ketua partai selain menjaga partai juga menjaga keutuhan pesantren-pesantren demi agama Islam.

Untuk kualifikasi kiai yang bisa masuk dalam dunia politik, Gus Yusuf mensyaratkan dua hal, *pertama* seorang kiai harus memiliki *sense* politik atau pengetahuan tentang dunia



politik. *Kedua* adalah penguasaan tentang ilmu agama yang dijadikan dasar peran ganda kiai sebagai pengawal moral dalam dunia politik yang meskipun berada di dunia politik tapi tetap mengutamakan moralitas. Gus Yusuf tidak menomor satukan harta atau kepemilikan materi yang lebih untuk terjun ke politik. Hal itu dikarenakan dalam dunia politik yang paling utama adalah *power*. Baginya, *power* terbagi menjadi dua, yang pertama adalah *power* masa dan yang kedua adalah rekam jejak sosial yang baik dalam masyarakat. Apabila telah memiliki kedua *power* tersebut maka tidak perlu mengeluarkan banyak dana dalam politik karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada kita sudah tinggi. Jadi, seorang kiai yang akan berjuang ke politik tidak harus menunggu kaya dahulu, cukup memiliki *power* dalam masyarakat maka dia bisa berjuang di dunia politik.

Kiai lain di Jawa Tengah yang berkiprah di dunia politik adalah K.H. Khayatul Makki.<sup>67</sup> Ia mengawali karir politiknya di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dalam politikpun K.H. Khayatul Maki, S.H. menemukan berbagai macam ilmu yang membuat iman ia bertambah. Berbagai macam latarbelakang anggota dewan membuat tantangan sosok kiai untuk berjuang memperjuangkan kebijakan-kebijakan agar tidak keluar dari syariat Islam. Menurut ia, idealnya seorang legislator harus menguasai kitab *Adab al-Dunya wa al-Din* karya al-Mawardi agar kesan-kesan jelek terhadap para dewan atau politisi tersebut dapat diperbaiki. Minimnya pengetahuan peran mereka

---

<sup>67</sup> Wawancara pada 11 Juli 2019 di Kabupaten Banjarnegara

di legislative menjadikan mereka mudah di kendalikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ia mengakui bahwa di dunia legislative sangat banyak intervensi-intervensi yang memaksa kita untuk bersikap. Jadi, seorang legislator harus mempunyai pengetahuan yang mumpuni baik politik dari segi ilmu umum dan agama, jika tidak maka akan sesat dan terjerumus ke dunia yang kotor sama seperti persepsi masyarakat yang ada.

Semakin banyak orang Islam yang alergi terhadap politik, dan semakin sedikit orang Islam yang berpolitik, maka yang akan menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan adalah orang-orang kotor yang berkepentingan, ada juga berkepentingan merusak Islam. Akan tetapi Islam di sini juga bukan Islam untuk menang-menangan kalau Islam itu berkuasa maka semua hal harus berkesan Islami, apa-apa harus syariah. Ia menggambarkan dengan perumpamaan *ngarah iwak, ora buthek banyune*; para legislator harus mengawal kebijakan-kebijakan yang kontekstual mengarah ke syariah, tetapi bukan berarti harus menghilangkan kepentingan-kepentingan rakyat Indonesia yang majemuk agamanya. Jadi, seorang pemimpin juga harus pandai dalam mengayomi rakyatnya, agar tidak ada golongan yang tersakiti atau termaginalkan gara-gara tidak sama dengan golongannya dengan seorang pemimpin.

Bagi K.H. Khayatul Maki, untuk menjadi legislator yang baik dia harus berangkat dari Surat ar-Ra'd ayat 11 dimana Allah SWT tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Orang-orang berkemampuan akan menjadi pengobat kotornya dunia legislative di Indonesia,

karena dengan munculnya saja, lebih-lebih bisa mendominasi kursi legeislatif akan mengalahkan legislator-legislator yang kotor dan korup. Melanjutkan pembicaraan tentang kualifikasi calon legislator ideal,. menambahi bahwa seorang legislator harus mapan dalam urusan ekonomi, agar tidak ada istilah korupsi dalam pemerintahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal yang menjadi syarat menjadi legislator ideal, kemampuan berpolitik secara umum atau bisa disebut SDM yang mumpuni, keadaan spiritual yang baik, dan kondisi ekonomi yang mapan.

Sosok kiai lain yang aktif di politik adalah K.H. Nasrudin<sup>68</sup>. Berbdeda dari empat kiai sebelumnya yang berkiprah dalam pondok pesantren salaf, ia lebih memilih mengelola pondok pesantren modern. Menurutnya, dalam berpolitik ada dua hal yang harus dikuasai. *Pertama*, adalah ilmu lobi. Ia juga mengakui bahwa karena kemampuan lobi tersebut ia bisa menjadi ketua dewan walau partai yang ia tempati hanya mempunyai beberapa kursi di dewan pada waktu itu. Kematangan ia di Ansor dapat ia gunakan untuk mengambil suara anggota dewan dari partai PKB yang pada waktu itu perolehan kursinya lebih banyak. *Kedua*, politik adalah manipulasi, jika seorang politikus tidak tahu tentang manipulasi, maka dia tidak akan bisa berjuang, bahkan dengan mudah akan disingkirkan oleh anggota dewan lainnya. Jadi dua kemampuan tersebut harus dimiliki seseorang untuk terjun ke politik, jika tidak maka dia akan menjadi *floating mass*, apalagi

---

<sup>68</sup> Wawancara pada 25 Juli 2019 di Kabupaten Brebes

memperjuangkan sebuah kepentingan partai atau golongan, pasti dia tidak akan memiliki power untuk melakukannya.

Pada tahun 2009 sampai 2014, K.H. Nasrudin, S.H. melanjutkan perjuangan ia di kursi dewan, akan tetapi pada rentan tahun tersebut ia maju di DPR RI. Pada jabatan ini K.H. Nasrudin, S.H. memperjuangkan UU Ma'had 'Aly agar diakui dan disamakan statusnya dengan perguruan tinggi. Dengan kemampuan lobi ia, walau dari partai Golkar, ia memasang badan ia untuk tetap berjuang dalam ranah agama khususnya NU. Akhirnya UU yang berkaitan erat dengan pondok pesantren ini bisa lolos dan menjadi UU No. 12 Tahun 2012. Secara resmi Ma'had 'Aly diakui statusnya dalam wilayah pendidikan nasional. Selain UU Ma'had 'Aly ia juga memperjuangkan UU tentang Madin, lagi-lagi sangat kental rasa NUnya. Disini ia memperjuangkan kesejahteraan guru-guru Madin. Menurut ia, Madin itu lahir jauh sebelum pendidikan formal di Indonesia ini lahir. Madin sudah ikut serta membangun generasi Indonesia, kenapa sampai sekarang masih terkatung-katung. Hal tersebutlah yang membuat ia memperjuangkan UU Madin ini. Ia berharap, UU ini dapat lolos juga, agar kesenjangan guru-guru Madin dan sekolah formal dapat teratasi.

Pondok Pesantren al-Falah yang didirikan oleh ayah K.H. Nasrudin, S.H. ini adalah bukti bahwa peran Madin sudah lama ada. K.H. Nasrudin, S.H. juga merintis dan memperjuangkan adanya Porsadin, baik dari tingkat kecamatan sampai halaqoh nasional. Hal tersebut tidak lain adalah wujud perjuangan ia dalam memperjuangkan Madin dan Ponpes. K.H. Nasrudin,

S.H. juga menambahkan bahwa jika kesejahteraan guru-guru agama yang ada dibaris terdepan dalam membendung Wahabi tidak difikirkan, maka barisan itu akan semakin melemah bahkan goyah, sehingga wahabi akan dengan mudahnya masuk ke Indonesia. Dalam membentengi NKRI, K.H. Nasrudin, S.H. berharap NU bisa berada dibaris paling depan. NU tetap menjadi jamiyah yang terlepas dari politik, tetapi NU harus punya wadah politik untuk masuk ke pemerintahan dan berjuang untuk NKRI yang sekarang ini mulai akan diabrak-abrik.

Walupun anggota dewan dari partai Golkar, K.H. Nasrudin, S.H. tetap berjuang di ranah keagamaan khususnya NU. *Assiyasah juz`un min ajzaisyari`ah*, keberadaan ia dalam partai Golkar tidak luput dari kepentingan ia untuk mengawal partai Golkar agar tidak dikuasai orang-orang yang melenceng dari ajaran agama. K.H. Nasrudin . adalah *agen of control* di partai Golkar, sehingga ia tidak mau berpindah dari Golkar ke partai yang memang mengusung agama didalamnya seperti PKB, PPP, dan PAN. Ia mencontohkan peristiwa perang uhud, dimana pasukan kalau tidak ada yang mengawal pasti akan melenceng dari ketentuan yang semestinya mereka patuhi.

Peran Kiai sebagai penanggung jawab moral dan akhlak secara kasapmata bertabrakan dengan politisi yang kotor, licik, dan korup. Dua kali menjadi anggota dewan di Kabupaten Brebes, bahkan menjadi wakil ketua dan ketua, ditambah menjadi DPR RI tidak merubah siapa K.H. Nasrudin. sejatinya. Ia tetap keturunan Kiai bersih dan seorang yang bersih dari

segala masalah yang sering menjerat politisi-politisi Indonesia. K.H. Nasrudin, S.H. menuturkan bahwa hal tersebut kembali ke pribadi masing-masing. Kalau dipukul rata, bagaimana partai Golkar yang terkenal dengan KKNnya? Semua kembali ke pribadi masing-masing, buktinya adalah K.H. Nasrudin, S.H., walau ia adalah politisi kawakan Golkar, akan tetapi citra Kiai dan karisma ia tetap ada, dihormati masyarakat, dipercaya masyarakat, untuk menjadi panutan bagi anak-anak mereka. Ia menuturkan bahwa pribadi ia yang seorang anggota dewan sama sekali tidak pernah ribut proyek dan sangat menjaga *muruh*. Ia tidak pernah melakukan sesuatu yang dirasa tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang anak Kiai, apalagi ia sudah mempunyai pondok pesantren sendiri.

Kiai berpolitik itu adalah sebuah kodrat, apalagi Kiai NU. K.H. Nasrudin, S.H. menjelaskan bahwa NU lahir sebagai partai politik, berbeda dengan Muhammadiyah. Itu bisa dilihat dari banyaknya Kiai-kiai NU dahulu yang menjadi politisi, seperti K.H. Wahab Hasbullah, K.H. Wahid Hasyim, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena adanya gerakan purifikasi oleh wahabi sekitar tahun 1895, yang pada waktu itu Hadratusyaikh K.H. Hasyim Asyari masih belajar ilmu di Makkah dan gerakan nasionalisme untuk kemerdekaan Indonesia. Sehingga NU lahir itu sudah berkepentingan politik, politik untuk kemerdekaan Indonesia dan sekaligus masuk ke pemerintahan untuk membendung faham Wahabi masuk ke Negara Indonesia. Jadi, kalau sekarang dikabarkan Wahabi akan mencoba masuk ke Indonesia, sudah sepatutnya warga NU berada dibarisan paling depan untuk

menghadangnya. K.H. Nasrudin, S.H. menekankan bahwa para Kiai harus mengawal betul negara Indonesia, lebih-lebih harus masuk ke pemerintahan. Jika Indonesia dikuasai oleh orang-orang tidak faham sejarah dan tidak bertanggung jawab, yang akan terjadi Indonesia akan diperlakukan seenak mereka dan digunakan demi kepentingan-kepentingan yang tidak menguntungkan Rakyat Indonesia dan Indonesia.

Kiai lain lagi yang berpolitik adalah K.H. Yazid Mahfudz<sup>69</sup>. Ia adalah kiai yang masuk pada jajaran eksekutif, tepatnya sebagai Bupati Kebumen. Begitu masuk dalam jajaran eksekutif, ia memutuskan untuk meninggalkan kepengasuhan di pesantren untuk fokus mengelola wilayah. Ia meyakini bahwa ketika di pesantren santrinya hanya berjumlah ribuan, setelah menjadi bupati “santrinya” menjadi berjumlah jutaan. Oleh karena itulah, ia menyerahkan sepenuhnya kepengasuhan pesantren pada saudaranya.

Karir politiknya, dimulai dari pengalaman Gus Yazid di beberapa organisasi, Riwayat organisasinya sebagai salah satu pengasuh dari pondok pesantren Al-Huda Jetis, kemudian ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) di kabupaten Kebumen dan provinsi Jawa Tengah, yaitu sebuah lembaga dari Nadhlatul Ulama (NU) yang berkaitan dengan pondok pesantren. Sempat juga pernah menjadi ketua dari Dewan Tanfidz DPW Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Jawa Tengah. Kemudian

---

<sup>69</sup> Wawancara pada 13 September 2019 di Kabupaten Kebumen

dari PKNU kembali ke PKB dengan menjadi Wakil ketua Dewan Syuro DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah.

Gus Yazid mulai dikenal banyak orang ketika itu tahun 2004 mencalonkan diri menjadi DPRD tingkat provinsi di Jawa Tengah melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kemudian ikut mendirikan PKNU tahun 2007 walaupun nantinya di tahun 2014 kembali ke PKB. Lewat PKB juga Gus Yazid menjadi Wakil Bupati periode 2016-2021. Selanjutnya menjadi Bupati setelah Bupatinya terkenan kasus korupsi.

Gus Yazid dalam ranah politik sudah tidak asing lagi untuk didengar kalangan masyarakat Kebumen, beberapa pesta kampanye yang terlaksana di awal tahun 2000-an sampai sekarang seringkali Gus Yazid terlibat disitu. Nampaknya kiai dan politik di Indonesia tidak bisa dilepaskan, hal itu diperkuat ketika KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga seorang kiai pernah menjadi presiden di republik ini.

Kiai yang terjun di dunia politik atau siapapun yang terlibat didunia politik pasti mempunyai pemikiran tersendiri, termasuk Gus Yazid yang juga mempunyai beberapa statement tentang politik yang ia lakoni. Gus Yazid dalam pemikirannya tentang politik dianggap oleh beberapa kalangan sangat kontroversi. Perpolitikanya menurut saya seperti seorang santri yang patuh terhadap kiainya dan harus mengikuti jejak perjuangan kiai yang ia anggap sepaham. Seperti penegasan dalam kata-katanya: *“Saya hanya nderekke kiai sepuh”*.



Kata-kata diatas jelas menunjukkan visi dan orietntasi politik dari Gus Yazid adalah mengikuti perjuangan guru-guru terdahulu yang harus dilaksanakan. Sifat tegas *“sami’na wa ato’na”* diterapkan dalam pemikiran dan mengalahkan ideologi apapun. Ketaatan, ketawa’duan seorang Gus Yazid terhadap kiai-kiai sesepuh terlihat jelas dipemikiran politiknya. Menurut Gus Yazid bahwa: *“Hanya PKB partai yang garis perjuangannya sama dengan NU dan selalu konsisten mengajarkan nilai ideologi ahlu sunnah wal jama’ah. PKB adalah rumah yang sah, aman dan nyaman untuk warga NU. Karena hanya PKB, partai yang lahirnya dari rahim NU”*,

Gus Yazid pernah terpilih menjadi DPRD tingkat provinsi Jawa tengah melalui fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada periode 2004-2009. PKB merupakan partai yang berbasis NU, *ahlu sunnah wal jamaah*. Gus Yazid pada saat itu berposisi sebagai salah satu pengasuh dari pondok pesantren Al-Huda, disamping itu ia juga menjabat sebagai ketua RMI kabupaten Kebumen dan Juga RMI Jawa Tengah.

Posisi sebagai seorang Kiai menjadikanya sering berkunjung ke beberapa pengajian masjid maupun pondok pesantren, disisi lain saat itu Gus Yazid menjadi ketua dari RMI (Rabithah Ma’ahid Islamiyah) yang bertujuan untuk mengajak masyarakat masuk ke pendidikan pondok pesantren, seruan itu biasa disebut “Ayo Mondok”. Melalui RMI, Gus Yazid dikenal di kalangan masyarakat, yang kemudian menjadi salah satu sebab dan usaha terpilihnya menjadi DPRD tingkat Jawa Tengah periode 2004-2009.

Pada masa akhir periodenya di DPRD tingkat provinsi, Gus Yazid menjadi salah satu pelopor berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), bersama beberapa tokoh lainnya seperti K.H. Ma'ruf Amin, KH. Muchosis Nur, dan Gus Lutfi. Tujuan dari partai ini adalah sebagai wadah politik bagi para ulama, dan memberikan kecintaan kepada tanah air. Namun, partai ini tidak berlangsung lama, karena beberapa kali terjadi konflik internal. Tokoh dari partai ini satu persatu keluar hingga partai PKNU sekarang terbelakang. Begitupun juga Gus Yazid yang keluar dari PKNU di tahun 2014 dan kembali lagi ke PKB.

Ia menyatakan bahwa sebagai warga negara, saya punya hak politik. Siapapun punya hak politik, yang penting masih menjadi WNI, maka dia boleh memilih dan boleh dipilih, termasuk seorang kiai. Oleh karena itu terjun ke dalam dunia politik adalah suatu keniscayaan karena kiai yang aktif di partai politik, khususnya PKB memiliki tugas untuk menjaga NKRI. Dalam hal ini, ia pernah menjadi Deklarator PKB di Ciganjur, Jakarta bersama Gus Dur, kemudian menjadi Wakil Ketua Dewan Syuro PKB Propinsi Jawa Tengah. Para kiai, termasuk KH. Mafruf Amin, juga terjun ke dunia politik, karena ia termasuk pendiri PKB, selanjutnya terpilih sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Pilihan Presiden tahun 2019. Secara pribadi, dia mengakui bukanlah kiai sebab kiai gak boleh marah, sehingga lebih pas dipanggil Gus saja, tanpa gelar kiai dan kesarjanaan yang melekat.

Sejak era reformasi, tahun 1998, Gus Yazid Mahfudh ikut tim 9 untuk mendirikan PKB Kebumen dan deklarasinya bertempat di pondok pesantren al-Huda, Kebumen, milik ayahnya, KH. Mahfudh Hasbullah. Sebelum menjadi bupati Kebumen, ia pernah menjadi anggota DPRD Tingkat I Propinsi Jawa tengah dari Fraksi PKB. Selama menjadi anggota DPRD ini, ia pulan pergi atau riwa riwi Kebumen Semarang dan Semarang Kebumen. Setiap jumat sore, ia pulang ke Kebumen untuk bertemu dan bercengkerama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Kemudian, Senin pagi harus kembali ke Semarang untuk bertugas dalam bidang legeslasi di fraksi PKB DPRD tingkat I Jawa Tengah. Selain itu masih ikut serta mengajar di pondok pesantren Al-Huda Kebumen, terutama di bulan-bulan Romadhon. Malahan sering juga isi pengajiannya melalui penggunaan Hand Phone (HP) sebab mayoritas santri juga memiliki HP.

Ketika bursa pemilihan bupati Kebumen di tahun 2015. Saat itu Gus Yazid menjadi calon wakil dan dipasangkan dengan Ir. H. Mohammad Yahya Fuad. Uniknya disini adalah Ir. H. Mohammad Yahya Fuad adalah ketua Muhammadiyah sedangkan Gus Yazid adalah tokoh dari Nadhlatul Ulama (NU). Perpaduan MD dan NU bukan menjadi masalah dan tampaknya menjadi salah satu pemersatu suara sehingga terpilihnya mereka menjadi Bupati dan Wakil Bupati di periode 2016-2021. Visi mereka “Bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan.

Sinergi keduanya menjadi kekuatan yang efektif untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan rakyat Kabupaten Kebumen sebab umat Islam di Kabupaten Kebumen adalah mayoritas beragama Islam, yang sebagian besar pengikut NU, dan sebagian lagi pengikut MD. Dalam hal ini ia menegaskan: “Sopo Sing Wani?”. Maksudnya, siapa yang berani dari calon-calon bupati lain untuk berkontestasi dan berkompetisi melawan sinergi kekuatan NU dan MD. Secara realitas, kedua pasangan bupati dan wakil bupati dari sinergi tokoh-tokoh NU dan MD lah memenangkan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Sejak menjadi Bupati Kebumen, ia sudah tidak aktif mengajar di Pondok pesantren tersebut, kecuali bulan Romadhon saja. Sebab dia harus fokus atas amanah yang diberikan rakyat Kebumen dan janji-janji selama kampanye untuk memikirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat Kebumen secara keseluruhan, tidak pandang bulu agama, ras, suku bangsa, dan kelompoknya. Sementara itu, tugas pondok pesantren Al-Huda diserahkan pada kakaknya, Gus Wahid.

Selain itu, ia juga berpikir dan berusaha secara keras dan optimal untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, memberi bantuan-bantuan pada rakyat Kebumen yang rumahnya tergolong tidak layak huni, termasuk juga mengambil kebijakan untuk membuat akses jalan sepanjang 80 Km dari waduk Sempor sampai Wadaslintang.

Ada dua Orientasi politik Gus yazid, yaitu: *Pertama*, berpijak dari hadits Nabi:”Sebaik baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Dengan terjun ke dunia politik, maka akan memberi manfaat sebanyak-banyak pada manusia, khususnya pada rakyat Kubumen secara keseluruhan. Melalui jalur politik, ia juga akan menebarkan berbagai kebaikan dan kebijakan di dalam politik praktis. Sementara itu, ia juga mengikuti jejak nabi dalam berpolitik yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri juga seorang Rasul, sekaligus sebagai Kepala Negara. Hal ini menunjukkan bahwa relasi agama dan politik tidak bisa dipisahkan.

*Kedua*, berdasarkan hadits Nabi bahwa “Setiap kamu adalah Pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun sebagai seorang Bupati memilik tanggung jawab berat, tetapi ia merasa senang dan bahagia karena memikirkan sekian banyak rakyat Kebumen demi untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat, sekitar 1.8 juta orang. Sementara jika menjadi kiai di pondok pesantren Al-Huda hanya memimpin sekitar 3.000 santri, dan umumnya setiap hari bertemu dan berkomunikasi dengan santri yang masuk kategori orang-orang baik. Hal demikian berarti bahwa memimpin sekitar juta rakyat Kebumen akan lebih bermanfaat dari pada memimpin pondok pesantren yang hanya 3000 santri. Dengan demikian, peran Bupati Kebumen lebih besar dari pada menjadi kiai pondok pesantren Al-Huda. Dia bilang, “Saya bukan orang pintar, tetapi saya mau belajar”. Maksudnya, ia

harus banyak mendengar, melihat, membaui dan berpikir, baru berbicara dan mengemukakan pendapat untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat Kebumen.

Dari pemaparan di atas bisa dilihat bahwa fenomena perbedaan perilaku sosial politik di kalangan kiai, dalam banyak hal, dipengaruhi oleh sekurang-kurangnya dua faktor. Pertama, faktor posisi sosial kiai, yang menurut studi-studi terdahulu, memperlihatkan adanya suatu kekuatan penggerak perubahan masyarakat. Kedua, faktor kekuatan personal yang diwarnai pemikiran teologis yang menjadi dasar perilaku yang diperankannya.<sup>70</sup>

Kiai mengemban amanah kekuatan kultural yang selalu mengingatkan para pemimpin, sekaligus menegaskan perannya untuk secara *etis-profetik* mengawal kepentingan umat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan fungsi-fungsi seperti itu, maka peran kiai akan tetap membumi di masyarakat. Pada akhirnya, moralitas kiai tidak menjadi sekedar bahasa *isoterik* belaka, tetapi dapat menjadi bahasa dan perjuangan politik demi mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian bagi umat. Walaupun pada akhirnya pembangunan, industrialisasi dan modernisasi dijadikan alasan keterlibatan berbagai elemen termasuk di dalamnya peran kiai, namun menjaga tradisi dan nilai-nilai hidup harus tetap menjadi program yang beringan,

---

<sup>70</sup>Miftah Faridl, "Perilaku Sosial Politik Kiai Di Tengah Masyarakat Transisi Kasus Di Wilayah Cirebon Dan Bandung", dalam *Al-Minbar*, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005, hal. 165.

agar tidak mengakibatkan eksese negatif yang harus diterima masyarakat.

Jadi, kiai yang tampak homogen itu, jika dicermati secara jeli ternyata amat variatif. Perbedaan itu diakibatkan oleh berbagai factor. Pertama, perbedaan dalam mempersepsi dan memahami ajaran Islam. Kedua, lingkungan di mana kiai hidup dan dibesarkan. Ketiga, kondisi ekonomui serta kondisi sosial politik. Akibatnya muncullah tipa-tipe kiai yang berbeda-beda dengan keterlibatan yang bebeda pula..

Secara sosiologis, kiai pada hakekatnya adalah sebuah institusi social yang secara sengaja di bentuk oleh masyarakat yang mempunyai tugas dan kewajiban tertetnu yang memberikan kekuatan penyeimbang bagi institusi yang lain.. Kendati demikian, bukan berarti bahwa person yang ada dalam lembaga itu selalu berada dalam suasana yang monolitik sifatnya. Artinya, masing-masingnya mempunyai dinamisitas dan kreativitasnya masing-masing. otang-orang

## **B. Implikasi Keterlibatan dalam Politik**

Sebagaimana telah diketahui secara umum bahwa kiai yang terlibat dalam dunia dan panggung politik tentu sangat menyita tenaga, fisik, daya, kekuatan, waktu dan dana yang tidak bisa terhitung jumlahnya sehingga mengandung berbagai implikasi terhadap tugas dan kewajiban sebagai kiai untuk melayani ummat, mengurus pesantren dan lembaga-lembaga lain. Jadi peran ganda kiai, baik dalam urusan keagamaan di

pesantren dan masyarakat, maupun dalam urusan politik praktis agak terganggu dan menjadi dilematis.

Keterlibatan kiai dalam partai-partai politik dengan sendirinya menjadikan mereka harus berkiprah guna memenangkan partainya. Di satu sisi hal ini akan membawa dampak positif karena dapat ikut serta memberikan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan umum. Namun di sisi yang lain, hal ini disinyalir juga memiliki dampak negatif karena mereka berperan untuk mempengaruhi umat memilih partainya. Hal ini tercermin dalam isu-isu sosial dan politik terutama dalam kasus pemilu.<sup>71</sup>

Keterlibatan kiai dalam politik selama ini kerap menimbulkan kontroversi. Di satu sisi, keterlibatan kiai dalam politik dimaknai sebagai sebuah dinamika politik pesantren yang mempunyai efek positif, karena akan mendorong terciptanya masyarakat yang partisipatif dan kritis, menggerakkan modal sosial publik untuk bersama membangun kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih baik dan mandiri, serta memberikan kebebasan terhadap setiap individu untuk mengekspresikan pemikiran dan tindakannya tanpa adanya kungkungan monopoli kebenaran mutlak. Hal ini disebabkan oleh setiap orang dimungkinkan memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Syamsul Rijal, “Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren”, dalam *Tadrīs Volume 9 Nomor 2 Desember 2014*”, hal. 204

<sup>72</sup> Ibid.



Secara umum pandangan dan respon masyarakat terhadap keterlibatan kiai dalam dunia dan panggung politik cukup bervariasi. Pertama, ada respon yang bersifat skeptis, seperti ungkapan dalam bahasa Jawa: “wis enak-enak dadi kiai kok malah urus politik”. Kedua, dulu para kiai yang terlibat aktif di panggung politik, para santri akan lari dan meninggalkan pesantren. Ketiga, sekarang ini berbeda zaman sesuai dengan perubahan sosial yang semakin kompleks sehingga banyak kiai dan warga pesantren yang ikut terjun pada dunia politik, tetapi santrinya semakin banyak jumlahnya, seperti pesantren Tambah Beras, Jombang, Jawa Timur. Keempat, biasanya dalam pencalonan bupati atau wakilnya dalam masyarakat NU di suatu daerah itu berawal dari pengusungan tokoh atau aktor PKB ke NU, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, yakni Gus Nung diusung menjadi calon wakil bupati dari ketua umum Tanfidziyah NU menjadi ketua PKB Jawa Tengah yang dilantik DPP PKB pada tahun 2015.

Mengingat keterlibatan kiai di pesantren berkurang dan tersita untuk mengurus dunia politik, maka Gus Nung<sup>73</sup> berpendapat bahwa porsi tugas dan kewajiban para ustadz yang membantu kepemimpinan kiai di pesantren harus diperbanyak dan dikordinasi secara kuat, mantap dan profesional. Selain itu, kiai harus memiliki moral dan keimanan yang kuat sehingga tidak dapat larut sistem politik yang hedonistik, materialistik,

---

<sup>73</sup> Wawancara pada 5 Juli 2019 di Kabupaten Jepara

dan pragmatis, tetapi kiai harus bisa memberikan warna dan nilai-nilai yang Islami.

K.H. Muhtarom<sup>74</sup> menuturkan tidak terlalu sulit dalam membagi waktu antara dunia politik dan mengurus pesantren. Hal tersebut dikarenakan dunia politik tidak terlalu menyita waktu. Justru ia kesulitan saat adanya kunjungan kerja ke luar kota yang mengharuskannya meninggalkan pesantren selama sehari-hari. Ia juga mensiasati hal tersebut dengan membuat rekaman pengajian pondok yang akan diajarkan selama tidak ada di pondok. Ia juga tidak jarang mengaji secara online melalui telepon suara ataupun video call yang disalurkan kepada seluruh santri. Selain pemanfaatan teknologi, K.H. Muhtarom juga memiliki 15 ustadz yang membantu dan menggantikannya ketika sibuk atau berhalangan hadir. Jadi, kegiatan pondok tetap berlangsung seperti biasa walaupun ia sedang berada di luar kota.

Lebih lanjut, K.H. Muhtarom menuturkan bahwa frekuensi membina masyarakat yang terkurangi. Hal tersebut dikarenakan waktunya bertabrakan dengan jadwal ia sebagai tokoh politik. Biasanya, K.H. Muhtarom mengadakan dzikir umum dengan masyarakat yang dilakukan *selapan* sekali, yaitu tepatnya pada hari minggu wage. Sekitar 200 masyarakat yang rutin mengikuti kegiatan tersebut. Ia juga berencana mengadakan jamaah manaqib yang akan diikuti pula oleh masyarakat. Selain menjadi tokoh penggerak dalam masyarakat,

---

<sup>74</sup> Wawancara pada 13 Juli 2019 di Kabupaten Pekalongan

K.H. Muhtarom juga mengisi pengajian-pengajian untuk menyiarkan agama Islam kepada masyarakat. Sebagai sosok kiai, K.H. Muhtarom tidak mau meninggalkan tugas sebagai pengayom dalam masyarakat. Disinilah peran ganda kiai yang sekaligus tokoh politik, tetap menjalankan tugas-tugas sebagai kiai, akan tetapi bisa ikut berjuang dalam wilayah politik untuk kemaslahatan agama dan masyarakat.

Dalam menilai seorang kiai yang sibuk dalam dunia politik, masyarakat berbeda pendapat. Ada yang mencibir, karena gelar kiai hanya digunakan sebagai harga jual dalam memenangkan pemilu. Ada yang menebak bahwa umur pesantrennya tidak akan lama karena tidak terurus. Setelah melihat dan mengetahui hal-hal apa saja yang sudah diperjuangkan oleh K.H. Muhtarom kebanyakan dari mereka menjadi memuji, bahwa ternyata tidak semua kiai memanfaatkan jabatan sebagai legislatif untuk kepentingan pribadinya sendiri. Apalagi jabatan legislatif digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Sedikit demi sedikit, kesan miring akibat kotornya dunia politik menjadi memudar akibat masuknya para kiai yang benar-benar berjuang dan ikut memperngaruhi para legislator lain untuk tidak berbuat kotor didalam dunia politik.

Peran kiai dalam politik sangatlah penting, mengingat politik berkaitan dengan masa dan kiai adalah pemegang masa tersebut. Masuknya kiai dalam politik sangat bermanfaat demi kesejahteraan rakyat. Disamping kiai mempunyai masa, kiai juga mempunyai power untuk mempengaruhi kebijakan, baik

secara langsung yang dilakukan oleh para kiai di legislatif dan tidak langsung yang dilakukan oleh Gus Yusuf dalam mengawal kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan. Sosok kiai juga sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, bekal spiritual yang baik akan secara langsung menjadi kontrol saat ada ajakan ataupun intervensi untuk melakukan kemaksiatan didalam menjalankan tugas sebagai legislator.

Masyarakat memandang bahwa masuknya kiai dalam urusan politik tidak lain hanya untuk mencari uang. Hal itu ditepis oleh Gus Yusuf. Hal itu dibuktikan ia, bahwa pondok pesantren yang diasuh ia tidak pernah menggunakan dana dari negara, baik itu APBD dan APBN. Gus Yusuf menegaskan bahwa seorang kiai pastinya sadar dan tahu bagaimana hukumnya korupsi dan memanfaatkan posisi yang merugikan masyarakat.

Adanya pro dan kontra dalam suatu masalah adalah suatu kemutlakan. Begitu juga dengan masuknya Gus Yusuf dalam politik praktis. Beberapa ada yang menilai negatif akan hal tersebut, karena akan menimbulkan perselisihan antar kiai yang berbeda pilihan. Contoh kecil dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah kemaren, dimana Gus Yusuf dan keluarga Simbah K.H. Maemoen Zubair berseberangan. Masyarakat awam akan menilai bahwa itu adalah sebuah ketidak cocokan dan perselisihan diantara kedua kiai karismatik tersebut. Akan tetapi masyarakat yang mengerti, akan menilai bahwa hal tersebut adalah sebagai upaya kiai dalam mengawal pemerintahan di

Jawa Tengah. Jika pihak simbah K.H. Maemoen Zubair yang menang, maka pemerintahan akan dikawal oleh kiai-kiai. Begitu juga dengan Gus Yusuf, jika pihak Gus Yusuf yang menang, maka pemerintahan juga akan dikawal oleh kiai-kiai. Mereka para kiai tidak berselisih, bahkan merapatkan barisan untuk mengawal pemerintahan agar tidak goyah dan dipegang oleh orang yang salah.

Untuk itu solusi yang ditempuh agar operasional pondok pesantren bisa berjalan dengan baik, ia membuat berbagai unit usaha seperti toko, rumah makan, sekolah bahkan rumah sakit. Pengelolaan berbagai unit usaha ini juga melibatkan para santri

Adanya implikasi dari aktifnya di dunia politik, juga dibenarkan oleh K.H. Khayatul Maki.<sup>75</sup> Namun ia mengakui justru mendapatkan banyak implikasi positif. Selama menjadi anggota dewan, ia bisa menolong orang-orang untuk melancarkan kepentingan mereka. Ia bisa membantu orang-orang yang terdholimi ditutup aksesnya untuk bisa sukses. Semua itu ia lakukan tanpa memandang siapa yang meminta bantuan kepada ia, asalkan dalam hal kebaikan, maka akan ia usahakan. Jika kursi legislator diduduki oleh orang-orang yang menjual tintanya, maka kapan rakyat akan sejahtera. Is juga menuturkan bahwa saat menjadi anggota dewan, ia banyak tahu tentang ilmu-ilmu baru, disamping ilmu politik dan peluang-

---

<sup>75</sup> Wawancara pada 11 Juli 2019 di Kabupaten BanjarnegarA

peluang lobi, ia juga menekankan bahwa Indonesia sangat butuh SDM yang baik untuk kursi legislatif, terutama SDM-SDM yang punya basic spriritual yang baik.

Posisi ia di DPRD Provinsi tidak digunakan ia untuk kepentingan kelompok ia apalagi kepentingan pribadi. Dalam hal ini adalah kepentingan pesantren ia dan pesantren keluarga ia. Ia memberi tahu bahwa pesantren ia sudah memiliki sumber ekonomi sendiri, pesantren mempunyai beberapa indomaret, alfamart, tambang bahan baku semen, perternakan, pertanian, dan perdagangan yang mumpuni. Jadi, jabatan anggota dewan ini sama sekali tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ia.

Respon negatif terhadap seseorang akan ditandai dengan dijauhinya dia oleh masyarakat, dan respon positif terhadap seseorang akan ditandai dengan semakin banyaknya orang yang mendekat kepadanya. K.H. Khayatuk Maki, S.H. membangun pondok pesantren saat ia masih menjabat sebagai anggota dewan. Dalam masa itu, pesantren yang bisa dibilang tidak bisa ia kawal setiap hari itu berkembang dengan pesat dengan sendirinya. Ini adalah suatu bukti bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap ia semakin tinggi. Bertambah santri dan jamiyah pengajian sudah cukup menjadi indikator bahwa posisi K.H. Khayatuk Maki, S.H. di politik direstui oleh masyarakat sekitar dan Jawa Tengah. Bersama dengan peneliti, beberapa tamu dengan tampilan dan dari etnis yang berbeda menjadi indicator ini

Masyarakat juga melihat adanya peningkatan jaringan pendidikan oleh K.H. Khayatul Maki yang ia gunakan untuk memajukan pendidikan di Banjarnegara. Kerjasama-kerjasama yang ia jalin untuk mengembangkan juga tidak bisa dianggap remeh. Pondok pesantren yang baru berusia 19 bulan sudah memiliki santri ribuan bukanlah sebuah prestasi yang begitu saja tanpa adanya sebuah pembuktian dari seorang yang mengedepankan bukti logis penganut thoriqoh Akmaliyah ini. Jadi posisi politik ia bisa dikatakan diapresiasi oleh masyarakat dan terbukti mempunyai pengaruh dan tujuan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi muda penerus bangsa.

Keterlibatan seorang kiai dalam politik tentunya masih menjadi polemik dan bahan pembicaraan masyarakat. Sosok kiai yang suci sangat bertolak belakang dengan politisi yang kotor. Masuknya kiai ke politik diharapkan mampu merubah citra kotor tersebut, sehingga yang akan muncul kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menjalankan misi yang tidak mudah ini, K.H. Nasrudin,<sup>76</sup> mengorbankan pondok pesantren yang masih ia rintis. Keterbatasan waktu ia untuk mengajar menjadi faktor yang paling mengganggu ia dalam mengembangkan pondok pesantrenya. Hal tersebut membuat K.H. Nasrudin, S.H. bolak-balik Jakarta-Brebes, bahkan ia harus menyiapkan ustadz-ustadz yang mampu dan siap menggantikan ia saat ia bertugas menjadi anggota dewan tersebut.

---

<sup>76</sup> Wawancara pada 25 Juli 2109 di Kabupaten Brebesk

Positifnya, saat K.H. Nasrudin. menjadi anggota dewan, ia dapat memanfaatkan posisinya untuk mengembangkan bangunan sekolah dan asrama pondok. Lebih-lebih ia dapat mensupport dengan menggelontorkan bantuan untuk para santri yang sekolah di situ. Sehingga dengan posisi tersebut, ia dapat mengembangkan sayap dalam berdakwah melalui pendidikan untuk menciptakan generasi-generasi yang mumpuni. Ia berharap dari pesantren inilah akan muncul legislator-legislator yang bersih, yang akan menggeser legislator yang korup dan merugikan rakyat dan negara.

Anggapan negatif masyarakat terhadap kiai yang berpolitik bertahap memudar. Kesadaran masyarakat bahwa kebrobokan anggota dewan harus segera diobati. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kiai atau ulama yang terjun ke politik semakin besar. Memang sebagian masyarakat menyayangkan bahwa dengan terjunnya kiai ke politik akan mengurangi karismanya sebagai sosok pengayom. Akan tetapi banyak kiai dan ulama yang sukses membuktikan bahwa perannya sebagai kiai yang notabennya adalah seorang panutan, membuktikan bahwa dia mampu mewarnai dunia politik dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat sesuai syariat. Keberhasilan itu membuat masyarakat yang semula pesimis dan berpandangan negatif menjadi semakin dekat dengan kiai. Berbondong-bondong mereka mendekatkan anaknya untuk belajar kepada kiai tersebut, seperti halnya yang terjadi pada K.H. Nasrudin



Sementara itu, transformasi dari seorang K.H. Yazid Mahfudh<sup>77</sup> yang telah memiliki modal sosial, kultural, ekonomi dan keagamaan bisa bergeser dari kepemimpinan pondok pesantren ke kepemimpinan sekuler, yakni menjadi Bupati Kebumen. Dalam rangka menjaga relasi antara kiai dengan nilai tradisionalnya dan tetap mengakomodasi nilai-nilai sekuler dalam birokrasi, Gus Yazid yang menjadi bupati, masih tetap mempertahankan posisi dan kekuasaannya, baik di organisasi kemasyarakatan (NU) maupun di partai politik (PKB). Dengan demikian telah terjadi pergeseran kultur birokrasi politik pemerintahan, dimana atribut-atribut keagamaan Islam diformulasikan ke dalam lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Kebumen. Pada gilirannya secara perlahan tetapi pasti terjadi berbagai implikasi politik sejak Gus Yazid menjadi Bupati Kebumen.

Ada tiga implikasi politik yang melekat padanya sewaktu menjadi anggota DPRD Tingkat I Jawa Tengah dan tatkala menjadi Bupati Kebumen hingga saat ini, yaitu: *Pertama*, ia adalah seorang eksekutif, yang bertugas sebagai eksekutor dalam kebijakan dan anggaran daerah (APBD). Misalnya, ia memberikan anggaran-anggaran untuk Musholla, Masjid, Pondok Pesantren, TPQ, Madrasah Diniyyah, Guru Tidak Tetap (GTT). Dalam hal ini, kebijakan ia adalah untuk memperhatikan dan menaikkan honorer para guru GTT, guru Madin, TPQ, bantuan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) pada pondok

---

<sup>77</sup> Wawancara pada 13 September 2019 di Kabupaten Kebumen

pesantren Al-Huda dan lainnya. Intinya, pondok pesantren dapat jeneng (nama) karena semakin populer dan dikenal raktat Kebumen, bukan semata-mata jeneng (dana). Secara rutinitas, juga memberi bantuan Rp.500.000.000,- untuk rehab masjid jami' di kabupaten Kebumen, Demikian juga bantuan-bantuan pada agama-agama lain selain umat Islam, seperti Gereja, Vihara, dan Klenteng.

*Kedua*, ia sering mendatangi pengajian-pengajian yang diselenggarakan oleh umat Islam, walaupun sekedar memberi kata sambutan dalam rangka Pengajian Hari-Hari Besar Islam, seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, 1 Muharrom (1 Suro), Nuzulul Qur'an, dan lainnya. Dalam kesempatan ini, ia tidak menggunakan bahasa agama, yakni pengajian yang bernuansa kiai. Tetapi member wejangan-wejangan dan mauidhah hasanah untuk ikut serta membat peencerahan dan mencerdaskan rasyarakat demi kemajuan rakyat Kebumen. Selain itu, ia juga bisa menitipkan pesan-pesan kebaikan, nasehat-nasehat yang utama lagi mulia, serta keteladanan bagi umat beragama melalui tokoh-tokoh beragama yang terhimpun dalam Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kebumen.

*Ketiga*, melalui Peraturan Daerah (Perda) Bupati, ia juga memberikan kontribusi sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen, serta slogan atau semboyan Kebumen beriman, yaitu membuat regulasi yang berkaitan dengan pencegahan kemungkar dan kemaksiatan, seperti Perda tentang Minuman Keras (Miras), Karaoke, perhotelan dan mucikari. Kesemuanya itu dikordinasikan dengan

Kormonfinda, legislative, yudikatif dan esekutif yang ada di wilayah kabupaten Kebumen.

Selanjutnya, implikasi praktis sosial dan politik dari Gus Yazid menjadi Bupati Kebumen secara langsung, insya Allah, akan menjauhi penyakit cinta dunia dan harta yang berlebihan, memburu pangkat dan derajat dunia, kedudukan dan kekuasaan semata, tetapi selalu bertanggung jawab dunia dan akhirat atas amanat dari rakyat Kebumen yang lebih dikenal dengan *political trust* atau kepercayaan politik dan dawuhe para kiai sepuh tingkat Jawa Tengah pada umumnya dan kiai sepuh dari tingkat Kabupaten Kebumen dan sekitarnya pada khususnya, terutama dari keluarga besar pondok pesantren Al-Huda, Jetis, Kauman, Kebumen.

Ketika seorang kiai terlibat dalam politik kekuasaan, maka akhirnya muncul juga sebutan kiai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat punya penilaian tersendiri tentang sosok kiai dengan segala perannya, atau juga untuk membedakan antara kiai yang terlibat politik dengan yang tidak terlibat. Disadari atau tidak, bahwa keterlibatan kiai dalam dunia politik menyebabkan semakin memudarnya kharisma seorang kiai di mata umatnya. Ekses negatif ini tentunya dirasakan oleh kiai yang terlibat dalam perpolitikan, akan tetapi hampir seluruh kiai menerima imbasnya. Para kiai yang tidak berpolitik pun merasakan lunturnya loyalitas yang dahulu sudah terpatri dan tertanam sangat kuat. Namun ada anggapan dari sebagian masyarakat yang menilai positif keterlibatan kiai dalam dunia politik, mereka berasumsi bahwa masuknya kiai dalam

percaturan politik diharapkan dapat menekan berbagai penyelewengan kekuasaan dan lebih mempermudah menjembatani persoalan-persoalan umat.<sup>78</sup>

Kehadiran Kiai ini diharapkan akan dapat memberikan kesejukan dan kedamaian serta dapat mendinginkan panasnya arus politik dan menjadi *moral force* dalam kehidupan perpolitikan dan jalannya pemerintahan di Indonesia. Disisi lain ada sebagian masyarakat yang mengharapkan peran kiai berperan lebih signifikan agar dapat mengatasi persoalan-persoalan dan krisis yang terjadi di Indonesia. Sebagian kiai punya peran ganda sejak dulu itu sudah ada, lalu apakah saat ini peran ganda tersebut kemudian menjadi persoalan?

Sebaliknya, peran ganda kiai dalam dunia politik dinilai telah menyalahi koridor dan flosaf masyarakat. Bagi sebagian kiai yang masuk dalam ranah politik, bahwa keterlibatannya bukan tanpa alasan, karena faktor historis cukup kuat untuk seorang kiai untuk harus terlibat dalam politik, bagi mereka Nabi Muhammad SAW adalah sosok negarawan sebagai kepala Negara, dimana dalam tugas sucinya adalah sebagai pembawa risalah. Demikian juga Keterlibatan kiai dalam pentas politik di Indonesia sejak, dimana sejak zaman Kesultanan Mataram dan pada masa penjajahan Belanda, kiai mempunyai peranan penting dalam perjuangan Hizbullah dan Sabilillah dimana pesantren menjadi tempat pelatihan para pejuang. Demikian

---

<sup>78</sup> **Hasanatul Jannah**, “Kiai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan’, dalam *Fikrah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, hal. 157.

juga dalam perjuangan kemerdekaan, para kiai banyak terlibat memperjuangkan meraih kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut berarti, secara ideologis ajaran Islam melingkupi tidak hanya pada aspek ritual dan moral saja, tetapi juga pada nilai-nilai semua sisi kehidupan – baik dalam ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, sosial, maupun persoalan politik.

Kiai sah-sah saja berpolitik, namun tidak diorientasikan pada kekuasaan, melainkan menanamkan nilai-nilai moral untuk pencerdasan dan penguatan umat dan masyarakat. Dalam konteks ini, kekuasaan dipahami sebagai kualitas, kapasitas atau modal untuk mencapai tujuan tertentu dari pemilikinya. Foucault tidak menolak cara pandang semacam ini, tapi hal itu tidak cukup untuk memahami praktik penundukan yang tak kasat mata. Pandangan yang lebih kritis tentang kekuasaan muncul dalam kajian budaya. Konsep Gramsci tentang hegemoni sering digunakan untuk membongkar kemapanan budaya dalam proses dominasi yang terselubung. Dalam penjelasan yang lebih canggih, kekuasaan bekerja melampaui cara-cara hegemonik, yang mana hal ini dikonsepsikan Foucault sebagai *governmentality*.

Peran elit kiai menjadi sangat signifikan sebagai *institutional builder* atau pendorong pengembangan institusi politik dengan aktivitas yang terkonsentrasi pada sistem internal partai. Kekuasaan dan sumber kepercayaan yang melekat pada diri seorang elit kiai akan menjadi baik jika tertransformasi sebagai kekuatan institusi yang pada gilirannya menjadi sarana

percepatan demokrasi di aras nasional maupun di aras lokal melalui implementasi otonomi daerah.<sup>79</sup>

Kiai bisa saja bergerak dalam bidang dan profesi apapun, namun standar yang harus selalu dipegang adalah moralitas dan penegakannya. Jika politik sekarang dipahami sebagai lahannya para koruptor, maka kiai yang berpolitik dituntut untuk merubah perspektif tersebut. Kiai harus mampu menegakkan moralitas dikalangan politikus. Kiai harus mampu mewarnai wilayah politik dengan tugas-tugas agung yang diembannya sebagai seorang kiai.

Dalam pandangan fungsionalisme, seluruh kelompok masyarakat sesungguhnya melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan perannya masing-masing. Semuanya memang telah dikehendaki sedemikian rupa oleh lingkungan sosialnya untuk menjaga keseimbangan. Para fungsionalis berpikir bahwa masyarakat pada awalnya disusun oleh individu yang ingin memenuhi kebutuhan biologisnya secara bersama, namun akhirnya berkembang menjadi kebutuhan-kebutuhan sosial. Kelanggengan kolektif membentuk nilai masyarakat dan dengan nilai inilah masyarakat tetap seimbang .

Para penganut fungsionalisme melihat masyarakat ibarat sebuah organisme, makhluk hidup yang bisa sehat atau sakit. Ia sehat jika bagian-bagian dari dirinya memiliki kebersamaan satu sama lain. Jika ada bagiannya yang tidak lagi

---

<sup>79</sup>Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri Dari Kiai Menjadi Bupati*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 72.

menyatu secara kolektif, maka kesehatan tersebut akan terancam. Akhirnya, ia jatuh sakit. Jadi dalam pandangan fungsionalisme, apa yang dipandang sebagai sebuah bentuk kesenjangan dan merupakan kekeliruan dalam pandangan teori yang lain, adalah sebuah kemestian karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Adanya para pemulung, misalnya, yang dinilai sebagai bentuk kesenjangan, sesungguhnya adalah sebuah bentuk yang niscaya karena justru keberadaan mereka dibutuhkan untuk membersihkan lingkungan dari sampah anorganik yang tidak bisa diurai oleh alam.

Oleh karena itu, dalam perspektif fungsionalisme, keberadaan kiai memang amat sangat diperlukan. Ketika kehidupan di berbagai sektor sudah tidak lagi mengindahkan nilai moral, ketika kehidupan di berbagai sektor sudah lebih mengedepankan prinsip *to have more and to use more* tanpa mengindahkan bagaimana memiliki dan menggunakannya, maka keberadaan kiai untuk mengendalikan agar kehidupan kembali kepada rel atau jalan yang semestinya bisa berjalan dengan baik.

Sosok kiai sangat dibutuhkan dalam wilayah-wilayah yang dipandang kotor. Wilayah yang tidak seharusnya kiai jangkau sekarang menjadi tidak terurus dan kumuh, begitulah analogi yang sesuai. Kiai harus mulai melangkah ketempat-tempat tersebut. Pada awal pemerintahan Indonesia wilayah tersebut dikuasai oleh kiai, seiring berjalannya waktu terjadi dikotomi dan pemisahan tugas yang mengakibatkan wilayah tersebut dikuasai oleh orang-orang yang salah. Hadirnya kiai

dengan tugas kenabiannya harus turun tangan dan merubah keadaan. Menjalankan tugas sebagai politikus sekaligus berjuang untuk membangun moralitas yang dilupakan oleh politikus-politikus Indonesia.

Dalam kultur Jawa, istilah “kiai” pun telah dipakai sebagai penyebutan tokoh yang dianggap memiliki kelebihan dalam persoalan mistik. Pada tingkatan prinsip dasar yang melekat pada pribadi orang Jawa kebanyakan saja, persoalan tatanan dan penghormatan posisi dalam kehidupan sosial adalah hal yang sangat penting.<sup>80</sup> Namun jika simbol kiai yang sakral dan sangat dihormati oleh umat menjadi hilang begitu saja karena terlibat dalam permainan politik dan kekuasaan itu menjadi persoalan, maka dalam politik kiai akan memainkan peran moral yang terkait dengan kepentingan umum ke berbagai saluran politik, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian peran kiai dalam partai politik dapat dimaknai sebagai ikhtiar untuk membangun penataan masyarakat secara efektif. Terlibat dalam dunia politik merupakan bentuk partisipasi yang berhubungan dengan negara, sebab politik merupakan segala sesuatu yang bersinggungan dengan masyarakat secara luas dalam usahanya untuk membangun masyarakat.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 42.

<sup>81</sup>Lihat Achmad Patoni, *Peram Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 49.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelaahan terhadap data-data yang ada dapat disimpulkan bahwa:orientasi politik para kiai berbeda antara satu dengan lainnya, baik yang berkaitan dengan pemilihan partai politik maupun orientasi dalam berpolitik.

Pada dasarnya orientasi kiai sangat dipengaruhi oleh adanya paradigma politik kiai yang secara keseluruhannya meyakini bahwa antara agama dan politik adalah tidak bisa dipisahkan. Agama dan politik adalah dua sisi mata uang yang selalu seiring sejalan. Agama merupakan fondasi yang memberi prinsip-prinsip etis agar praktik kepolitikan tidak menyimpang; sedangkan politik merupakan media bagi penerapan nilai agama agar lebih efektif. Kiai meletakkan agama sebagai orientasi awal yaitu semangat untuk memberikan nuansa dan warna dan moral keislaman dalam kepolitikan. Namun demikian bukan berarti diperlukan adanya formalisasi syariah. Di samping orientasi yang demikian, juga tidak bisa dipungkiri adanya orientasi ke arah kepentingan pragmatis turut menggerakkan mereka.

Adanya orientasi di atas pada gilirannya mewujud dalam orientasi pilihan terhadap partai politik yang ada.. Pertama, orientasi keagamaan yaitu berkaitan dengan agama sebagai identitas, Islam atau tidak Islam; ideologis yaitu berkaitan dengan kutub-kutub pemahaman atas suatu keyakinan tertentu

dalam kelompok yang sama; dan kebangsaan yang berusaha menghilangkan sekat-sekat pembatas baik berupa agama maupun ideologi.

Sebagai sebuah aktivitas yang cukup menyita waktu, tentu saja waktu yang tersedia untuk melakukan proses pendidikan kepada santri dan masyarakat secara luas menjadi berkurang. Akan tetapi, ketika dipahami bahwa dunia politik adalah ruang lain untuk melakukan pendidikan moral, maka sejatinya kiai tidak mengalami perubahan dalam proses pendidikan kepada masyarakat. Dengan kata lain, sebenarnya mereka telah melakukan proses penyilangan dengan baik. Pada masyarakat politik, ia mendidik moralitas para politikus. Sedangkan pada masyarakat luas, bersamaan dengan pendidikan moral keislaman juga bisa memberikan pendidikan politik. Berdasarkan ini maka varian politikus dalam menyikapi peran ganda ini menjadi terkategori ke dalam tiga kelompok besar. Pertama, kiai yang memperkuat peran di ranah politik, baik sebagai legislative maupun eksekutif, akan tetapi tidak melepaskan peran keagamaan. Kedua, kiai yang tetap memilih peran keagamaan lebih utama kendati mempunyai peluang yang sangat terbuka untuk ikut mengambil posisi baik di legislative maupun eksekutif. Mereka memainkan peran control terhadap jalannya kepolitikan melalui partai dimana mereka berada. Ketiga, kiai yang lebih menitikberatkan kepada peran politik dan meninggalkan jalur kepesantrenan. Muatan-muatan moral keagamaan ia laksanakan melalui peran-peran resmi dalam dunia politik.

Varian-varian peran ganda ini tentu saja membawa implikasi. Sejalan pengamatan peneliti implikasi dari adanya peran ganda kiai adalah implikasi yang positif. Artinya, dengan adanya peran ganda yang dilakukan kiai membawa perkembangan dan kemajuan bagi pembangunan pesantren dari yang semula suatu wilayah belum mempunyai lembaga pendidikan agama pada akhirnya menjadi mempunyai; peningkatan sarana prasarana pesantren; lahirnya perda-perda yang bernuansa keagamaan dan sebagainya. Walau pun demikian, implikasi negatifnya juga ada yaitu berkurangnya intensitas peran untuk mendidik santri dan masyarakat. Menyadari kondisi yang demikian, kiai yang bergerak di dunia politik telah berusaha mengantisipasi dan membuat solusi yang relatif baik.

## B. Saran-saran

Demikianlah penelitian yang telah peneliti lakukan. Ada beberapa saran yang bisa dikedepankan di sini:

1. Kendati para kiai yang terjun ke politik telah melakukan peran memajukan pesantren dan lingkungannya, namun mereka tetap adalah kiai yang oleh masyarakat diposisikan sebagai pengawal moral. Oleh karenanya, mereka harus tetap menyadari bahwa masyarakat sangat memperhatikan dan mengkritisi mereka. Sebagai figure sentral seharusnya menempatkan dalam posisi yang tepat dalam politik dengan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terkontaminasi dan terkooptasi oleh kekuatan yang lebih besar yang membelokkan dari fungsi utamanya.

2. Penelitian ini adalah sebagian kecil saja dari belantara penelitian tentang kiai dan pasti masih banyak celah yang bisa dimasuki seperti pola-pola relasi kiai yang berbeda orientasi, kontestasi antar kiai misalnya..

Semoga memberikan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad Patoni, *Peram Kiai Pesantren dalam Partai Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah, *Propinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2018*

Bahrul Ulum, *Ulama dan Politik Nalar Politik Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik* (Jogjakarta: Indie Book Corner, 2011.

Clifford Gertz. *The Religion of Java*. New York: The Free Press Glencoe. 1960.

Deliar. Noer. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1980.

Harry. J. Benda. *Bulan Sabit dan Matahari terbit: Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1980.

Harold D Lasswell dan Abraham Kaplan. *Power and Society*. New Haven, Yale University Press, 1950.

Hasanatul Jannah, "Kiai, Perubahan Sosial Dan Dinamika Politik Kekuasaan", dalam *Fikrah*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015

Heddy Shri Ahimsa-Putra, Paradigma Ilmu Sosial-Budaya: Sebuah Pandangan dalam [https://www.academia.edu/13802211/PARADIGMA\\_ILMU\\_SOSIAL-BUDAYA](https://www.academia.edu/13802211/PARADIGMA_ILMU_SOSIAL-BUDAYA)

Horton Hunt. *Sociology*. McGraw-Hill, 1972

Hiroko Horikoshi. *Kiai dan Perubahan Sosial*. Jakarta, P3M, 1977

Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*. Malang: Setara Press, 2009.

Irving M. Zeitlin. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gadjag Mada University Press, 1986.

Jim Schiller. *Developing Kabupaten Jepara, State and Society in New Order Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute, 1996.

Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1986

Koirudin. *Politik Kiai Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis*. Malang, Averroes Press, 2005.

Khairo Ummatin. *Prilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Lewis Coser dan Bernand Rosenberg (Ed), *Sociology theory: A Book of Readings*. New York: The Macmilan. 1967.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1997.

M. Fajrul Falakh. *Pesantren dan Proses Sosial Politik Demokratis*. Bandung: Pustaka Hidayah. 1999.

Mahrus Irsyam. *Ulama dan Partai Politik, Upaya Mengatasi Krisis*. Jakarta, Yayasan Perkhidmatan, 1984.

Margareth M. Poloma. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali, 1987

Meredith B. McGuire. *Religion: The Social Context*. California: Wadsworth Publishing Company, 1981.

Moh Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Miftah Faridl, “Perilaku Sosial Politik Kiai Di Tengah Masyarakat Transisi Kasus Di Wilayah Cirebon Dan Bandung”, dalam *Al-Minbar*, Volume XXI No. 2 April – Juni 2005.

Miriam Budiharjo,., *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 1992.

-----, *Demokrasi di Indonesia*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994

Nurcholis Madjid. “Indonesai Masa Mendatang Ibarat Sosok Santri yang Canggih” dalam *Prisma*. No. 5 Tahun 1988.

Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarasito, 1992

Nurdin H. Kristanto, “Sistem Sosial-Budaya di Indonesia”, makalah, t.t.

Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri Dari Kiai Menjadi Bupati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Pradjarta Dirdjosanjoto. *Memelihara Umat, Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa*. Yogyakarta: LkiS, 1999

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 1992.

Sanapiah Faisal. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta, RajaGrafindo Perkasa

Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Sunyoto Usman. *Sosiologi: Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Cired, 2004.

St. Sunardi, “Dialog: Cara Baru Beragama” dalam Th. Sumartana, *Dialog, Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: Dian/Interfidei.

Syamsul Rijal, “Peran Politik Kiai Dalam Pendidikan Pesantren”, dalam *Tadris Volume 9 Nomor 2 Desember 2014*”.



Talcott Parson. *The Structure of Social Action* New York; Free Press of Glencoe. 1948.

Ted Honderich (ed.), *The Oxford Companion to Philosophy*. New York: Oxford University Press, 1995.

Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution* di bawah judul "Introduction: A Role for History" dan "The Priority of Paradigms". Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Turtiantoro, Pergeseran Kekuatan Politik di DPRD Propinsi Jawa Tengah", dalam Jurnal Politika, Vol. 6, No. 2, Oktober 2015,

Warjio, *Gagalnya Partai Politik Islam*, Yogyakarta, pustaka pelajar, 2018

Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, Jakarta: LP3ES. 1982.

Kompas, 24 Desember 2014

\